



BADAN
PANGAN
NASIONAL



DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI
BANTEN

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

Food Security and
Vulnerability Atlas (FSVA)

**Provinsi Banten
Tahun 2024**

(DATA INDIKATOR TAHUN 2023)





GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 227 TAHUN 2025

TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI BANTEN GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
5. Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 67);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Nomor 500.1.2.3/20-DK Pangan/2025 tanggal 20 Januari 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun pada tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Mei 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 227 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 Mei 2025

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Banten Tahun 2024
Data Indikator Tahun 2023



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

Food Security and
Vulnerability Atlas (FSVA)

**Provinsi Banten
Tahun 2024**

(DATA INDIKATOR TAHUN 2023)



Lampiran Keputusan Gubernur
Nomor : 227 Tahun 2025
Tanggal : 5 Mei 2025

**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN**
Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024
(Data Indikator Tahun 2023)





SAMBUTAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dari berbagai dimensi yang dirinci hingga pada tingkat kecamatan. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa persoalan pangan wilayah sangat bergantung pada banyak aspek (multi dimensional) sehingga indikator yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi ini terdiri dari 12 (dua belas) indikator dalam 4 (empat) dimensi utama yaitu Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Kerentanan Pangan transien. Sehingga kedepannya diharapkan dapat menuntaskan permasalahan dan kondisi ketahanan pangan sesuai rujukan dan gambaran yang diberikan pada tingkat wilayah kecamatan.

Secara khusus pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun atas komitmen dan kerjasamanya untuk menyelesaikan sebuah dokumen yang dinamakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Provinsi Banten Tahun 2024. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan atas dukungan dari instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atas peran aktif dalam proses penyusunan dari tahap pengumpulan data sampai pada penyelesaiannya. Kedepan, saya tetap berharap kerjasama ini terus di tingkatkan untuk menjadikan kondisi ketahanan pangan Provinsi Banten lebih tangguh.

Akhirnya, saya sangat mengharapkan peta ini dapat dijadikan salah satu dokumen perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menjawab permasalahan yang ditunjukkan oleh peta ini baik secara individu maupun komposit agar permasalahan ini dapat terselesaikan secara cepat, tepat dan berkesinambungan.

Serang, Desember 2024

**PLT. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN**

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si



KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) Provinsi Banten Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan – *Food security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Provinsi Banten tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif kepada pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mengenai keadaan ketahanan pangan di Wilayah Provinsi Banten. Peta ini disusun berdasarkan pilar-pilar ketahanan pangan dan merinci situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA Provinsi Banten diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk dengan cepat mengidentifikasi daerah-daerah yang lebih rentan. Dengan demikian, investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia, dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan, ketahanan pangan, dan status gizi masyarakat di Wilayah Provinsi Banten.

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) Provinsi Banten Tahun 2024.

Serang, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	i
KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR DEFINISI	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
TENTANG FSVA	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	2
BAB 2 METODOLOGI	5
2.1 Indikator dan Sumber Data FSVA	5
2.2 Analisis	7
2.3 Pembacaan Hasil Analisis	11
BAB 3 SITUASI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	13
3.1 Situasi Ketahanan Pangan Provinsi Banten	13
3.2 Perubahan Status Ketahanan Pangan Provinsi Banten	17
3.3 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Provinsi Banten	22
BAB 4 KETERSEDIAAN PANGAN	25
4.1 Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Pangan	25
4.2 Capaian Ketersediaan Pangan	29
4.3 Tantangan Peningkatan Ketersediaan Pangan	30
BAB 5 AKSES PANGAN	32
5.1 Persentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan	32
5.2 Persentase Rumah Tangga Dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih Dari 65% ...	38
5.3 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	44
5.4 Tantangan Peningkatan Akses Pangan	49
BAB 6 PEMANFAATAN PANGAN	50
6.1 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia Di Atas 15 Tahun	50
6.2 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	56
6.3 Kecukupan Tenaga Kesehatan	62
6.4 Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar/Tinggi Kurang (<i>Stunting</i>)	67
6.5 Angka Kesakitan	73
6.6 Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan	78
BAB 7 SUMBER DAYA ALAM DAN KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	79
7.1 Bencana Alam	80
7.2 Variabilitas Curah Hujan	81
7.3 Kehilangan Produksi Akibat Banjir, Kekeringan, dan OPT	84

BAB 8 REKOMENDASI KEBIJAKAN 85

 8.1 Rekomendasi Lokasi Fokus Program dan Intervensi 85

 8.2 Rekomendasi Program dan Intervensi 86

 8.3 Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor 88

BAB 9 INDEKS KETAHANAN PANGAN..... 91

BAB 10 PENUTUP..... 94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

LAMPIRAN 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi.....	3
Gambar 6.1	Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih.....	60
Gambar 7.1	Perbandingan Curah Hujan Bulanan Tahun 2023 dengan Normalnya.....	82
Gambar 8.1	Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan.....	86
Gambar 8.2	Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	88
Gambar 8.3	Peran Aktif Pemangku Kepentingan Dalam Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator dan Sumber Data FSVA 2024.....	6
Tabel 2.2	<i>Cut Off Point</i> Indikator Individu.....	7
Tabel 2.3	Bobot Indikator Individu.....	9
Tabel 2.4	<i>Cut Off Point</i> Skor Komposit.....	10
Tabel 3.1	Sebaran Kecamatan Berdasarkan Prioritas Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024.....	13
Tabel 3.2	Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten tahun 2024.....	14
Tabel 3.3	Persentase Kecamatan Berdasarkan Kelompok Prioritas per Kabupaten/Kota.....	17
Tabel 3.4	Sebaran Jumlah Kecamatan Per Prioritas Berdasarkan FSVA Provinsi Banten tahun 2018-2024.....	18
Tabel 3.5	Perubahan Tingkat Prioritas Hasil FSVA 2023 dan 2024.....	18
Tabel 3.6	Nilai Rata-Rata Kecamatan Prioritas Rentan (1-3) dan Prioritas Tahan (4-6).....	22
Tabel 3.7	Perbandingan Rata-rata Kelompok Rentan dan Tahan Pangan 2023-2024.....	23
Tabel 4.1	Hasil Analisis Indikator Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Pangan.....	26
Tabel 4.2	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Provinsi BantenTahun 2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	29
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Hidup Dibawah Garis Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2023.....	33
Tabel 5.2	Hasil Analisis Indikator Persentase Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemsikinan.....	34
Tabel 5.3	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023.....	39
Tabel 5.4	Hasil Analisis Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran.....	39
Tabel 5.5	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Banten Tahun 2023.....	44
Tabel 5.6	Hasil Analis Indikator Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik.....	45
Tabel 6.1	Hasil Analisis Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia Di Atas 15 Tahun.....	51
Tabel 6.2	Hasil Analisis Indikator Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih.....	56
Tabel 6.3	Hasil Analisis Indikator Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk.....	63
Tabel 6.4	Klasifikasi WHO Untuk <i>Underweight</i> , <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i> Dalam Populasi	68
Tabel 6.5	Hasil Analisis Indikator Prevalensi Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar/Tinggi Badan Kurang (<i>Stunting</i>).....	68
Tabel 6.6	Hasil Analisis Indikator Angka Kesakitan.....	73
Tabel 7.1	Tingkat Risiko Bencana Prioritas di Provinsi Banten.....	80
Tabel 7.2	Jumlah Kejadian Bencana Di Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2023.....	81
Tabel 7.3	Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Provinsi Banten Tahun 2023.....	82
Tabel 7.4	Analisis Curah Hujan di Provinsi Banten Tahun 2023.....	83
Tabel 7.5	Data Serangan OPT Dan DPI Pada Tanaman Padi Di Provinsi Banten Tahun 2023.....	84
Tabel 8.1	Pembagian Kewenangan dalam Upaya Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan.....	89
Tabel 9.1	Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2024.....	91
Tabel 9.2	Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tahun 2024.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.....	98
Lampiran 2.	Peta Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Bersih Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.....	99
Lampiran 3.	Peta Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2024.....	100
Lampiran 4.	Peta Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran Provinsi Banten Tahun 2024.....	101
Lampiran 5.	Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Provinsi Banten Tahun 2024.....	102
Lampiran 6.	Peta Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia Di Atas 15 Tahun Provinsi Banten Tahun 2024.....	103
Lampiran 7.	Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Provinsi Banten Tahun 2024.....	104
Lampiran 8.	Peta Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2024.....	105
Lampiran 9.	Peta Prevalensi Balita Dengan Tinggi Badan Dibawah Standar / Tinggi Badan Kurang (<i>Stunting</i>) Provinsi Banten Tahun 2024.....	106
Lampiran 10.	Peta Angka Kesakitan (Penduduk Mengeluh Sakit) Provinsi Banten Tahun 2024.....	107
Lampiran 11.	Hasil Analisis FSVA Provinsi Banten Tahun 2024.....	108
Lampiran 12.	Susunan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023.....	115
Lampiran 13.	Berita Acara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.....	117
Lampiran 14.	Data Dasar Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.....	120

DAFTAR DEFINISI

Ketahanan Pangan

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012).

Kerentanan Pangan

Kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan

Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Status Ketahanan Pangan

Tingkat kerentanan pangan suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap kerawanan pangan, diukur berdasarkan nilai komposit dari sembilan indikator yang dipakai dalam pembuatan peta ini. Tingkat kerentanan pangan dapat dipakai untuk menentukan prioritas pembangunan ketahanan pangan. Enam status ketahanan pangan dalam FSVA: sangat rentan (prioritas 1), rentan (prioritas 2), agak rentan (prioritas 3), agak tahan (prioritas 4), tahan (prioritas 5) dan sangat tahan pangan (prioritas 6).

Ketersediaan Pangan

Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan pemasukan pangan (termasuk impor dan bantuan pangan).

Keterjangkauan Pangan Tingkat Rumah Tangga

Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti: produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah, sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan.

Pemanfaatan Pangan

Penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status Kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Daerah Rentan Rawan Pangan

Daerah yang memiliki karakteristik yang menyebabkannya berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam FSVA, kabupaten/kota yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah yang masuk pada prioritas 1 sampai 3. Kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis Ketidakmampuan jangka Panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor-faktor fisik, sosial, dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat, seperti kondisi iklim, sumber daya alam (tanah, air), sumber daya genetik tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan transien

Ketidakmampuan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang bersifat jangka pendek yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat, disebabkan karena kejadian bencana, baik alam, non alam, maupun sosial.

***Cut off Point* Komposit**

Hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator aindividu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Menghasilkan enam kelompok prioritas pembangunan ketahanan pangan.

Intervensi

Upaya yang dilakukan baik secara sektoral maupun lintas sektor, di pusat maupun daerah dalam bentuk kebijakan, program, dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan pada lokus berdasarkan FSVA.

Ringkasan Eksekutif

Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan

Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)

Provinsi Banten Tahun 2024

1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kerentanan terhadap rawan pangan, yang bertujuan untuk dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan.
2. FSVA menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan enam kelas status ketahanan pangan yaitu: Prioritas 1 merupakan wilayah sangat rentan, Prioritas 2 merupakan wilayah rentan, Prioritas 3 merupakan wilayah agak rentan, Prioritas 4 merupakan wilayah agak tahan, Prioritas 5 merupakan wilayah tahan, dan Prioritas 6 merupakan wilayah sangat tahan.
3. FSVA Provinsi Banten tahun 2024 mencakup 121 kecamatan di wilayah kabupaten dan 34 kecamatan di wilayah kota. Penyusunan FSVA 2024 dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. FSVA kabupaten disusun dengan menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, sedangkan FSVA kota disusun dengan menggunakan delapan indikator yang mewakili aspek akses dan pemanfaatan pangan. Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi Banten 2024 merupakan data tahun 2023, sehingga hasil analisis yang diperoleh akan memberikan gambaran status ketahanan pangan wilayah tahun 2023.
4. Situasi ketahanan pangan Provinsi Banten pada tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah daerah rentan rawan pangan menurun dari 28 kecamatan (18,06%) pada FSVA tahun 2023 menjadi 21 kecamatan (13,55%) pada FSVA tahun 2024. Sebaliknya, jumlah kecamatan tahan pangan meningkat dari 127 kecamatan (81,94%) pada FSVA tahun 2023 menjadi 134 kecamatan (86,45%) pada FSVA tahun 2024.
5. Berdasarkan hasil analisis komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024, dari total 155 Kecamatan yang ada di Provinsi Banten terdapat 21 Kecamatan (13,55%) yang masuk ke dalam prioritas 1-3 (kelompok rentan pangan) terdiri dari 4 kecamatan prioritas 2 dan 17 kecamatan prioritas 3. Sedangkan 134 Kecamatan lainnya (86,45%) masuk ke dalam prioritas 4-6 (kelompok tahan pangan) meliputi 46 kecamatan prioritas 4, 43 kecamatan prioritas 5, dan 45 kecamatan prioritas 6.

6. Sebaran wilayah Kecamatan berdasarkan analisis komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024, meliputi :
 - a. Kecamatan Prioritas 2 (rentan) terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang;
 - b. Kecamatan Prioritas 3 (agak rentan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang;
 - c. Kecamatan Prioritas 4 (agak tahan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang;
 - d. Kecamatan Prioritas 5 (tahan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang;
 - e. Kecamatan Prioritas 6 (sangat tahan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.
7. Kabupaten yang memiliki kecamatan dengan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang paling tinggi adalah Kabupaten Lebak. Terdapat 7 kecamatan di Kabupaten Lebak yang termasuk kategori rentan pangan (Prioritas 1-3). Sedangkan untuk wilayah kota cenderung memiliki tingkat ketahanan pangan lebih baik dimana seluruh kecamatan di wilayah Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan termasuk kategori tahan pangan (Prioritas 4-6).
8. Kecamatan rentan rawan pangan prioritas 2-3 dengan klasifikasi rentan dan agak rentan meliputi :
 - a. Prioritas 2 (rentan) terdiri dari Kecamatan Majasari (Kabupaten Pandeglang); Kecamatan Panongan, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cisauk (Kabupaten Tangerang).
 - b. Prioritas 3 (agak rentan) terdiri dari Kecamatan Carita, Kecamatan Cimanuk, Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Cadasari (Kabupaten Pandeglang); Kecamatan Malingping, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cilleles, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Muncang, Kecamatan Sajira, Kecamatan Curugbitung (Kabupaten Lebak); Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sepatan Timur (Kabupaten Tangerang); Kecamatan Ciomas, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang).
9. Hasil perbandingan status ketahanan pangan pada FSVA tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 155 kecamatan, terdapat 4 kecamatan (2,58%) mengalami peningkatan status sebanyak 2 tingkat dan 34 kecamatan (21,93%) mengalami peningkatan status sebanyak 1 tingkat. Di sisi lain, sebanyak 16 kecamatan (10,32%) mengalami penurunan status ketahanan pangan sebanyak 1 tingkat dan 1 kecamatan (0,65%) mengalami penurunan status ketahanan pangan sebanyak 2 tingkat. Sedangkan 100 kecamatan lainnya (64,52%) tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan.
10. Penyebab kerentanan pangan di 28 kecamatan rentan rawan pangan secara umum adalah : i) tingginya rasio konsumsi terhadap ketersediaan bersih per kapita di wilayah kabupaten; ii) tingginya persentase rumah tangga tanpa akses air bersih di wilayah kabupaten; dan iii) tingginya angka kesakitan di wilayah kabupaten dan kota.

11. Berdasarkan karakteristik daerah rentan rawan pangan dalam FSVA 2024, maka rekomendasi fokus pengentasan kerentanan pangan di Provinsi Banten diprioritaskan pada lokasi berikut.
- Kecamatan-kecamatan rentan pangan yang tersebar di Kabupaten Lebak (7 Kecamatan), Kabupaten Tangerang (6 Kecamatan) Kabupaten Pandeglang (5 Kecamatan), dan Kabupaten Serang (3 Kecamatan).
 - Kecamatan-Kecamatan yang memiliki produktivitas pangan rendah dan keterbatasan lahan yang diakibatkan alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman atau industri serta Kecamatan yang terletak di daerah pesisir.
 - Kecamatan-Kecamatan perbatasan/pemekaran/memiliki lokasi yang relatif jauh dari pusat ibukota Kabupaten/Kota serta infrastruktur dan SDMnya masih terbatas secara kualitas maupun kuantitas.
 - Kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi dan daya beli terbatas.
 - Kecamatan-kecamatan yang memiliki akses air bersih rendah
 - Kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase pendidikan perempuan yang usia diatas 15 tahun rendah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang.
 - Kecamatan-kecamatan yang memiliki angka kesakitan tinggi dan kesadaran ke fasilitas kesehatan yang rendah.
 - Kecamatan-kecamatan yang sering dilanda kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan memiliki puso yang tinggi.
12. Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama (indikator) kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.
- Aspek Ketersediaan

Permasalahan utama yaitu terbatasnya jumlah produksi untuk mencukupi permintaan konsumsi penduduk yang disebabkan oleh keterbatasan lahan, direkomendasikan program dan kegiatan:

 - Meningkatkan kapasitas produksi dan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang aman dan sesuai dengan potensi biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan.
 - Peningkatan Jalur Distribusi Pangan di wilayah urban untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah.
 - Pengadaan cadangan pangan desa untuk wilayah plural melalui pengembangan dan penguatan lumbung pangan masyarakat; terutama pada kabupaten yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan.

- d. Peningkatan bantuan pangan pemerintah.
- e. Kajian dan penelitian untuk peningkatan ketersediaan pangan

2. Aspek Keterjangkauan

Permasalahan utama yaitu terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan, direkomendasikan program dan kegiatan :

- a. Penyediaan Lapangan Kerja melalui peningkatan kegiatan ekonomi wilayah.
- b. Peningkatan Stabilitas Pangan sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah termasuk daerah rentan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen.
- c. Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan .
- d. Peningkatan akses permodalan melalui Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan.
- e. Penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan untuk memenuhi gizi masyarakat dengan memperhatikan bahan pangan lokal.
- f. Pembangunan infrastruktur dasar (terutama berupa jalan usahatani, irigasi, listrik, jaringan internet) untuk meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah.

3. Aspek Pemanfaatan

Permasalahan utama yaitu terbatasnya akses terhadap air bersih, tingkat pendidikan perempuan yang rendah, dan angka kesakitan yang tinggi, direkomendasikan program dan kegiatan:

- a. Pembangunan infrastruktur dasar layanan air bersih.
- b. Peningkatan program pendidikan Perempuan dan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan serta peningkatan infrastruktur pendidikan.
- c. Penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak serta peningkatan konsumsi pangan (B2SA).
- d. Peningkatan partisipasi vaksin /imunisasi, fasilitasi sanitasi lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan.

13. Sinergi lintas sektor dari pusat dan daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat secara konvergen melalui program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rentan pangan agar berdampak pada penguatan ketahanan pangan wilayah dan nasional secara berkelanjutan.

14. Akhirnya perlu meningkatkan komitmen para pihak dalam penguatan ketahanan pangan dan pengentasan daerah rentan rawan pangan baik dalam hal dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, kelembagaan pangan daerah yang kuat, ketersediaan jumlah dan kualitas SDM yang handal dan dukungan teknologi, program dan kegiatan yang inovatif, kreatif dan solutif bagi upaya pengendalian kerawanan pangan.

TENTANG FSVA

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kerentanan terhadap rawan pangan pada tahun tertentu baik secara komposit maupun menurut masing-masing indikator.

Sejarah Singkat Perkembangan FSVA di Indonesia

Penyusunan FSVA tingkat nasional dimulai dengan diterbitkannya Peta Kerawanan Pangan atau *Food Insecurity Atlas* (FIA) pada tahun 2005. Penyusunan FIA merupakan hasil kerja sama antara Badan Ketahanan Pangan (BKP) dengan *World Food Programme* (WFP) yang dimulai sejak tahun 2002.

Tujuan utama pembuatan FIA adalah untuk mengidentifikasi titik-titik rawan pangan Tingkat kabupaten di Indonesia, menemu-kenali penyebab kerawanan pangan di suatu kabupaten, serta menyediakan petunjuk dalam mengembangkan strategi mitigasi yang tepat untuk penanganan kerawanan pangan kronis. Sepuluh indikator digunakan untuk mengukur kerawanan pangan pada FIA tahun 2005. Pemanfaatan FIA dalam perencanaan penanganan kerawanan pangan ternyata tidak optimal, karena ada semacam keengganan atau penolakan dari pimpinan daerah terhadap penggunaan istilah “Rawan Pangan” yang disematkan pada daerahnya yang dikategorikan rawan pangan dalam buku FIA.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi tentang kerentanan pangan di daerah dan untuk mengatasi kesalahpahaman dari pimpinan daerah tentang istilah “rawan pangan” yang melekat pada judul buku FIA, pada tahun 2009 BKP meneruskan kerja sama dengan WFP menyusun dan menerbitkan FSVA. Di samping menambahkan informasi tentang status situasi ketahanan pangan setempat, penggunaan istilah rawan pangan juga diganti dengan “kerentanan terhadap rawan pangan”. Indikator yang digunakan masih sama dengan indikator FIA tahun 2005, kecuali angka kematian bayi yang datanya tidak tersedia.

Kualitas FSVA terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan untuk melayani kebutuhan pengguna, khususnya dalam menentukan fokus penanganan daerah dan program utama penanganan rentan pangan. Peningkatan kualitas FSVA terutama terkait dengan penyempurnaan indikator yang digunakan agar menjadi lebih sederhana, namun di sisi lain semakin tajam dan akurat dalam merepresentasikan kondisi ketahanan dan kerentanan terhadap rawan pangan di suatu daerah. Pertimbangan lain dalam perubahan yang dilakukan adalah kesinambungan ketersediaan data. Salah satu yang disesuaikan pada FSVA 2015 yaitu indikator pengukuran pertumbuhan balita yang semula menggunakan prevalensi gizi kurang (BB/U) diubah menjadi prevalensi *stunting* (TB/U) untuk mengukur kerawanan pangan dan gizi kronis serta mendukung program pemerintah untuk mengentaskan stunting.

Pada penyusunan FSVA tahun 2018, penyempurnaan beberapa indikator kembali dilakukan. Beberapa perubahan indikator yang signifikan adalah (a) persentase desa dengan akses penghubung yang tidak memadai diganti dengan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang tinggi, (b) persentase perempuan di atas 15 tahun yang buta huruf diganti menjadi rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, dan (c) persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari lima km dari fasilitas

kesehatan diganti menjadi rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap Tingkat kepadatan penduduk. Ketiga indikator tersebut secara konsisten digunakan hingga penyusunan FSVA 2023 ini.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Metode perhitungan yang digunakan untuk analisis komposit juga terus disempurnakan. FSVA 2005 dan FSVA 2009 menggunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*), sementara itu FSVA 2015 menggunakan metode analisis gerombol (*clustering*) dan analisis diskriminan. FSVA 2018 hingga FSVA 2022 menggunakan metode pembobotan dengan expert judgement mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan *Global Food Security Index* (GFSI).

Penyusunan FSVA Nasional ditindaklanjuti dengan penyusunan FSVA di tingkat provinsi dengan lokus kecamatan, dan di tingkat kabupaten/kota dengan lokus desa/kelurahan. Upaya tersebut dilakukan agar lokasi intervensi program dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Sejalan dengan itu, penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BIG, BMKG, BNPB, BRIN, BULOG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2023 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional.

Pemanfaatan FSVA

FSVA memberikan dua informasi penting yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam perencanaan dan evaluasi situasi ketahanan pangan di masing-masing wilayah. Informasi pertama menggambarkan wilayah tahan dan rentan terhadap kerawanan pangan, dan informasi kedua menyajikan karakteristik daerah rentan rawan pangan.

FSVA menyediakan informasi untuk pelaksanaan program yang lebih bersifat preventif, yaitu memberikan indikasi awal bahwa di daerah-daerah (lokus) tertentu bisa saja terjadi kerawanan pangan apabila tidak segera dilakukan tindakan-tindakan yang relevan dan sistematis untuk pencegahan dan penanganannya. Peta ini tidak hanya menyajikan data dan informasi, tetapi juga menyajikan rekomendasi yang bersifat preskriptif meski masih secara umum. Dalam menganalisis dan mengartikan situasi ketahanan pangan suatu daerah berdasarkan informasi yang disajikan dalam FSVA, dibahas pula keterkaitannya dengan faktor risiko lainnya seperti kejadian bencana alam dan guncangan lainnya baik dari luar daerah maupun dari daerah itu sendiri. Hal ini dilakukan agar peta FSVA ini lebih “hidup” dan lebih bermanfaat bagi pengguna.

Persentase daerah rentan rawan pangan sebagai hasil FSVA merupakan salah satu indikator kinerja Pembangunan Daerah di bidang pangan. Indikator ini merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, juga menyebutkan bahwa untuk memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi krisis pangan, diperlukan kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi, berbasis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Implementasi pemanfaatan hasil FSVA sebagai salah satu dasar dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. Instansi-instansi yang menggunakan informasi FSVA antara lain Sekretariat Wakil Presiden; Kementerian Pertanian; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; WFP; dan beberapa Perguruan Tinggi. Di tingkat daerah, FSVA dimanfaatkan oleh BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai instrument pemantauan ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional, FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerjasama dengan *World Food Programme* (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan peta kerawanan pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 diluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) yang *diupdate* pada tahun 2015, selanjutnya sejak tahun 2018 peta ketahanan dan kerentanan pangan dilakukan setiap tahun.

FSVA selanjutnya dimanfaatkan dan digunakan untuk : (1) dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan, dan (2) penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan. Hasil penyusunan FSVA memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan. FSVA mengandung informasi yang sangat strategis dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan. FSVA dijadikan salah satu dasar dalam penetapan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan *stunting*, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

Mengingat pentingnya FSVA sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan, juga sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional tahun 2024 maka pemutakhiran FSVA Provinsi perlu dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan terkini dapat mencerminkan kondisi dan fakta terbaru sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilakukan. FSVA Provinsi dilakukan dengan analisis sampai tingkat kecamatan. Pemutakhiran FSVA Provinsi Banten tahun 2024 dilaksanakan di tingkat provinsi dengan lokus kecamatan, meliputi 155 Kecamatan dari 4 Kabupaten dan 4 Kota yang disusun

berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan menggunakan beberapa indikator yang terdiri dari indikator kronis dan indikator transien. Penyusunan FSVA tahun 2024 melibatkan partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait ketahanan pangan di tingkat Provinsi serta Dinas yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

FSVA Provinsi Banten diharapkan dapat menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Wilayah Provinsi Banten. Sejalan dengan itu, pembangunan dan penanganan masalah kerawanan pangan perlu dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan sumber daya manusia berkualitas, tidak hanya pembangunan infrastruktur semata. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah.

1.2 Tujuan

Penyusunan FSVA Provinsi Banten Tahun 2024 dilakukan dalam rangka menyediakan informasi kondisi ketahanan dan kerentanan pangan terbaru sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi terhadap program dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan penanganan kerawanan pangan sampai tingkat kecamatan secara komprehensif.

1.3 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

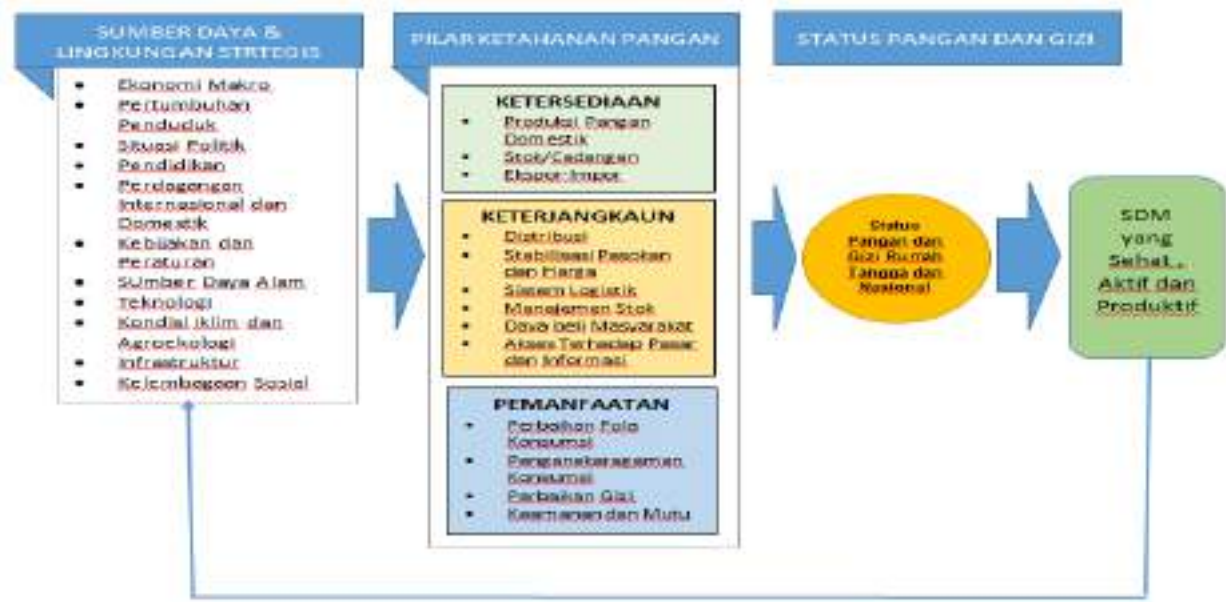
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pengertian ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun memiliki peran yang sangat penting berkaitan erat dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi dalam penyusunan FSVA 2024 (Gambar 1.1) dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan : ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan serta mengintegrasikan aspek gizi dan keamanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan. Pilar akses atau keterjangkauan pangan pada tingkat

rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti: produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah dan sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses atas pangan menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah belum tentu dapat dimanfaatkan apabila rumah tangga tersebut memiliki keterbatasan akses fisik, ekonomi atau sosial. Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk mengkonsumsi pangan dan tubuh dapat menyerap dan metabolisme zat gizi dengan baik. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan pemenuhan persyaratan keamanan makanan dan minuman. Pemanfaatan pangan juga berkaitan dengan kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan status gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur kualitas pemanfaatan pangan rumah tangga.

Gambar 1. 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi



Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut secara konvergen, diperlukan lingkungan strategis yang kondusif, diantaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi pelaku usaha, termasuk produsen (petani) dan konsumen (masyarakat), ketersediaan sumber daya alam yang pengelolaannya mengacu pada pembangunan berkelanjutan, kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan kondisi iklim, serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi serta inovasi yang mendukung bagi peningkatan produksi pangan dengan pertumbuhan yang berlanjut setiap tahun.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi tercermin dari status pangan dan gizi individu atau perseorangan yang memiliki kemampuan menjalani hidup sehat, aktif, dan produktif serta kreatif secara berkelanjutan. Dengan kualitas individu seperti itu, kualitas SDM secara keseluruhan diharapkan mampu berkiprah dan bersaing dalam tataran pergaulan global.

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Indikator dan Sumber Data FSVA

Ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-demensi yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dari berbagai sektor. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan memilah beberapa indikator proxy yang dipakai ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan secara individu.

Berdasarkan hasil telaah Tim FSVA, Sembilan indikator digunakan untuk mengukur kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis. Kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat serta faktor-faktor fisik, sosial, dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat. Faktor tersebut antara lain kondisi iklim, sumber daya alam (lahan, air), sumber daya genetic tanaman dan hewan, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, pola kepemilikan dan pengusahaan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis, yaitu rasio konsumsi pangan terhadap ketersediaan, persentase penduduk miskin, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga terhadap pengeluaran total, infrastruktur listrik, akses terhadap air bersih, angka kesakitan, tingkat pendidikan perempuan dan stunting pada balita. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data secara berkala.

FSVA juga menyajikan informasi terkait data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan organisasi pengganggu tanaman, serta variabilitas curah hujan. Perubahan faktor dinamis tersebut mempengaruhi penyediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan yang menyebabkan menurunnya ketahanan pangan, dan akhirnya menyebabkan kerawanan pangan kronis.

Tabel 2. 1. Indikator dan Sumber Data FSVA 2024

INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
Ketersediaan Pangan		
Rasio konsumsi normatif per Kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealisa dan umbi-umbian (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu), serta stok beras pemerintah daerah. Konsumsi normatif serealisa dan umbi-umbian adalah 300 gram/kapita/hari	Dinas Pertanian Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten (diolah oleh Dinas Ketahanan ppangan, 2024)
Akses Pangan		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Dikategorikan miskin jika pengeluaran perkapita sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan	Kemenko PMK RI, Bappeda Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten (diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan, 2024)
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65 persen dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan non makanan) rumah tangga	SUSENAS BPS (diestimasi dengan metode SAE, 2024)
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator	SUSENAS BPS (diestimasi dengan metode SAE, 2024)
Pemanfaatan Pangan		
Rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia diatas 15 tahun	Rata-rata lama bersekolah (total tahun bersekolah sampai pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki) perempuan berusia 15 tahun ke atas	SUSENAS BPS (diestimasi dengan metode SAE, 2024)
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Rumah tangga yang menggunakan sumber utama air untuk minum berasal dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya dengan jarak kurang dari 10 meter ke jamban	SUSENAS BPS (diestimasi dengan metode SAE, 2024)
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesahatan terhadap tingkat kepadatan pduduk	Jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk	Dinas Kesehatan Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten (Diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2024)
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005)	Dinas Kesehatan Provinsi Banten, DP3AKKB Provinsi Banten (Diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2024)

Angka kesakitan	Angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik mauun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.	SUSENAS BPS (diestimasi dengan metode SAE, 2024)
Sumber Daya Alam dan Ketangguhan Terhadap Bencana		
Bencana alam yang terkait iklim	Bencana alam yang terjadi karena faktor iklim diperkirakan berdampak terhadap ketahanan pangan	BPBD Provinsi Banten, 2023
Variabilitas curah hujan	Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celcius	BMKG Banten, 2023
Kehilangan produksi	Kehilangan produksi tanaman pangan akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT)	Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2023

2.2 Analisis

Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokan delapan indikator dilakukan dengan mengikuti pola sebaran empiris, sedangkan pengelompokan satu indikator yaitu persentase balita stunting dilakukan dengan mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO) yang disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. *Cut Off Point* Indikator Individu

Indikator	Range	Kelompok
Ketersediaan Pangan		
1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah	≥ 1,50	Defisit tinggi
	1,25 - <1,50	Defisit sedang
	1,00 - <1,25	Defisit rendah
	0,75 - <1,00	Surplus rendah
	0,50 - <0,75	Surplus sedang
	< 0,50	Surplus tinggi
Akses terhadap Pangan		
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	≥ 35	Sangat buruk
	25 - < 35	Buruk
	20 - < 25	Agak buruk
	15 - < 20	Agak baik
	10 - < 15	Baik
	<10	Sangat baik
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	≥ 70	Sangat buruk
	60 - <70	Buruk
	50 - <60	Agak buruk
	40 - <50	Agak baik
	30 - <40	Baik
	<30	Sangat baik

Indikator	Range	Kelompok
Akses terhadap Pangan		
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	≥ 50	Sangat buruk
	$40 - < 50$	Buruk
	$30 - < 40$	Agak buruk
	$20 - < 30$	Agak baik
	$10 - < 20$	Baik
	< 10	Sangat baik
Pemanfaatan Pangan		
5. Rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia di atas 15 tahun	< 6	Sangat buruk
	$6 - < 6,5$	Buruk
	$6,5 - < 7,5$	Agak buruk
	$7,5 - < 8,5$	Agak baik
	$8,5 - < 9$	Baik
	≥ 9	Sangat baik
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	≥ 70	Sangat buruk
	$60 - < 70$	buruk
	$50 - < 60$	Agak buruk
	$40 - < 50$	Agak baik
	$30 - < 40$	Baik
	< 30	Sangat baik
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	≥ 30	Sangat buruk
	$20 - < 30$	Buruk
	$15 - < 20$	Agak buruk
	$10 - < 15$	Agak baik
	$5 - < 10$	Baik
	< 5	Sangat baik
8. Persentase balita dengan tinggi bada di bawah standar (<i>stunting</i>)	≥ 40	Sangat buruk
	$30 - < 39$	Buruk
	$20 - < 29$	Kurang
	< 20	Baik
9. Angka Kesakitan	≥ 17	Sangat Buruk
	$14 - < 17$	Buruk
	$12 - < 14$	Agak Buruk
	$10 - < 12$	Agak baik
	$7 - < 10$	Baik
	< 7	Sangat baik

Analisis Komposit

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan bahwa jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0-100).
2. Menghitung skor komposit kecamatan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- Yj : Skor komposit kecamatan ke-j
- ai : Bobot masing-masing indikator ke-i
- Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kecamatan ke-j
- i : Indikator ke 1,2,...,9
- j : Kecamatan ke 1,2,...dst

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgment*) yang berasal dari akademisi pemerintah (Tabel 2.3). Khusus untuk analisis wilayah kecamatan di perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah kecamatan di perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 2. 3 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
Aspek Ketersediaan Pangan			
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu	0,30	-
Sub Total		0,30	-
Aspek Keterjangkauan Pangan			
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untukpangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	0,075	0,125
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
Sub Total		0,30	0,45

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
Aspek Pemanfaatan Pangan			
5	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
6	Angka Kesakitan	0,10	0,13
7	Rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia di atas 15 tahun	0,05	0,08
8	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	0,08
9	Prevalensi balita <i>Stunting</i>	0,05	0,08
Sub Total		0,40	0,55

3. Mengelompokan kecamatan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{i=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

K_j : *Cut off point* komposit ke-j

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-i komposit ke-j

i : Indikator ke 1,2,3,.....9

j : Komposit ke 1,2,3.....6

FSVA komposit menggunakan 6 prioritas. Pengelompokan prioritas komposit ketahanan pangan didasarkan pada sebaran nilai komposit. Nilai *cut off point* komposit FSVA sebelumnya (tahun dasar/*baseline*) dapat dijadikan dasar pengelompokan nilai komposit di FSVA 2024.

Tabel 2. 4. *Cut off Point* Skor Komposit

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<= 40,59	<= 13,49
2	> 40,59 – 51,63	> 13,49 – 29,98
3	> 51,63 – 60,68	> 29,98 – 42,91
4	> 60,68 – 69,73	> 42,91 – 55,84
5	> 69,73 – 78,60	> 55,84 – 68,69
6	> 78,60	> 68,69

Wilayah di Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam enam kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Wilayah yang berada pada Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (Prioritas 1), rentan (Prioritas 2), dan agak rentan (Prioritas 3). Wilayah pada Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (Prioritas 4), tahan (Prioritas 5), dan sangat tahan (Prioritas 6). Dengan kata lain, wilayah prioritas 1 memiliki tingkat risiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rentan pangan, juga sebaliknya wilayah pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kecamatan yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan dan gizi serta mengukur perubahan statusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta dengan menggunakan *software* QuantumGIS. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan dan gradasi hijau menunjukkan variasi ketahanan pangan. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan. Prioritas 1 (sangat rentan) digambarkan oleh warna merah tua, sedangkan prioritas 6 (sangat tahan) digambarkan oleh warna hijau tua.

2.3 Pembacaan Hasil Analisis

Penyusunan FSVA Provinsi Banten 2024 untuk Kabupaten dan 4 Kota dilakukan analisis secara terpisah antara kabupaten dan kota atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik penentu ketahanan pangan antara kabupaten dan kota. Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2024 merupakan data-data tahun 2023, sehingga hasil analisis yang diperoleh akan memberikan gambaran status ketahanan pangan wilayah tahun 2023.

Metode yang digunakan untuk mengurutkan dan mengelompokkan wilayah Kecamatan ke dalam prioritas status ketahanan pangan yaitu metode analisis komposit menggunakan pembobotan mengadopsi metode penyusunan *Global Food Security Index (GFSI)*. Penggunaan pendekatan pembobotan ini dapat meningkatkan objektivitas hasil dari analisis komposit. Bobot masing-masing indikator individu diperoleh melalui sistem *judgment* yang ditetapkan oleh para ahli. Analisis komposit menghasilkan skor komposit dari masing-masing kecamatan, yang selanjutnya dikelompokkan kedalam salah satu dari 6 kelompok prioritas. Kecamatan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kecamatan yang berada pada Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (Prioritas 1), rentan 2 (Prioritas 2), dan agak rentan (Prioritas 3). Kecamatan pada prioritas 4, 5, dan 6 merupakan

wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (Prioritas 4), tahan (Prioritas 5), dan sangat tahan (Prioritas 6). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi Kecamatan yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan dan gizi.

Status kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah tidak menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kerawanan pangan, akan tetapi memberikan peringatan kepada pengambil kebijakan bahwa ada wilayah yang berpotensi rawan pangan dan tanpa intervensi yang tepat dan sistematis, maka daerah rentan tersebut dapat berubah menjadi rawan pangan. Oleh karena itu, dalam analisis FSVA ini juga tersedia preskripsi atau resep umum untuk mencegah dan mengatasi masalah agar situasi tidak mengarah pada kerawanan pangan. Tentunya preskripsi ini harus dijabarkan lebih rinci sesuai situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Penting untuk menegaskan bahwa indikator yang disajikan adalah rata-rata wilayah sehingga suatu kecamatan yang diidentifikasi relatif lebih tahan pangan (kelompok prioritas 4-6), tidak berarti seluruh wilayah desa serta seluruh penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga wilayah yang tergolong rentan pangan (kelompok prioritas 1-3), tidak semua wilayah desa serta penduduk di dalamnya juga rentan pangan. Untuk dapat mengidentifikasi daerah mana yang benar-benar rentan pangan pada level desa, diperlukan adanya tindak lanjut berupa pembuatan peta kabupaten/kota hingga unit wilayah terkecil.

BAB 3

SITUASI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

PROVINSI BANTEN

3.1 Situasi Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2024 menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dengan lokus wilayah Kecamatan yang ada di 4 Kabupaten dan 4 Kota di Wilayah Provinsi Banten. Penyusunan FSVA menggunakan sembilan indikator yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan dengan memperhatikan ketersediaan data dan informasi pendukung lainnya dari lintas sektor terkait.

Berdasarkan hasil analisis komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024, dari total 155 Kecamatan yang ada di Provinsi Banten terdapat 21 Kecamatan (13,55%) yang masuk ke dalam prioritas 1-3 (kelompok rentan pangan) dan 134 Kecamatan lainnya (86,45%) masuk ke dalam prioritas 4-6 (kelompok tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 1. Sebaran Kecamatan Berdasarkan Prioritas Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2024

Prioritas	Jumlah Kecamatan	Persentase (%)
1	0	0,00
2	4	2,58
3	17	10,97
4	46	29,68
5	43	27,74
6	45	29,03
Total	155	100

Secara umum kecamatan di wilayah Kabupaten memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah kota. Selain itu, kecamatan yang terletak di wilayah perbatasan juga memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Dari 121 kecamatan di wilayah kabupaten, terdapat 21 kecamatan yang masuk kelompok rentan pangan (Prioritas 1-3) dan 100 kecamatan lainnya masuk kelompok tahan pangan (Prioritas 4-6). Sedangkan kecamatan yang terletak di wilayah Kota cenderung memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten, dimana seluruh kecamatan di wilayah Kota termasuk kategori tahan pangan (Prioritas 4-6). Sebaran kecamatan berdasarkan analisis komposit adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Prioritas 2 (rentan) terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang;
2. Kecamatan Prioritas 3 (agak rentan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang;
3. Kecamatan Prioritas 4 (agak tahan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang;

- Kecamatan Prioritas 5 (tahan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang;
- Kecamatan Prioritas 6 (sangat tahan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan
- Prioritas 1 (sangat rentan) terdapat di Kabupaten Serang;

Tabel 3. 2. Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Majasari	2
2	Tangerang	Panongan	2
3	Tangerang	Pagedangan	2
4	Tangerang	Cisauk	2
5	Pandeglang	Carita	3
6	Pandeglang	Cimanuk	3
7	Pandeglang	Kaduhejo	3
8	Pandeglang	Cadasari	3
9	Lebak	Malingping	3
10	Lebak	Banjarsari	3
11	Lebak	Cileles	3
12	Lebak	Leuwidamar	3
13	Lebak	Muncang	3
14	Lebak	Sajira	3
15	Lebak	Curugbitung	3
16	Tangerang	Tigaraksa	3
17	Tangerang	Cikupa	3
18	Tangerang	Sepatan Timur	3
19	Serang	Ciomas	3
20	Serang	Gunungsari	3
21	Serang	Mancak	3
22	Pandeglang	Cimanggu	4
23	Pandeglang	Cibaliung	4
24	Pandeglang	Cibitung	4
25	Pandeglang	Cikeusik	4
26	Pandeglang	Cigeulis	4
27	Pandeglang	Munjul	4
28	Pandeglang	Angsana	4
29	Pandeglang	Sindangresmi	4
30	Pandeglang	Picung	4
31	Pandeglang	Bojong	4
32	Pandeglang	Cisata	4
33	Pandeglang	Patia	4
34	Pandeglang	Cikedal	4
35	Pandeglang	Pulosari	4
36	Pandeglang	Mandalawangi	4
37	Pandeglang	Cipeucang	4
38	Pandeglang	Banjar	4
39	Pandeglang	Koroncong	4
40	Lebak	Wanasalam	4
41	Lebak	Panggarangan	4
42	Lebak	Cilograng	4
43	Lebak	Cijaku	4

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
44	Lebak	Cigemblong	4
45	Lebak	Gunung Kencana	4
46	Lebak	Bojongmanik	4
47	Lebak	Cirinten	4
48	Lebak	Sobang	4
49	Lebak	Cipanas	4
50	Lebak	Cimarga	4
51	Tangerang	Cisoka	4
52	Tangerang	Solear	4
53	Tangerang	Curug	4
54	Tangerang	Kelapa Dua	4
55	Tangerang	Legok	4
56	Tangerang	Pasarkemis	4
57	Tangerang	Teluknaga	4
58	Tangerang	Kosambi	4
59	Serang	Cinangka	4
60	Serang	Pabuaran	4
61	Serang	Baros	4
62	Serang	Kopo	4
63	Serang	Waringinkurung	4
64	Kota Serang	Curug	4
65	Kota Serang	Walantaka	4
66	Kota Serang	Taktakan	4
67	Kota Serang	Kasemen	4
68	Pandeglang	Sumur	5
69	Pandeglang	Panimbang	5
70	Pandeglang	Saketi	5
71	Pandeglang	Pagelaran	5
72	Pandeglang	Sukaresmi	5
73	Pandeglang	Labuan	5
74	Pandeglang	Jiput	5
75	Pandeglang	Menes	5
76	Pandeglang	Mekarjaya	5
77	Pandeglang	Pandeglang	5
78	Pandeglang	Karangtanjung	5
79	Lebak	Cihara	5
80	Lebak	Cibeber	5
81	Lebak	Lebakgedong	5
82	Lebak	Cikulur	5
83	Lebak	Warunggunung	5
84	Lebak	Cibadak	5
85	Lebak	Rangkasbitung	5
86	Lebak	Kalanganyar	5
87	Lebak	Maja	5
88	Tangerang	Jambe	5
89	Tangerang	Sindang Jaya	5
90	Tangerang	Balaraja	5
91	Tangerang	Jayanti	5
92	Tangerang	Sukamulya	5
93	Tangerang	Kresek	5
94	Tangerang	Mekar Baru	5
95	Tangerang	Mauk	5

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
96	Tangerang	Kemiri	5
97	Tangerang	Sukadiri	5
98	Tangerang	Rajeg	5
99	Tangerang	Sepatan	5
100	Tangerang	Pakuhaji	5
101	Serang	Padarincang	5
102	Serang	Petir	5
103	Serang	Tunjung Teja	5
104	Serang	Pamarayan	5
105	Serang	Anyar	5
106	Kota Tangerang	Jati Uwung	5
107	Kota Cilegon	Ciwandan	5
108	Kota Cilegon	Citangkil	5
109	Kota Cilegon	Pulomerak	5
110	Kota Serang	Cipocok Jaya	5
111	Pandeglang	Sobang	6
112	Lebak	Bayah	6
113	Tangerang	Gunung Kaler	6
114	Tangerang	Kronjo	6
115	Serang	Cikeusal	6
116	Serang	Bandung	6
117	Serang	Jawilan	6
118	Serang	Cikande	6
119	Serang	Kibin	6
120	Serang	Kragilan	6
121	Serang	Bojonegara	6
122	Serang	Pulo Ampel	6
123	Serang	Kramatwatu	6
124	Serang	Ciruas	6
125	Serang	Pontang	6
126	Serang	Lebak Wangi	6
127	Serang	Carenang	6
128	Serang	Binuang	6
129	Serang	Tirtayasa	6
130	Serang	Tanara	6
131	Kota Tangerang	Ciledug	6
132	Kota Tangerang	Larangan	6
133	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
134	Kota Tangerang	Cipondoh	6
135	Kota Tangerang	Pinang	6
136	Kota Tangerang	Tangerang	6
137	Kota Tangerang	Karawaci	6
138	Kota Tangerang	Cibodas	6
139	Kota Tangerang	Periuk	6
140	Kota Tangerang	Batuceper	6
141	Kota Tangerang	Neglasari	6
142	Kota Tangerang	Benda	6
143	Kota Cilegon	Purwakarta	6
144	Kota Cilegon	Grogol	6
145	Kota Cilegon	Cilegon	6
146	Kota Cilegon	Jombang	6
147	Kota Cilegon	Cibeber	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
148	Kota Serang	Serang	6
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

Kabupaten yang memiliki kecamatan dengan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang paling tinggi adalah Kabupaten Lebak. Terdapat 7 kecamatan di Kabupaten Lebak yang termasuk kategori rentan pangan (Prioritas 1-3). Sedangkan untuk wilayah kota cenderung memiliki tingkat ketahanan pangan lebih baik dimana seluruh kecamatan di wilayah Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan termasuk kategori tahan pangan (Prioritas 4-6).

Tabel 3. 3. Persentase Kecamatan Berdasarkan Kelompok Prioritas per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Prioritas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Pandeglang	0%	2,86%	11,43%	51,42%	31,43%	2,86%	100%
Lebak	0%	0%	25,00%	39,28%	32,14%	3,57%	100%
Tangerang	0%	10,34%	10,34%	27,59%	44,83%	6,90%	100%
Serang	0%	0%	10,34%	17,24%	17,24%	55,18%	100%
Kota Tangerang	0%	0%	0%	0%	7,69%	92,31%	100%
Kota Cilegon	0%	0%	0%	0%	37,50%	62,50%	100%
Kota Serang	0%	0%	0%	66,66%	16,67%	16,67%	100%
Kota Tangerang Selatan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTAL	0%	2,58%	10,97%	29,68%	27,74%	29,03%	100%

3.2 Perubahan Status Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 155 kecamatan dari FSVA tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan perbandingan FSVA Provinsi Banten Tahun 2023 dan Tahun 2024 menunjukkan perbaikan situasi ketahanan pangan di Provinsi Banten. Secara umum jumlah kecamatan rentan rawan pangan menurun dari 28 kecamatan (18,06%) pada FSVA tahun 2023 menjadi 21 kecamatan (13,55%) pada FSVA tahun 2023. Sebaliknya, jumlah kecamatan tahan pangan meningkat dari 127 kecamatan (81,94%) pada FSVA tahun 2023 menjadi 134 kecamatan (86,45%) pada FSVA tahun 2024.

Tabel 3. 4. Sebaran Jumlah Kecamatan Per Prioritas Berdasarkan FSVA Provinsi Banten tahun 2018-2024

Prioritas	Jumlah Kecamatan						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	0	0	1	1	0	1	0
2	2	2	2	3	0	2	4
3	6	6	3	14	13	25	17
4	51	51	29	42	32	51	46
5	73	73	49	62	58	36	43
6	23	23	71	33	52	40	45
Jumlah Kecamatan Prioritas 1-3	8	8	6	18	13	28	21
Jumlah Kecamatan Prioritas 4-6	147	147	149	137	142	127	134

Hasil perbandingan status ketahanan pangan pada FSVA tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dari total 155 kecamatan, terdapat 4 kecamatan (2,58%) mengalami peningkatan status sebanyak 2 tingkat dan 34 kecamatan (21,93%) mengalami peningkatan status sebanyak 1 tingkat. Di sisi lain, sebanyak 16 kecamatan (10,32%) mengalami penurunan status ketahanan pangan sebanyak 1 tingkat dan 1 kecamatan (0,65%) mengalami penurunan status ketahanan pangan sebanyak 2 tingkat. Sedangkan 100 kecamatan lainnya (64,52%) tidak mengalami perubahan status ketahanan pangan. Perubahan tingkat prioritas kecamatan per kabupaten/kota secara detail terdapat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5. Perubahan Tingkat Prioritas Hasil FSVA 2023 dan 2024

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	FSVA 2023	FSVA 2024	Perubahan Status Ketahanan Pangan
1	Pandeglang	Sumur	4	5	Naik 1
2	Pandeglang	Cimanggu	4	4	Tetap
3	Pandeglang	Cibaliung	4	4	Tetap
4	Pandeglang	Cibitung	3	4	Naik 1
5	Pandeglang	Cikeusik	4	4	Tetap
6	Pandeglang	Cigeulis	4	4	Tetap
7	Pandeglang	Panimbang	6	5	Turun 1
8	Pandeglang	Sobang	5	6	Naik 1
9	Pandeglang	Munjul	4	4	Tetap
10	Pandeglang	Angsana	5	4	Turun 1
11	Pandeglang	Sindangresmi	4	4	Tetap
12	Pandeglang	Picung	4	4	Tetap
13	Pandeglang	Bojong	4	4	Tetap
14	Pandeglang	Saketi	3	5	Naik 2
15	Pandeglang	Cisata	4	4	Tetap
16	Pandeglang	Pagelaran	4	5	Naik 1
17	Pandeglang	Patia	4	4	Tetap
18	Pandeglang	Sukaresmi	5	5	Tetap
19	Pandeglang	Labuan	4	5	Naik 1
20	Pandeglang	Carita	4	3	Turun 1

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	FSVA 2023	FSVA 2024	Perubahan Status Ketahanan Pangan
21	Pandeglang	Jiput	4	5	Naik 1
22	Pandeglang	Cikedal	4	4	Tetap
23	Pandeglang	Menes	4	5	Naik 1
24	Pandeglang	Pulosari	4	4	Tetap 1
25	Pandeglang	Mandalawangi	4	4	Tetap
26	Pandeglang	Cimanuk	4	3	Turun 1
27	Pandeglang	Cipeucang	4	4	Tetap
28	Pandeglang	Banjar	3	4	Naik 1
29	Pandeglang	Kaduhejo	5	3	Turun 2
30	Pandeglang	Mekarjaya	5	5	Tetap
31	Pandeglang	Pandeglang	5	5	Tetap
32	Pandeglang	Majasari	3	2	Turun 1
33	Pandeglang	Cadasari	4	3	Turun 1
34	Pandeglang	Karangtanjung	5	5	Tetap
35	Pandeglang	Koroncong	4	4	Tetap
36	Lebak	Malingping	3	3	Tetap
37	Lebak	Wanasalam	3	4	Naik 1
38	Lebak	Panggarangan	4	4	Tetap
39	Lebak	Cihara	5	5	Tetap
40	Lebak	Bayah	6	6	Tetap
41	Lebak	Cilograng	4	4	Tetap
42	Lebak	Cibeber	6	5	Turun 1
43	Lebak	Cijaku	4	4	Tetap
44	Lebak	Cigemblong	3	4	Naik 1
45	Lebak	Banjarsari	3	3	Tetap
46	Lebak	Cileles	3	3	Tetap
47	Lebak	Gunung Kecana	3	4	Naik 1
48	Lebak	Bojongmanik	3	4	Naik 1
49	Lebak	Cirinten	3	4	Naik 1
50	Lebak	Leuwidamar	2	3	Naik 1
51	Lebak	Muncang	3	3	Tetap
52	Lebak	Sobang	4	4	Tetap
53	Lebak	Cipanas	3	4	Naik 1
54	Lebak	Lebakgedong	5	5	Tetap
55	Lebak	Sajira	3	3	Tetap
56	Lebak	Cimarga	4	4	Tetap
57	Lebak	Cikulur	5	5	Tetap
58	Lebak	Warunggunung	5	5	Tetap
59	Lebak	Cibadak	6	5	Turun 1
60	Lebak	Rangkasbitung	5	5	Tetap
61	Lebak	Kalanganyar	5	5	Tetap
62	Lebak	Maja	5	5	Tetap
63	Lebak	Curugbitung	4	3	Turun 1
64	Tangerang	Cisoka	4	4	Tetap
65	Tangerang	Solear	4	4	Tetap
66	Tangerang	Tigaraksa	3	3	Tetap
67	Tangerang	Jambe	5	5	Tetap
68	Tangerang	Cikupa	4	3	Turun 1

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	FSVA 2023	FSVA 2024	Perubahan Status Ketahanan Pangan
69	Tangerang	Panongan	3	2	Turun 1
70	Tangerang	Curug	4	4	Tetap
71	Tangerang	Kelapa Dua	4	4	Tetap
72	Tangerang	Legok	3	4	Naik 1
73	Tangerang	Pagedangan	3	2	Turun 1
74	Tangerang	Cisauk	2	2	Tetap
75	Tangerang	Pasar Kemis	4	4	Tetap
76	Tangerang	Sindang Jaya	4	5	Naik 1
77	Tangerang	Balaraja	5	5	Tetap
78	Tangerang	Jayanti	4	5	Naik 1
79	Tangerang	Sukamulya	3	5	Naik 2
80	Tangerang	Kresiek	5	5	Tetap
81	Tangerang	Gunung Kaler	5	6	Naik 1
82	Tangerang	Kronjo	5	6	Naik 1
83	Tangerang	Mekar Baru	5	5	Tetap
84	Tangerang	Mauk	5	5	Tetap
85	Tangerang	Kemiri	5	5	Tetap
86	Tangerang	Sukadiri	5	5	Tetap
87	Tangerang	Rajeg	5	5	Tetap
88	Tangerang	Sepatan	4	5	Naik 1
89	Tangerang	Sepatan Timur	4	3	Turun 1
90	Tangerang	Paku Haji	4	5	Naik 1
91	Tangerang	Teluknaga	3	4	Naik 1
92	Tangerang	Kosambi	4	4	Tetap
93	Serang	Cinangka	4	4	Tetap
94	Serang	Padarincang	4	5	Naik 1
95	Serang	Ciomas	1	3	Naik 2
96	Serang	Pabuaran	4	4	Tetap
97	Serang	Gunung Sari	3	3	Tetap
98	Serang	Baros	3	4	Naik 1
99	Serang	Petir	5	5	Tetap
100	Serang	Tunjung Teja	4	5	Naik 1
101	Serang	Cikeusal	5	6	Naik 1
102	Serang	Pamarayan	5	5	Tetap
103	Serang	Bandung	6	6	Tetap
104	Serang	Jawilan	4	6	Naik 2
105	Serang	Kopo	4	4	Tetap
106	Serang	Cikande	6	6	Tetap
107	Serang	Kibin	6	6	Tetap
108	Serang	Kragilan	6	6	Tetap
109	Serang	Waringinkurung	5	4	Turun 1
110	Serang	Mancak	4	3	Turun 1
111	Serang	Anyar	5	5	Tetap
112	Serang	Bojonegara	6	6	Tetap
113	Serang	Pulo Ampel	6	6	Tetap
114	Serang	Kramatwatu	6	6	Tetap
115	Serang	Ciruas	6	6	Tetap
116	Serang	Pontang	6	6	Tetap

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	FSVA 2023	FSVA 2024	Perubahan Status Ketahanan Pangan
117	Serang	Lebak Wangi	6	6	Tetap
118	Serang	Carenang	6	6	Tetap
119	Serang	Binuang	6	6	Tetap
120	Serang	Tirtayasa	6	6	Tetap
121	Serang	Tanara	6	6	Tetap
122	Kota Tangerang	Ciledug	6	6	Tetap
123	Kota Tangerang	Larangan	6	6	Tetap
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	6	6	Tetap
125	Kota Tangerang	Cipondoh	6	6	Tetap
126	Kota Tangerang	Pinang	6	6	Tetap
127	Kota Tangerang	Tangerang	6	6	Tetap
128	Kota Tangerang	Karawaci	6	6	Tetap
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	6	5	Turun 1
130	Kota Tangerang	Cibodas	6	6	Tetap
131	Kota Tangerang	Periuk	6	6	Tetap
132	Kota Tangerang	Batuceper	6	6	Tetap
133	Kota Tangerang	Neglasari	5	6	Naik 1
134	Kota Tangerang	Benda	6	6	Tetap
135	Kota Cilegon	Ciwandan	4	5	Naik 1
136	Kota Cilegon	Citangkil	5	5	Tetap
137	Kota Cilegon	Pulomerak	5	5	Tetap
138	Kota Cilegon	Purwakarta	6	6	Tetap
139	Kota Cilegon	Grogol	6	6	Tetap
140	Kota Cilegon	Cilegon	6	6	Tetap
141	Kota Cilegon	Jombang	6	6	Tetap
142	Kota Cilegon	Cibeber	5	6	Naik 1
143	Kota Serang	Curug	3	4	Naik 1
144	Kota Serang	Walantaka	4	4	Tetap
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	5	5	Tetap
146	Kota Serang	Serang	5	6	Naik 1
147	Kota Serang	Taktakan	4	4	Tetap
148	Kota Serang	Kasemen	3	4	Naik 1
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6	6	Tetap
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6	6	Tetap
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	5	6	Naik 1
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6	6	Tetap
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6	6	Tetap
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6	6	Tetap
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6	6	Tetap

Peningkatan status ketahanan pangan yang terdapat di 38 kecamatan secara umum disebabkan oleh penurunan angka kesakitan, penurunan persentase penduduk miskin, penurunan persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan > 65%, peningkatan akses ke air bersih, peningkatan pemerataan tenaga kesehatan, dan penurunan prevalensi balita *stunting*. Sedangkan penurunan status ketahanan pangan di 17 kecamatan secara umum dipengaruhi oleh penurunan akses ke air bersih, peningkatan angka kesakitan dan penurunan rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia > 15 tahun.

3.3 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan Provinsi Banten

Analisa ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat Provinsi Banten selain dapat memetakan kecamatan-kecamatan dengan tingkat kerentanan pangan juga dapat memberikan informasi kepada pemangku kebijakan terkait hal-hal penentu kerentanan pangan tersebut. Berdasarkan hasil analisis FSVA, terdapat 21 kecamatan yang termasuk pada kelompok rentan terhadap rawan pangan. Kecamatan-kecamatan yang masuk dalam prioritas 1-3 (21 kecamatan) perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyebab kerentanan pangan di wilayah tersebut adalah : i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih per kapita di wilayah kabupaten; ii) tingginya persentase rumah tangga tanpa akses air bersih di wilayah kabupaten; dan iii) tingginya angka kesakitan di wilayah kabupaten dan kota.

Tabel 3. 6. Nilai Rata-Rata Kecamatan Prioritas Rentan (1-3) dan Prioritas Tahan (4-6)

INDIKATOR	WILAYAH KABUPATEN		WILAYAH KOTA	
	PRIORITAS RENTAN (1-3)	PRIORITAS TAHAN (4-6)	PRIORITAS RENTAN (1-3)	PRIORITAS TAHAN (4-6)
Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan	1,90	0,91	-	-
Persentase Penduduk Miskin	13,43	10,35	0,00	6,84
Pengeluaran Pangan > 65%	40,71	30,97	0,00	10,83
Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	0,02	0,00	0,00	0,00
Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	55,40	35,78	0,00	13,09
Angka Kesakitan	16,80	14,20	0,00	7,76
Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Usia > 15 Tahun	7,73	7,87	0,00	10,37
Rasio Penduduk Per Tenaga Kesehatan	1,04	1,21	0,00	0,28
Prevalensi Balita <i>Stunting</i>	2,97	2,46	0,00	3,20

Rata-rata rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan di kecamatan-kecamatan rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) pada wilayah kabupaten adalah 1,90 yang artinya kebutuhan pangannya hampir 2 kali lipat dari kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi pangan. Oleh karena itu, kecamatan-kecamatan tersebut sangat tergantung pada Pasokan pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih di kecamatan-kecamatan rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) rata-rata sebesar 55,40% untuk wilayah kabupaten dan 0% untuk wilayah kota dikarenakan tidak ada wilayah rentan rawan pangan pada wilayah kota. Sedangkan di kecamatan-kecamatan tahan pangan (Prioritas 4-6) rata-rata persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih sebesar 35,78% untuk wilayah kabupaten dan 13,09% untuk wilayah kota. Ketersediaan air bersih menjadi tantangan yang masih dihadapi baik di wilayah rentan maupun tahan pangan. Oleh karena itu, perbaikan sarana dan prasarana akses air bersih harus terus dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota. Air bersih merupakan bagian dari persyaratan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif sebagaimana asupan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Rata-rata angka kesakitan di kecamatan-kecamatan rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) pada wilayah kabupaten adalah 16,80% dan 0% pada wilayah kota dikarenakan tidak ada daerah rentan rawan pangan pada wilayah kota. Sedangkan di kecamatan-kecamatan tahan pangan (Prioritas 4-6), rata-rata angka kesakitannya adalah 14,20% untuk wilayah Kabupaten dan 7,76% untuk wilayah kota. Pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan dimungkinkan menjadi penyebab semakin banyak orang yang mengeluh sakit sehingga peduli untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Peningkatan angka kesakitan bisa juga terjadi karena pertanyaan yang bersifat subjektif dari responden survey, sehingga bisa saja ditemukan kondisi dimana seseorang yang sebenarnya sakit namun saat ditanyakan tidak mengeluh sakit.

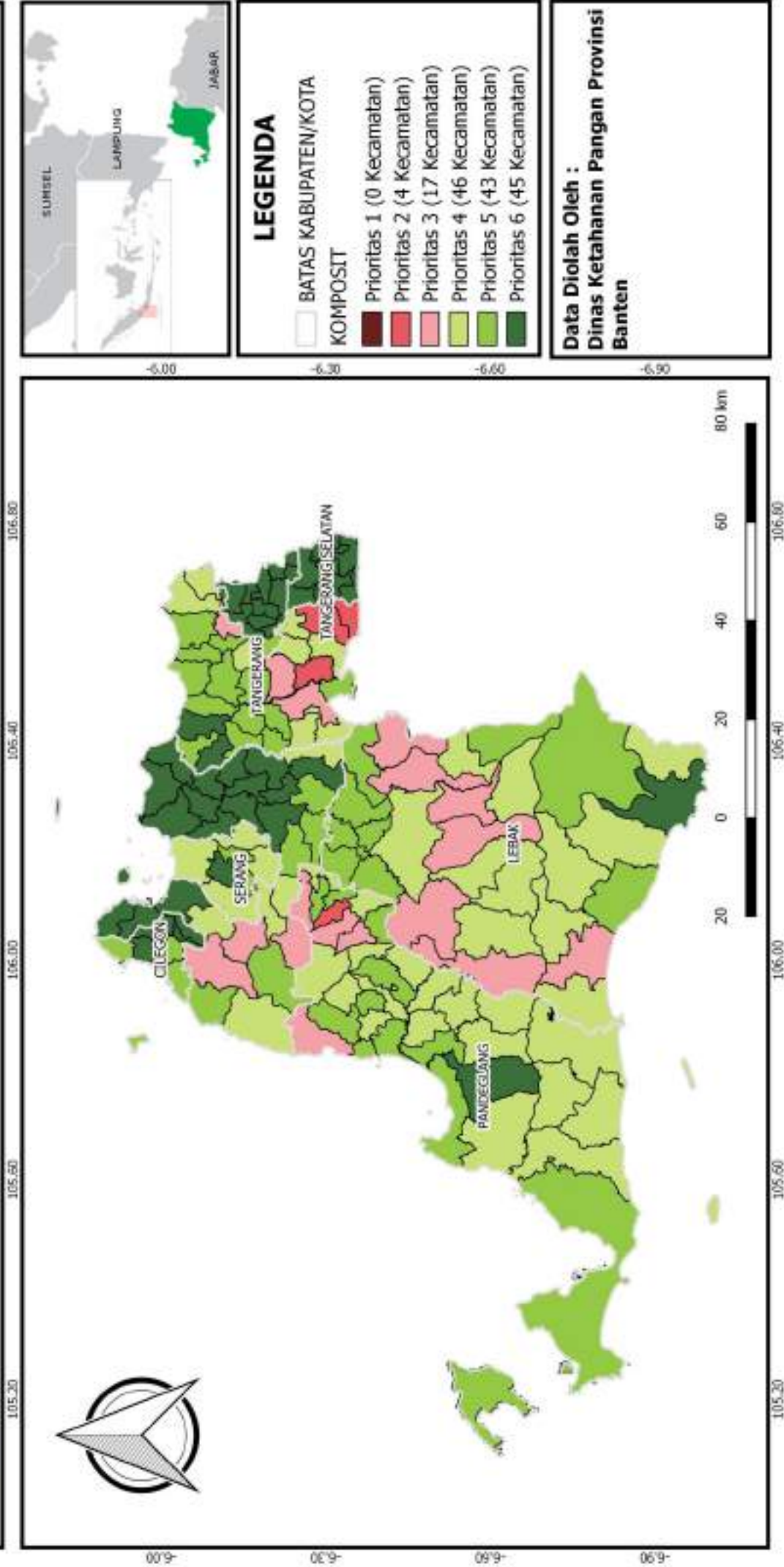
Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang sering muncul sebagai penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah rentan rawan pangan. Namun demikian penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di setiap kecamatan berbeda-beda, sehingga penanganannya diperlukan pendekatan spesifik wilayah sesuai dengan akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah tersebut.

Tabel 3.7 Perbandingan Rata-rata Kelompok Rentan dan Tahan Pangan 2023-2024

Wilayah Kabupaten								Wilayah Kota					
No	Indikator	Daerah Rentan		Ket	Daerah Tahan		Ket	Daerah Rentan		Ket	Daerah Tahan		Ket
		2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024	
1	Rasio Konsumsi Normatif terhadap Ketersediaan Bersih	1,67	1,90	Memburuk	1,01	0,91	Membaik	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	15,23	13,43	Membaik	10,55	10,35	Membaik	11,74		Membaik	6,32	6,84	Memburuk
3	Persentase Rumah Tangga Dengan Pengeluaran Pangan > 65% Terhadap Total Pengeluaran	48,66	40,71	Membaik	38,06	30,97	Membaik	39,40		Membaik	11,19	10,83	Membaik
4	Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	1,36	0,02	Membaik	0,05	0,00	Membaik	0,00		Membaik	0,00	0,00	Tetap
5	Persentase Rumh Tangga Tanpa Akses Air Bersih	56,52	55,40	Membaik	35,43	35,78	Memburuk	26,03		Membaik	13,59	13,09	Membaik
6	Angka Kesakitan	19,17	16,80	Membaik	15,78	14,20	Membaik	22,25		Membaik	10,22	7,76	Membaik
7	Penduduk per Tenaga Kesehatan per Tingkat Kepadatan	2,08	1,04	Membaik	2,17	1,21	Membaik	0,77		Membaik	0,16	0,28	Memburuk
8	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Usia >15 Tahun	7,78	7,73	Memburuk	8,06	7,87	Memburuk	7,40		Membaik	10,46	10,37	Membaik
9	Persentase Balita Stunting	7,25	2,97	Membaik	8,20	2,46	Membaik	16,65			5,99	3,20	Membaik



**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS - FSVA)
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**



BAB 4

KETERSEDIAAN PANGAN

Dalam penyusunan FSVA, aspek ketersediaan pangan diwakili oleh indikator rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan yang didekati dari aspek produksi dan cadangan pangan pemerintah daerah. Berdasarkan definisi tersebut, data impor atau perdagangan antar wilayah tidak digunakan karena terbatasnya ketersediaan data sampai dengan level kecamatan. Selain itu, wilayah yang mengandalkan penyediaan pangannya dari wilayah lain juga rentan terhadap gangguan/*shock* akibat perubahan harga, bencana alam maupun gangguan lain yang mempengaruhi distribusi bahan pangan, sehingga pendekatan produksi domestik dipandang masih relevan untuk mewakili indikator aspek ketersediaan pangan. Apabila data aliran pangan impor ke daerah atau perdagangan wilayah tersedia di masa depan, maka penggunaannya dapat menyempurnakan hasil analisis FSVA.

4.1 Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Pangan

Analisis indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan diwakili oleh kelompok bahan pangan karbohidrat yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sagu. Penggunaan sumber karbohidrat juga didasarkan pada fakta bahwa pangan sumber karbohidrat menyumbang 50% dari angka kecukupan konsumsi energi harian yang direkomendasikan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Sumber pangan lainnya tidak dianalisis karena keterbatasan data hingga level kecamatan.

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih pangan sereal per kapita per hari merupakan petunjuk kecukupan pangan pada suatu wilayah. Konsumsi normatif didefinisikan sebagai jumlah pangan sereal yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari sereal. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari sereal. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2.100 kkal (WNPG IX, 2018), dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari sereal dan umbi-umbian (menurut angka pola pangan harapan), maka seseorang harus mengonsumsi kurang lebih 300 gram sereal per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi dihitung dengan cara membagi konsumsi normatif per kapita per hari (300 g) terhadap rata-rata ketersediaan bersih sereal dan umbi-umbian utama per kapita per hari. Ketersediaan bersih sereal dan umbi-umbian utama merupakan produksi yang tersedia untuk pangan, yaitu produksi total dikurangi dengan penggunaan untuk pakan, bibit dan komponen tercecer, dan telah memperhitungkan konversi yang berlaku untuk masing-masing komoditas pangan. Angka konversi yang digunakan dalam penghitungan ketersediaan bersih menggunakan angka konversi dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2022. Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah (CPPD) juga ikut diperhitungkan dalam analisis untuk memberikan gambaran ketersediaan pangan yang lebih komprehensif di setiap wilayah. Ketersediaan bersih per kapita per hari dihitung dengan cara membagi ketersediaan bersih sereal dan umbi-umbian utama terhadap jumlah penduduk suatu wilayah lalu dikalikan 365 hari. Sebagai catatan, nilai kalori ubi kayu dan ubi jalar masing-masing 1/3 dari nilai kalori beras atau jagung, sehingga produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar masing-masing dibagi 3 untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen dengan sereal.

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif daripada penggunaan konsumsi aktual sehari-hari karena konsumsi aktual dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan pangan itu sendiri (misalnya : daya beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan penyerapan sereal, kebiasaan/budaya, dan lain-lain).

Hasil analisis rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan menunjukkan bahwa sebanyak 84 kecamatan (69,42%) mengalami surplus dan 37 kecamatan (30,58%) mengalami defisit. Kecamatan yang mengalami defisit ketersediaan pangan tertinggi terdapat di Kabupaten Tangerang (18,18%), Kabupaten Serang (5,79%), Kabupaten Pandeglang (4,13%), dan Kabupaten Lebak (2,48%). Defisit ketersediaan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi sereal dan umbi-umbian, dan ketidaksesuaian dan/atau berkurangnya ketersediaan lahan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri.

Kecamatan-kecamatan yang mengalami defisit pangan (Prioritas 1-3) merupakan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten dengan keterbatasan lahan pertanian dan ketersediaan pangannya bergantung pada perdagangan antar wilayah. Sebaran produksi yang tidak merata dan keterbatasan akses juga menjadi penyebab defisit pangan di wilayah kabupaten. Sebagian besar kecamatan yang mengalami defisit ketersediaan pangan secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan dan sebagian lainnya merupakan wilayah pesisir yang mata pencarian utama masyarakatnya merupakan nelayan. Adapun wilayah kota yang meliputi 34 kecamatan tidak dilakukan analisis dalam indikator rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan mengingat ketersediaan pangan di wilayah kota tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri melainkan berasal dari pasokan dan perdagangan antar wilayah.

Tabel 4. 1. Hasil Analisis Indikator Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Pangan

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	6
2	Pandeglang	Cimanggu	6
3	Pandeglang	Cibaliung	6
4	Pandeglang	Cibitung	6
5	Pandeglang	Cikeusik	6
6	Pandeglang	Cigeulis	6
7	Pandeglang	Panimbang	6
8	Pandeglang	Sobang	6
9	Pandeglang	Munjul	6
10	Pandeglang	Angsana	6
11	Pandeglang	Sindangresmi	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
12	Pandeglang	Picung	6
13	Pandeglang	Bojong	6
14	Pandeglang	Saketi	6
15	Pandeglang	Cisata	6
16	Pandeglang	Pagelaran	6
17	Pandeglang	Patia	6
18	Pandeglang	Sukaresmi	6
19	Pandeglang	Labuan	1
20	Pandeglang	Carita	6
21	Pandeglang	Jiput	6
22	Pandeglang	Cikedal	6
23	Pandeglang	Menes	5
24	Pandeglang	Pulosari	6
25	Pandeglang	Mandalawangi	6
26	Pandeglang	Cimanuk	6
27	Pandeglang	Cipeucang	6
28	Pandeglang	Banjar	5
29	Pandeglang	Kaduhejo	5
30	Pandeglang	Mekarjaya	6
31	Pandeglang	Pandeglang	1
32	Pandeglang	Majasari	1
33	Pandeglang	Cadasari	3
34	Pandeglang	Karangtanjung	3
35	Pandeglang	Koroncong	5
36	Lebak	Malingping	5
37	Lebak	Wanasalam	6
38	Lebak	Panggarangan	6
39	Lebak	Cihara	6
40	Lebak	Bayah	5
41	Lebak	Cilograng	5
42	Lebak	Cibeber	6
43	Lebak	Cijaku	6
44	Lebak	Cigemblong	6
45	Lebak	Banjarsari	5
46	Lebak	Cileles	6
47	Lebak	Gunung Kencana	6
48	Lebak	Bojongmanik	6
49	Lebak	Cirinten	6
50	Lebak	Leuwidamar	5
51	Lebak	Muncang	6
52	Lebak	Sobang	6
53	Lebak	Cipanas	5
54	Lebak	Lebakgedong	6
55	Lebak	Sajira	5
56	Lebak	Cimarga	5
57	Lebak	Cikurur	5
58	Lebak	Warunggunung	5
59	Lebak	Cibadak	3
60	Lebak	Rangkasbitung	1
61	Lebak	Kalanganyar	3
62	Lebak	Maja	5
63	Lebak	Curugbitung	6
64	Tangerang	Cisoka	2
65	Tangerang	Solear	1
66	Tangerang	Tigaraksa	1
67	Tangerang	Jambe	2
68	Tangerang	Cikupa	1

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
69	Tangerang	Panongan	1
70	Tangerang	Curug	1
71	Tangerang	Kelapa Dua	1
72	Tangerang	Legok	1
73	Tangerang	Pagedangan	1
74	Tangerang	Cisauk	1
75	Tangerang	Pasarkemis	1
76	Tangerang	Sindang Jaya	3
77	Tangerang	Balaraja	1
78	Tangerang	Jayanti	3
79	Tangerang	Sukamulya	2
80	Tangerang	Kresiek	5
81	Tangerang	Gunung Kaler	6
82	Tangerang	Kronjo	5
83	Tangerang	Mekar Baru	5
84	Tangerang	Mauk	5
85	Tangerang	Kemiri	5
86	Tangerang	Sukadiri	4
87	Tangerang	Rajeg	2
88	Tangerang	Sepatan	1
89	Tangerang	Sepatan Timur	1
90	Tangerang	Pakuhaji	3
91	Tangerang	Teluknaga	1
92	Tangerang	Kosambi	1
93	Serang	Cinangka	4
94	Serang	Padarincang	6
95	Serang	Ciomas	2
96	Serang	Pabuaran	4
97	Serang	Gunung Sari	2
98	Serang	Baros	4
99	Serang	Petir	4
100	Serang	Tunjung Teja	5
101	Serang	Cikeusal	5
102	Serang	Pamarayan	6
103	Serang	Bandung	5
104	Serang	Jawilan	5
105	Serang	Kopo	6
106	Serang	Cikande	3
107	Serang	Kibin	4
108	Serang	Kragilan	4
109	Serang	Waringinkurung	1
110	Serang	Mancak	5
111	Serang	Anyar	2
112	Serang	Bojonegara	2
113	Serang	Pulo Ampel	1
114	Serang	Kramatwatu	4
115	Serang	Ciruas	5
116	Serang	Pontang	6
117	Serang	Lebak Wangi	6
118	Serang	Carenang	6
119	Serang	Binuang	6
120	Serang	Tirtayasa	6
121	Serang	Tanara	6

4.2 Capaian Ketersediaan Pangan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di kehidupan manusia. Sektor tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) kedua, yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Peran sektor pertanian di Indonesia juga menjadi sangat krusial karena merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data BPS, produktivitas padi di Provinsi Banten pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 53,04 kuintal/ha di tahun 2022 menjadi 53,71 kuintal/ha di tahun 2023. Sedangkan luas panen padi di tahun 2023 sebesar 312,58 ribu hektar. Berdasarkan luas panen dan nilai produktivitas padi tersebut, diperoleh jumlah produksi padi di Provinsi Banten tahun 2023 sebesar 1,68 juta ton. Jumlah produksi ini turun 6,14 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, luas panen tanaman palawija pada tahun 2023 masing- masing sebesar 5,18 ribu hektar jagung, 2,57 ribu hektar kedelai, 2,17 ribu hektar kacang tanah, 0,21 ribu hektar kacang hijau, 1,94 ribu hektar ubi kayu, dan 0,85 ribu hektar ubi jalar (BPS, 2024).

Tabel 4. 2. Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Provinsi BantenTahun 2023
Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Produksi Tahun 2023 (Ton)			
	Padi (GKG)	Jagung*	Ubi Kayu*	Ubi Jalar*
Kabupaten Pandeglang	486.988	38.510	5.812	6.780
Kabupaten Lebak	401.429	8.220	5.480	3.452
Kabupaten Tangerang	286.244	844	1.300	971
Kabupaten Serang	434.245	3.802	13.324	3.555
Kota Tangerang	3.032	23	-	-
Kota Cilegon	8.576	176	25.585	523
Kota Serang	58.250	359	1.844	161
Kota Tangerang Selatan	-	-	181	19
Banten	1.678.766	51.935	53.525	15.461

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024
*Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2024

Wilayah penghasil padi terbesar pada 2023 adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Lebih dari 50 % produksi padi di Provinsi Banten disumbang oleh tiga kabupaten tersebut. Namun, penurunan produksi padi yang terjadi pada 2023 sebagian besar juga disumbang oleh Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Untuk komoditas jagung, Kabupaten Lebak tercatat sebagai penghasil jagung terbesar di Provinsi Banten pada tahun 2023. Sebagian besar produksi jagung di Provinsi Banten digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Produksi ubi kayu di Provinsi Banten pada tahun 2023 didominasi oleh Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dengan total produksi 53.525 ton. Pemanfaatan ubi kayu di Provinsi Banten lebih banyak digunakan untuk memenuhi konsumsi segar dan industri olahan makanan seperti keripik dan tepung.

Sebagai salah satu sumber karbohidrat alternatif, produksi ubi jalar lebih rendah dibandingkan dengan produksi padi, jagung, dan ubi kayu. Produksi ubi jalar Provinsi Banten pada tahun 2023 tercatat sebesar 15.461 ton, dengan produksi tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Pandeglang dengan total 6.780 ton. Produksi ubi jalar dimanfaatkan untuk konsumsi segar dan industri olahan makanan seperti keripik, makanan beku, pasta, tepung, saos, dan lain-lain.

Adapun ketersediaan beras yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah lebih digunakan untuk menangani kondisi rawan pangan yang diakibatkan bencana transien, penanganan pasca bencana, stabilisasi harga beras, dan keadaan darurat lainnya.

4.3 Tantangan Peningkatan Ketersediaan Pangan

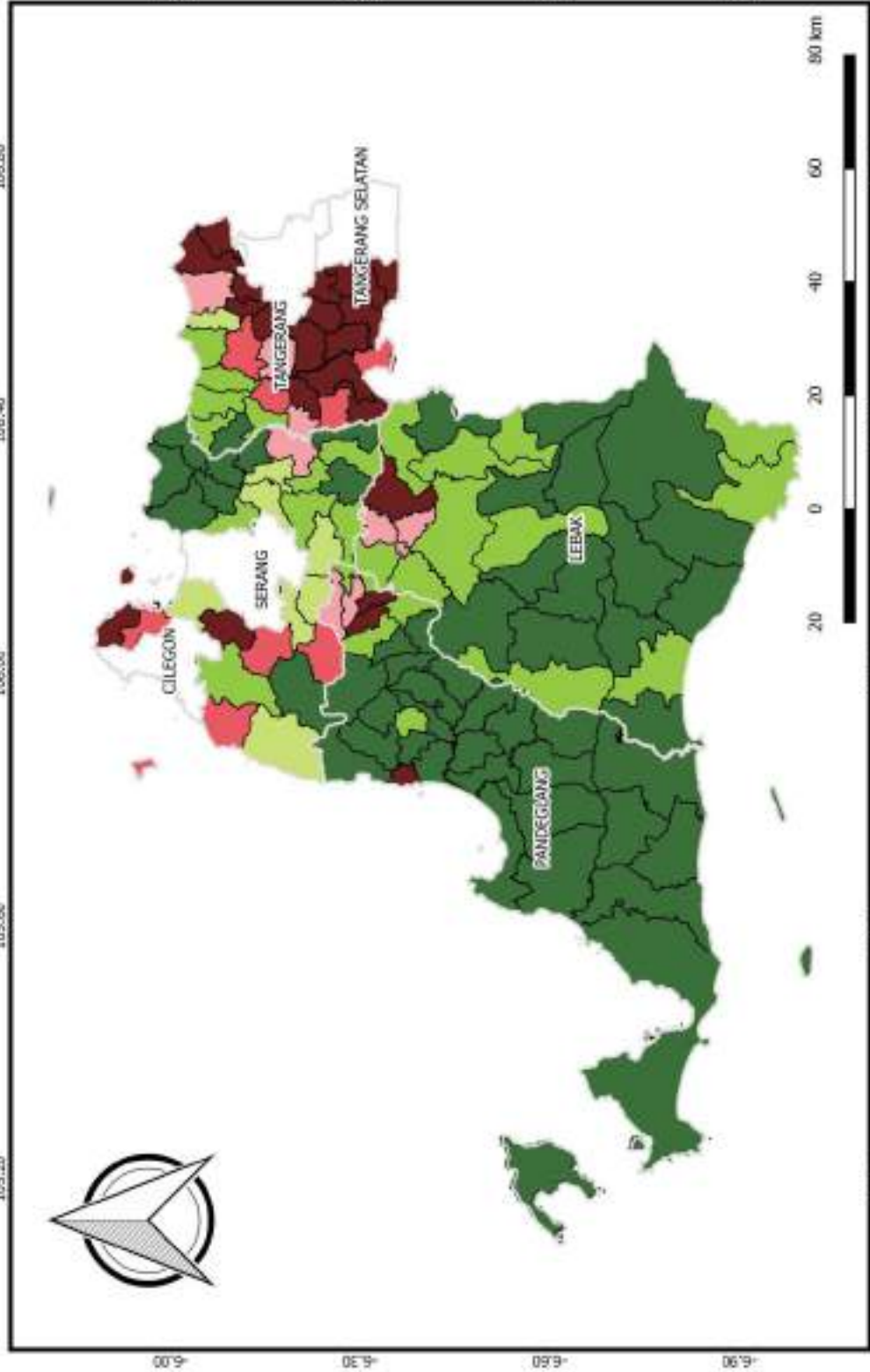
Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau dimasa mendatang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Hasil proyeksi penduduk yang dihitung menurut sensus penduduk 2020, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2023 mencapai 12,43 juta jiwa. Artinya, Provinsi Banten menjadi Provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Selain jumlahnya yang meningkat, pergeseran preferensi masyarakat terhadap makanan akan meningkatkan standar kualitas pangan dan permintaan jenis-jenis pangan tertentu. Pergeseran preferensi pangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan, pengetahuan, dan informasi terutama pada kelas pendapatan menengah di perkotaan sehingga lebih peduli pada kesehatan dan gaya hidup (*lifestyle*).

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten, menyebabkan permintaan akan ketersediaan pangan semakin tinggi. Selain itu, tingginya ketergantungan masyarakat Provinsi Banten terhadap padi-padian, penurunan luas baku lahan sawah, laju konversi lahan yang tinggi terutama di wilayah perkotaan menjadi penyebab peningkatan permintaan ketersediaan pangan terutama beras. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi nasi/beras. Terdapat 37 kecamatan dengan kategori defisit pangan hasil dalam analisa FSVA 2024. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan ketersediaan pangan.



**PETA RASIO KONSUMSI NORMATIF PER KAPITA
TERHADAP KETERSEDIAAN BERSIH PANGAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**



LEGENDA

□ BATAS KABUPATEN/KOTA
NCPR

- Prioritas 1 (21 Kecamatan)
- Prioritas 2 (8 Kecamatan)
- Prioritas 3 (8 Kecamatan)
- Prioritas 4 (8 Kecamatan)
- Prioritas 5 (26 Kecamatan)
- Prioritas 6 (50 Kecamatan)

Sumber Data :

- 1. Dinas Pertanian Provinsi Banten
- 2. BPS Provinsi Banten
- 3. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Data Diolah Oleh :
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

BAB 5

AKSES PANGAN

Dimensi kedua dari ketahanan pangan adalah akses terhadap pangan dan penghidupan. Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, cadangan, pembelian, barter, hadiah, sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut.

Salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan pangan adalah untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan terkait dengan permasalahan fisik, ekonomi, dan sosial. Di suatu daerah, pangan dapat saja tersedia dengan cukup, namun secara fisik tidak dapat diakses oleh suatu rumah tangga tertentu karena secara fisik terpencil sehingga akses fisik terbatas, secara ekonomi tidak memiliki akses karena daya beli atau pendapatan rendah, atau secara sosial pangan yang tersedia tidak sesuai dengan preferensinya. Aspek fisik yang membatasi akses pangan diantaranya terkait sarana dan prasarana distribusi, infrastruktur daerah, dan tingkat produksi pangan. Pada aspek ekonomi faktor yang terkait akses yaitu pendapatan, harga pangan dan non pangan serta kesempatan kerja. Sementara pada aspek sosial, faktor terkait akses adalah preferensi terhadap makanan, pendidikan dan pengetahuan tentang pangan dan gizi, serta konflik sosial/perang. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, aspek akses pangan bagi rumah tangga pada FSVA diperkirakan atau didekati (proksi) melalui tiga indikator, yaitu: (i) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; (ii) persentase rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; dan (iii) persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

5.1 Persentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerentanan pangan. Tanpa akses ekonomi yang memadai, rumah tangga dan individu cenderung memiliki pilihan yang terbatas untuk mendapatkan pangan yang beragam dan bergizi. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran pangan perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seseorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi kerawanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi *et al.* 2014, Riyadi *et al.* 2011; Ramli *et al.* 2009; Lubis 2010; Sofianti 2009; dan Misselhorn 2005).

Tabel 5. 1. Persentase Penduduk Hidup Dibawah Garis Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pandeglang	9,42	9,92	10,72	9,32	9,27
Kabupaten Lebak	8,30	9,24	10,29	8,91	8,68
Kabupaten Tangerang	5,14	6,23	7,12	6,92	6,93
Kabupaten Serang	4,08	4,94	5,49	4,96	4,85
Kota Tangerang	4,43	5,22	5,93	5,77	5,89
Kota Cilegon	3,03	3,69	4,24	3,64	3,98
Kota Serang	5,28	6,06	6,79	5,94	6,20
Kota Tangerang Selatan	1,68	2,29	2,57	2,50	2,57
Banten	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

Secara umum, pada lima tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung meningkat, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode 2020 dan 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan perubahan dari segala aspek. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung menurun. Hal ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Provinsi Banten mencapai 6,17 persen. Angka ini relatif sama dengan tahun sebelumnya sebesar 6,16 persen.

Berdasarkan analisa indikator persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dengan sumber data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kategori desil 1 yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK RI, pada wilayah kabupaten terdapat 11 kecamatan dengan tingkat kemiskinan > 20% dengan kategori buruk dan agak buruk (prioritas 2-3) yang tersebar di Kabupaten Pandeglang (4 kecamatan), Kabupaten Lebak (3 Kecamatan), Kabupaten Tangerang (3 Kecamatan), dan Kabupaten Serang (1 Kecamatan). Sedangkan untuk wilayah kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah dengan kategori sangat baik (<10%) terdapat di 56 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang (15 Kecamatan), Kabupaten Lebak (13 kecamatan), Kabupaten Tangerang (8 kecamatan), dan Kabupaten Serang (20 kecamatan). Sementara itu, pada wilayah kota secara umum kondisi kemiskinan relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada kecamatan yang memiliki persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan > 20% dengan kategori agak buruk, buruk, sangat buruk (prioritas 1-3). Seluruh kecamatan yang ada di wilayah kota memiliki persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan < 15% dengan kategori baik dan sangat baik (prioritas 5 dan 6). Dari 34 kecamatan di wilayah kota, 4 kecamatan masuk dalam kategori baik dan 30 kecamatan lainnya masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 5. 2. Hasil Analisis Indikator Persentase Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemsikinan

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	6
2	Pandeglang	Cimanggu	6
3	Pandeglang	Cibaliung	3
4	Pandeglang	Cibitung	3
5	Pandeglang	Cikeusik	4
6	Pandeglang	Cigeulis	4
7	Pandeglang	Panimbang	6
8	Pandeglang	Sobang	6
9	Pandeglang	Munjul	4
10	Pandeglang	Angsana	6
11	Pandeglang	Sindangresmi	4
12	Pandeglang	Picung	5
13	Pandeglang	Bojong	5
14	Pandeglang	Saketi	5
15	Pandeglang	Cisata	5
16	Pandeglang	Pagelaran	6
17	Pandeglang	Patia	6
18	Pandeglang	Sukaresmi	6
19	Pandeglang	Labuan	6
20	Pandeglang	Carita	6
21	Pandeglang	Jiput	5
22	Pandeglang	Cikedal	5
23	Pandeglang	Menes	6
24	Pandeglang	Pulosari	2
25	Pandeglang	Mandalawangi	4
26	Pandeglang	Cimanuk	4
27	Pandeglang	Cipeucang	4
28	Pandeglang	Banjar	6
29	Pandeglang	Kaduhejo	5
30	Pandeglang	Mekarjaya	3
31	Pandeglang	Pandeglang	6
32	Pandeglang	Majasari	6
33	Pandeglang	Cadasari	5
34	Pandeglang	Karangtanjung	6
35	Pandeglang	Koroncong	5
36	Lebak	Malingping	5
37	Lebak	Wanasalam	3
38	Lebak	Panggarangan	5
39	Lebak	Cihara	6
40	Lebak	Bayah	6
41	Lebak	Cilograng	5
42	Lebak	Cibeber	6
43	Lebak	Cijaku	4
44	Lebak	Cigemblong	3
45	Lebak	Banjarsari	4
46	Lebak	Cileles	4
47	Lebak	Gunung Kencana	4
48	Lebak	Bojongmanik	4
49	Lebak	Cirinten	5
50	Lebak	Leuwidamar	3
51	Lebak	Muncang	4
52	Lebak	Sobang	6
53	Lebak	Cipanas	6
54	Lebak	Lebakgedong	6
55	Lebak	Sajira	5

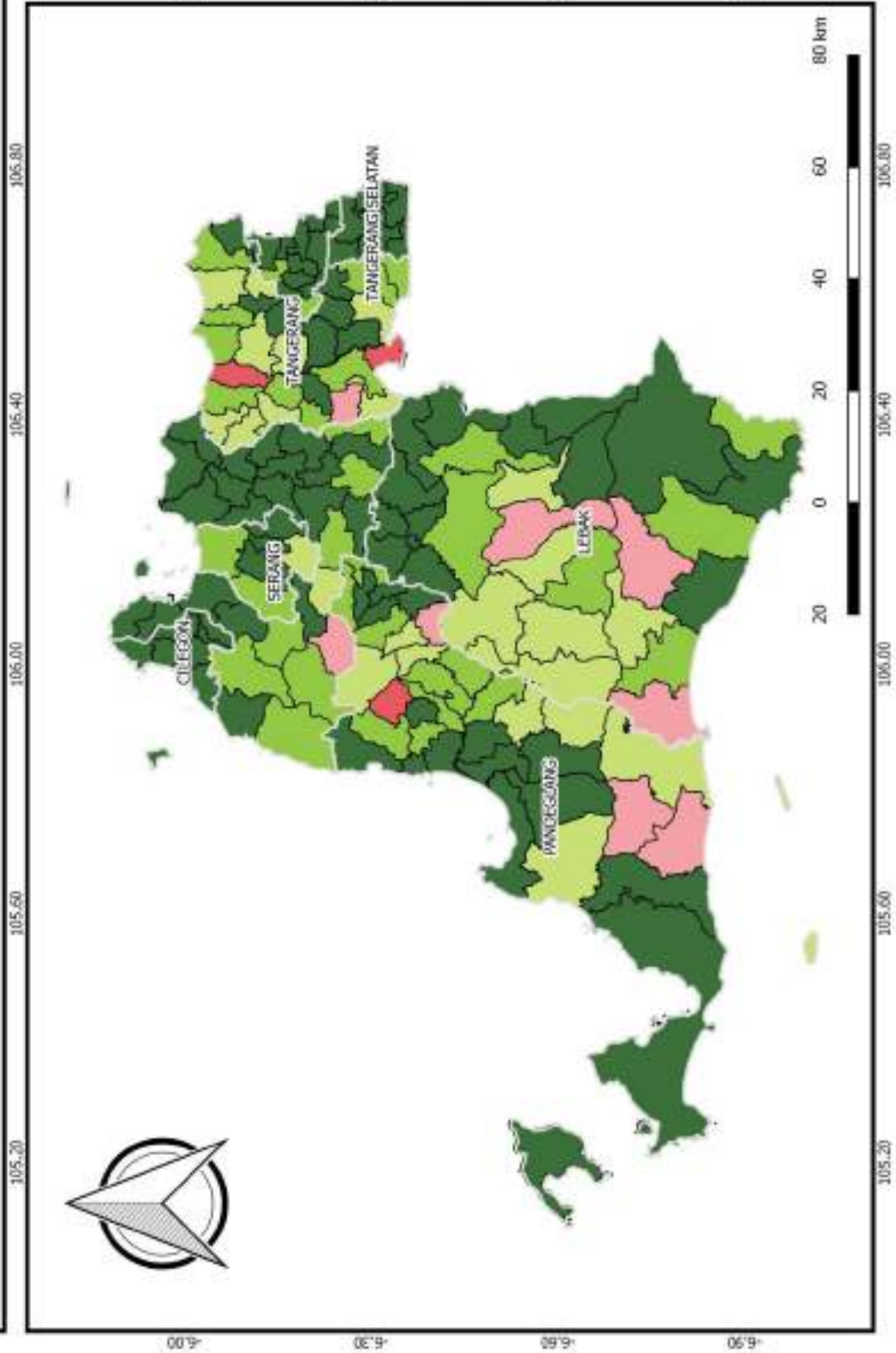
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
56	Lebak	Cimarga	5
57	Lebak	Cikulur	6
58	Lebak	Warunggunung	6
59	Lebak	Cibadak	6
60	Lebak	Rangkasbitung	6
61	Lebak	Kalanganyar	6
62	Lebak	Maja	6
63	Lebak	Curugbitung	6
64	Tangerang	Cisoka	3
65	Tangerang	Solear	4
66	Tangerang	Tigaraksa	5
67	Tangerang	Jambe	2
68	Tangerang	Cikupa	6
69	Tangerang	Panongan	6
70	Tangerang	Curug	6
71	Tangerang	Kelapa Dua	6
72	Tangerang	Legok	4
73	Tangerang	Pagedangan	5
74	Tangerang	Cisauk	5
75	Tangerang	Pasarkemis	6
76	Tangerang	Sindang Jaya	4
77	Tangerang	Balaraja	6
78	Tangerang	Jayanti	5
79	Tangerang	Sukamulya	5
80	Tangerang	Kresek	4
81	Tangerang	Gunung Kaler	4
82	Tangerang	Kronjo	5
83	Tangerang	Mekar Baru	4
84	Tangerang	Mauk	5
85	Tangerang	Kemiri	2
86	Tangerang	Sukadiri	5
87	Tangerang	Rajeg	4
88	Tangerang	Sepatan	6
89	Tangerang	Sepatan Timur	4
90	Tangerang	Paku Haji	4
91	Tangerang	Teluknaga	5
92	Tangerang	Kosambi	6
93	Serang	Cinangka	5
94	Serang	Padarincang	5
95	Serang	Ciomas	3
96	Serang	Pabuaran	6
97	Serang	Gunung Sari	5
98	Serang	Baros	4
99	Serang	Petir	5
100	Serang	Tunjung Teja	6
101	Serang	Cikeusal	6
102	Serang	Pamarayan	5
103	Serang	Bandung	6
104	Serang	Jawilan	6
105	Serang	Kopo	5
106	Serang	Cikande	6
107	Serang	Kibin	6
108	Serang	Kragilan	6
109	Serang	Waringinkurung	6
110	Serang	Mancak	5
111	Serang	Anyar	6
112	Serang	Bojonegara	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
113	Serang	Pulo Ampel	6
114	Serang	Kramatwatu	6
115	Serang	Ciruas	6
116	Serang	Pontang	6
117	Serang	Lebak Wangi	6
118	Serang	Carenang	6
119	Serang	Binuang	6
120	Serang	Tirtayasa	6
121	Serang	Tanara	6
122	Kota Tangerang	Ciledug	6
123	Kota Tangerang	Larangan	6
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
125	Kota Tangerang	Cipondoh	6
126	Kota Tangerang	Pinang	6
127	Kota Tangerang	Tangerang	6
128	Kota Tangerang	Karawaci	6
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	5
130	Kota Tangerang	Cibodas	6
131	Kota Tangerang	Periuk	6
132	Kota Tangerang	Batuceper	6
133	Kota Tangerang	Neglasari	5
134	Kota Tangerang	Benda	6
135	Kota Cilegon	Ciwandan	6
136	Kota Cilegon	Citangkil	6
137	Kota Cilegon	Pulomerak	6
138	Kota Cilegon	Purwakarta	6
139	Kota Cilegon	Grogol	6
140	Kota Cilegon	Cilegon	6
141	Kota Cilegon	Jombang	6
142	Kota Cilegon	Cibeber	6
143	Kota Serang	Curug	4
144	Kota Serang	Walantaka	6
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	6
146	Kota Serang	Serang	6
147	Kota Serang	Taktakan	5
148	Kota Serang	Kasemen	5
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin.



PETA PENDUDUK HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



LEGENDA

- BATAS KABUPATEN/KOTA
- POVERTY
- Prioritas 1 (0 Kecamatan)
- Prioritas 2 (3 Kecamatan)
- Prioritas 3 (8 Kecamatan)
- Prioritas 4 (24 Kecamatan)
- Prioritas 5 (35 Kecamatan)
- Prioritas 6 (85 Kecamatan)

Sumber Data :

- Kemendagri RI
- Bappeda Provinsi Banten
- BPS Provinsi Banten

Data Diolah Oleh :
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

5.2 Persentase Rumah Tangga Dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih Dari 65%

Persentase pengeluaran untuk pangan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga. Deaton dan Muellbauer (1980) menyatakan bahwa semakin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut sejalan dengan teori Engel yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Selain itu, Shan (1994) juga menyatakan bahwa pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk pendapatan permanen dan merupakan indikator yang penting untuk melihat malnutrisi kronis dalam jangka panjang. Pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan karena makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang (Suhardjo, 1996; Azwar, 2004). Selanjutnya, jika distribusi pengeluaran untuk pangan lebih besar dari 65% dari total pengeluaran maka distribusi pengeluaran rumah tangga tersebut dikategorikan buruk (BKP dan WFP 2010).

Proporsi pengeluaran makanan rata-rata penduduk Banten selama setahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dari 51,25 persen pada Maret 2022 menjadi 48,60 persen pada Maret 2023. Proporsi tertinggi pengeluaran untuk makanan selama kurun waktu 6 tahun yaitu pada tahun 2022. Bahkan, proporsi ini masih lebih tinggi dari rata-rata Indonesia yang mencapai 50,14 persen. Meningkatnya proporsi pengeluaran makanan tersebut, tidak dapat menjadi petunjuk bagi menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada saat bersamaan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Banten meningkat dari 1,62 juta rupiah menjadi 1,74 juta rupiah pada Maret 2023. Selain itu, angka pengeluaran per kapitanya juga masih di atas rata-rata Nasional yang hanya 1,45 juta rupiah. Terlebih lagi, pengeluaran per kapita riil sebulannya, pada periode yang sama juga mengalami peningkatan hingga menjadi 1,41 juta rupiah.

Sementara itu menurunnya proporsi pengeluaran makanan penduduk Banten, terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Hanya saja, proporsi pengeluaran makanan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yaitu mencapai 62 persen dari total pengeluaran. Dengan demikian, selisihnya hingga 16 persen poin dengan proporsi pengeluaran makanan di daerah perkotaan. Tingginya proporsi pengeluaran makanan di daerah perdesaan tersebut, sangat mudah untuk dipahami. Hal ini karena, setiap orang atau rumah tangga dengan pendapatan yang relatif rendah, biasanya akan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya, yang dalam hal ini adalah makanan. Rata-rata penduduk perdesaan sendiri memang memiliki pendapatan yang rendah, setidaknya bila dibandingkan dengan penduduk perkotaan.

Tabel 5. 3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan (Rupiah)		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
Kabupaten Pandeglang	565.914	379.862	945.776
Kabupaten Lebak	697.043	395.121	1.092.163
Kabupaten Tangerang	789.357	716.082	1.505.438
Kabupaten Serang	751.926	544.101	1.296.027
Kota Tangerang	1.187.989	1.624.327	2.812.316
Kota Cilegon	880.286	1.068.048	1.948.335
Kota Serang	781.625	660.380	1.442.005
Kota Tangerang Selatan	936.011	1.420.005	2.356.016
Banten	847.452	896.235	1.743.687
Perkotaan	889.286	1.030.413	1.919.699
Perdesaan	702.024	429.792	1.131.816

Sumber : BPS (SUSENAS), 2024

Berdasarkan analisis indikator persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran dengan data yang digunakan bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode *Small Area Estimation* (SAE), terdapat 22 kecamatan di wilayah kabupaten yang memiliki lebih dari 50% rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% (Prioritas 1-3). Wilayah tersebut meliputi 1 kecamatan dengan kategori sangat buruk terdapat di Kabupaten Lebak, 5 kecamatan dengan kategori buruk tersebar di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, , dan 16 kecamatan dengan kategori agak buruk tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Sementara pada wilayah kota, tidak ada kecamatan yang memiliki lebih dari 50% rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65%.

Tabel 5. 4. Hasil Analisis Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran

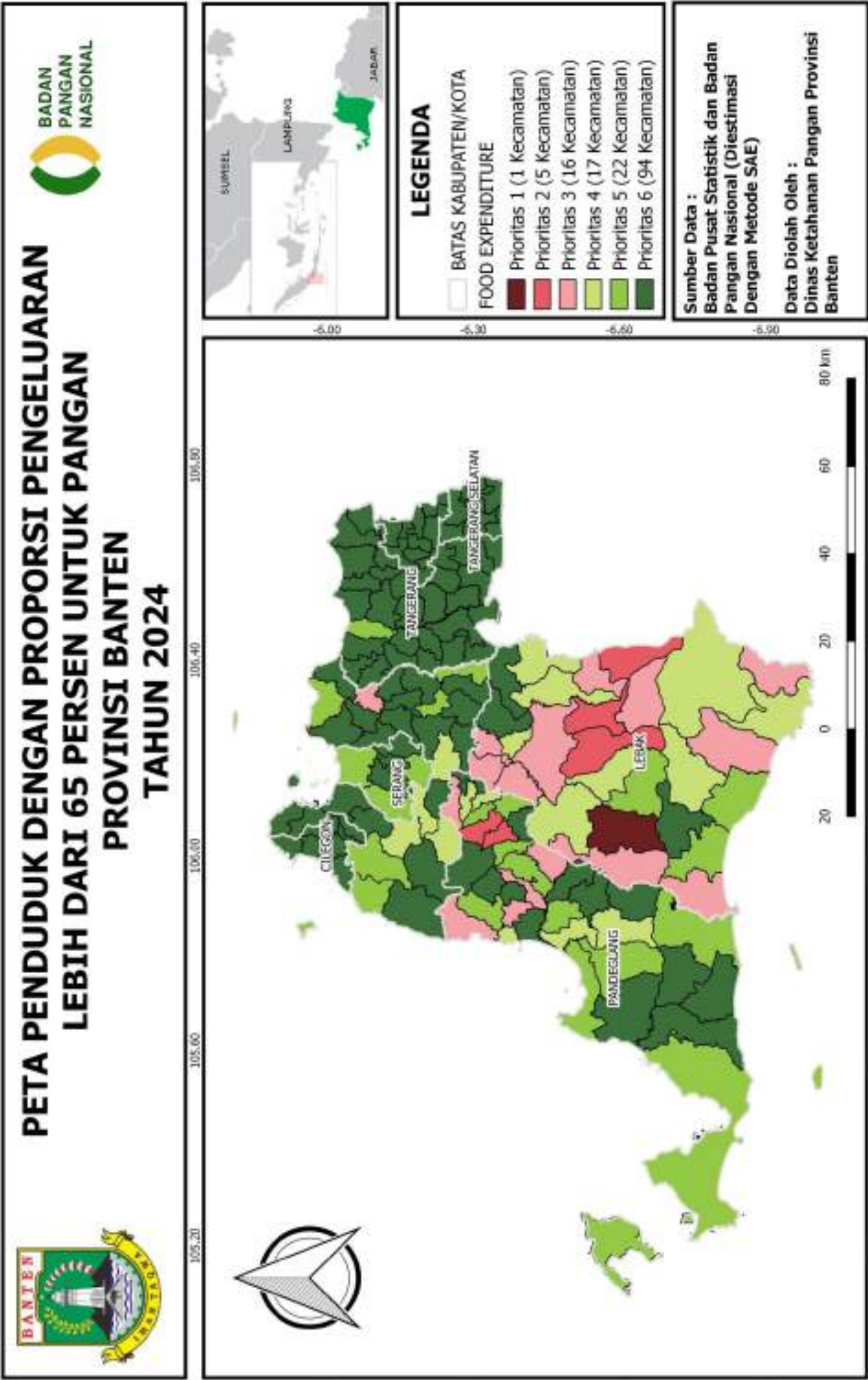
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	5
2	Pandeglang	Cimanggu	6
3	Pandeglang	Cibaliung	6
4	Pandeglang	Cibitung	6
5	Pandeglang	Cikeusik	5
6	Pandeglang	Cigeulis	6
7	Pandeglang	Panimbang	5
8	Pandeglang	Sobang	5
9	Pandeglang	Munjul	6
10	Pandeglang	Angsana	4
11	Pandeglang	Sindangresmi	6
12	Pandeglang	Picung	6
13	Pandeglang	Bojong	3
14	Pandeglang	Saketi	5
15	Pandeglang	Cisata	3
16	Pandeglang	Pagelaran	6
17	Pandeglang	Patia	5
18	Pandeglang	Sukaresmi	4

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
19	Pandeglang	Labuan	4
20	Pandeglang	Carita	3
21	Pandeglang	Jiput	5
22	Pandeglang	Cikedal	3
23	Pandeglang	Menes	6
24	Pandeglang	Pulosari	6
25	Pandeglang	Mandalawangi	6
26	Pandeglang	Cimanuk	2
27	Pandeglang	Cipeucang	5
28	Pandeglang	Banjar	5
29	Pandeglang	Kaduhejo	2
30	Pandeglang	Mekarjaya	6
31	Pandeglang	Pandeglang	4
32	Pandeglang	Majasari	5
33	Pandeglang	Cadasari	3
34	Pandeglang	Karangtanjung	4
35	Pandeglang	Koroncong	6
36	Lebak	Malingping	5
37	Lebak	Wanasalam	3
38	Lebak	Panggarangan	3
39	Lebak	Cihara	5
40	Lebak	Bayah	4
41	Lebak	Cilograng	3
42	Lebak	Cibeber	4
43	Lebak	Cijaku	6
44	Lebak	Cigemblong	4
45	Lebak	Banjarsari	3
46	Lebak	Cileles	4
47	Lebak	Gunung Kencana	1
48	Lebak	Bojongmanik	4
49	Lebak	Cirinten	5
50	Lebak	Leuwidamar	2
51	Lebak	Muncang	2
52	Lebak	Sobang	3
53	Lebak	Cipanas	3
54	Lebak	Lebakgedong	2
55	Lebak	Sajira	4
56	Lebak	Cimarga	3
57	Lebak	Cikurur	3
58	Lebak	Warunggunung	3
59	Lebak	Cibadak	3
60	Lebak	Rangkasbitung	6
61	Lebak	Kalanganyar	4
62	Lebak	Maja	6
63	Lebak	Curugbitung	4
64	Tangerang	Cisoka	6
65	Tangerang	Solear	6
66	Tangerang	Tigaraksa	6
67	Tangerang	Jambe	6
68	Tangerang	Cikupa	6
69	Tangerang	Panongan	6
70	Tangerang	Curug	6
71	Tangerang	Kelapa Dua	6
72	Tangerang	Legok	6
73	Tangerang	Pagedangan	6
74	Tangerang	Cisauk	6
75	Tangerang	Pasarkemis	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
76	Tangerang	Sindang Jaya	6
77	Tangerang	Balaraja	6
78	Tangerang	Jayanti	6
79	Tangerang	Sukamulya	6
80	Tangerang	Kresek	6
81	Tangerang	Gunung Kaler	6
82	Tangerang	Kronjo	6
83	Tangerang	Mekar Baru	6
84	Tangerang	Mauk	6
85	Tangerang	Kemiri	5
86	Tangerang	Sukadiri	6
87	Tangerang	Rajeg	6
88	Tangerang	Sepatan	6
89	Tangerang	Sepatan Timur	6
90	Tangerang	Paku haji	6
91	Tangerang	Teluknaga	6
92	Tangerang	Kosambi	6
93	Serang	Cinangka	6
94	Serang	Padarincang	6
95	Serang	Ciomas	4
96	Serang	Pabuaran	4
97	Serang	Gunung Sari	4
98	Serang	Baros	6
99	Serang	Petir	4
100	Serang	Tunjung Teja	6
101	Serang	Cikeusal	6
102	Serang	Pamarayan	6
103	Serang	Bandung	5
104	Serang	Jawilan	6
105	Serang	Kopo	5
106	Serang	Cikande	6
107	Serang	Kibin	6
108	Serang	Kragilan	6
109	Serang	Waringinkurung	6
110	Serang	Mancak	5
111	Serang	Anyar	5
112	Serang	Bojonegara	6
113	Serang	Pulo Ampel	6
114	Serang	Kramatwatu	6
115	Serang	Ciruas	6
116	Serang	Pontang	6
117	Serang	Lebak Wangi	6
118	Serang	Carenang	3
119	Serang	Binuang	6
120	Serang	Tirtayasa	5
121	Serang	Tanara	6
122	Kota Tangerang	Ciledug	6
123	Kota Tangerang	Larangan	6
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
125	Kota Tangerang	Cipondoh	6
126	Kota Tangerang	Pinang	6
127	Kota Tangerang	Tangerang	6
128	Kota Tangerang	Karawaci	6
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	6
130	Kota Tangerang	Cibodas	6
131	Kota Tangerang	Periuk	6
132	Kota Tangerang	Batuceper	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
133	Kota Tangerang	Neglasari	6
134	Kota Tangerang	Benda	6
135	Kota Cilegon	Ciwandan	6
136	Kota Cilegon	Citangkil	6
137	Kota Cilegon	Pulomerak	6
138	Kota Cilegon	Purwakarta	6
139	Kota Cilegon	Grogol	6
140	Kota Cilegon	Cilegon	6
141	Kota Cilegon	Jombang	6
142	Kota Cilegon	Cibeber	6
143	Kota Serang	Curug	5
144	Kota Serang	Walantaka	6
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	6
146	Kota Serang	Serang	6
147	Kota Serang	Taktakan	5
148	Kota Serang	Kasemen	5
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

Tingginya persentase rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% dapat mengindikasikan rata-rata pendapatan rumah tangga yang rendah atau harga pangan yang relatif tinggi, sehingga secara umum menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut yang masih rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha produktif, meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, dan meningkatkan investasi melalui kemitraan dengan dunia usaha untuk memajukan perekonomian daerah dan pendapatan rumah tangga/ masyarakat di daerah.



5.3 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik

Listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi pada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses terhadap pekerjaan, karena ketersediaan tenaga listrik dapat mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013).

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik listrik di wilayah Provinsi Banten sebanyak 3,99 juta pelanggan dengan daya tersambung sebesar 13,47 juta kVA dan energi listrik yang terjual sebesar 26,97 juta MWh. Sementara itu, gas kota yang terjual selama tahun 2023 di Provinsi Banten mencapai 1,609 miliar. Beberapa wilayah dengan rumah tangga bukan pengguna listrik meliputi Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk wilayah Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan sudah 100% menggunakan listrik.

Tabel 5. 5. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Banten Tahun 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Listrik PLN State ElectricitCompany	Listrik Non-PLN Own ElectricityCompany	Bukan Listrik Non Electricity	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
Pandeglang	99,82	0,18	0,00	100,00
Lebak	98,45	0,10	1,45	100,00
Tangerang	99,76	0,02	0,22	100,00
Serang	99,95	0,05	0,00	100,00
Kota/Municipality				
Tangerang	99,90	0,10	0,00	100,00
Cilegon	98,91	1,09	0,00	100,00
Serang	100,00	0,00	0,00	100,00
Tangerang Selatan	99,87	0,13	0,00	100,00
Banten	99,68	0,11	0,21	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan analisis indikator persentase rumah tangga tanpa akses listrik dengan data yang digunakan bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode *Small Area Estimation* (SAE), seluruh kecamatan di wilayah Provinsi Banten (100%) masuk dalam kategori sangat baik (Prioritas 6).

Tabel 5. 6. Hasil Analis Indikator Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik

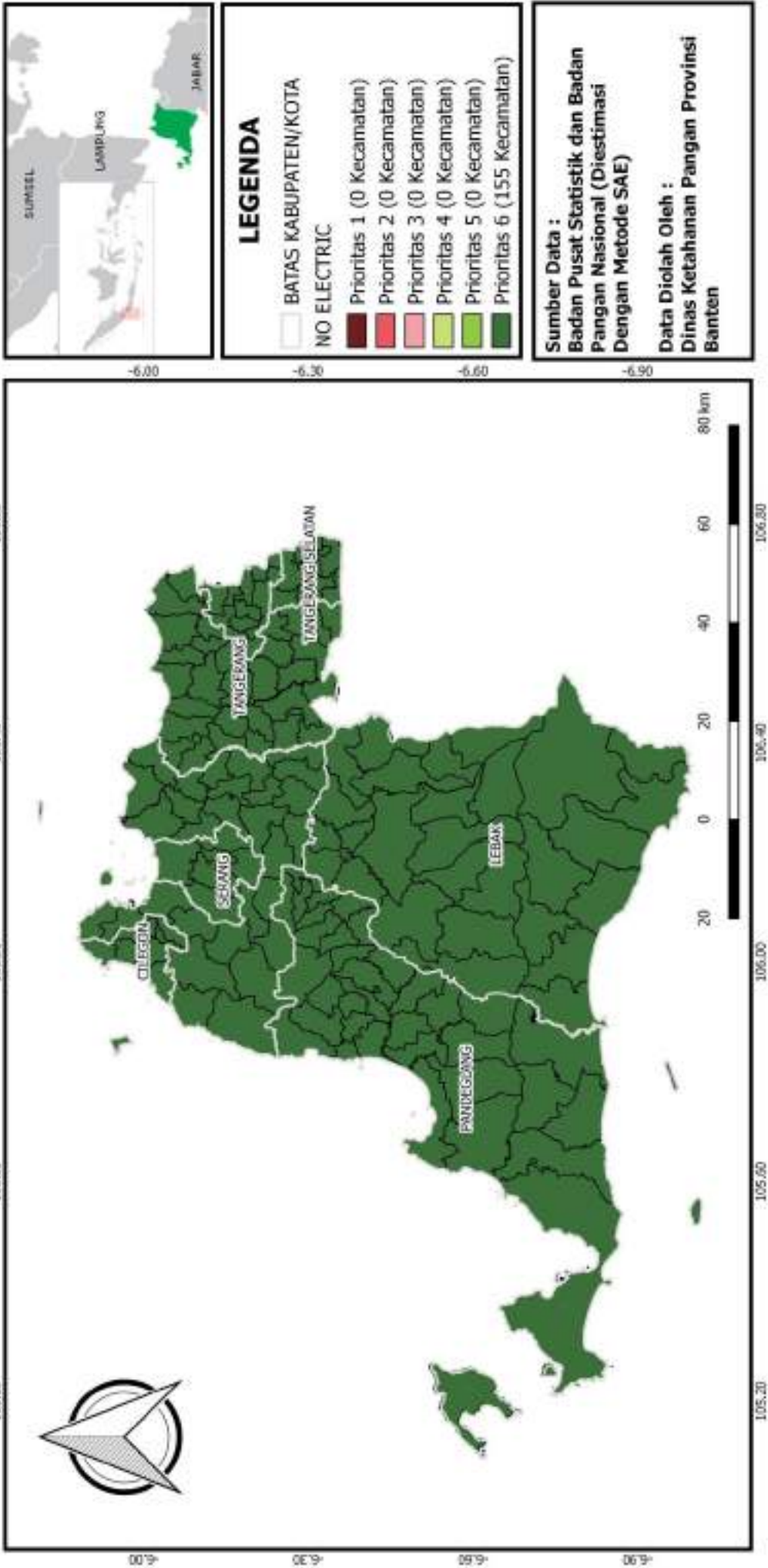
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	6
2	Pandeglang	Cimanggu	6
3	Pandeglang	Cibaliung	6
4	Pandeglang	Cibitung	6
5	Pandeglang	Cikeusik	6
6	Pandeglang	Cigeulis	6
7	Pandeglang	Panimbang	6
8	Pandeglang	Sobang	6
9	Pandeglang	Munjul	6
10	Pandeglang	Angsana	6
11	Pandeglang	Sindangresmi	6
12	Pandeglang	Picung	6
13	Pandeglang	Bojong	6
14	Pandeglang	Saketi	6
15	Pandeglang	Cisata	6
16	Pandeglang	Pagelaran	6
17	Pandeglang	Patia	6
18	Pandeglang	Sukaresmi	6
19	Pandeglang	Labuan	6
20	Pandeglang	Carita	6
21	Pandeglang	Jiput	6
22	Pandeglang	Cikedal	6
23	Pandeglang	Menes	6
24	Pandeglang	Pulosari	6
25	Pandeglang	Mandalawangi	6
26	Pandeglang	Cimanuk	6
27	Pandeglang	Cipeucang	6
28	Pandeglang	Banjar	6
29	Pandeglang	Kaduhejo	6
30	Pandeglang	Mekarjaya	6
31	Pandeglang	Pandeglang	6
32	Pandeglang	Majasari	6
33	Pandeglang	Cadasari	6
34	Pandeglang	Karangtanjung	6
35	Pandeglang	Koroncong	6
36	Lebak	Malingping	6
37	Lebak	Wanasalam	6
38	Lebak	Panggarangan	6
39	Lebak	Cihara	6
40	Lebak	Bayah	6
41	Lebak	Cilograng	6
42	Lebak	Cibeber	6
43	Lebak	Cijaku	6
44	Lebak	Cigemblong	6
45	Lebak	Banjarsari	6
46	Lebak	Cileles	6
47	Lebak	Gunung Kencana	6
48	Lebak	Bojongmanik	6
49	Lebak	Cirinten	6
50	Lebak	Leuwidamar	6
51	Lebak	Muncang	6
52	Lebak	Sobang	6
53	Lebak	Cipanas	6
54	Lebak	Lebakgedong	6
55	Lebak	Sajira	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
56	Lebak	Cimarga	6
57	Lebak	Cikulur	6
58	Lebak	Warunggunung	6
59	Lebak	Cibadak	6
60	Lebak	Rangkasbitung	6
61	Lebak	Kalanganyar	6
62	Lebak	Maja	6
63	Lebak	Curugbitung	6
64	Tangerang	Cisoka	6
65	Tangerang	Solear	6
66	Tangerang	Tigaraksa	6
67	Tangerang	Jambe	6
68	Tangerang	Cikupa	6
69	Tangerang	Panongan	6
70	Tangerang	Curug	6
71	Tangerang	Kelapa Dua	6
72	Tangerang	Legok	6
73	Tangerang	Pagedangan	6
74	Tangerang	Cisauk	6
75	Tangerang	Pasarkemis	6
76	Tangerang	Sindang Jaya	6
77	Tangerang	Balaraja	6
78	Tangerang	Jayanti	6
79	Tangerang	Sukamulya	6
80	Tangerang	Kresek	6
81	Tangerang	Gunung Kaler	6
82	Tangerang	Kronjo	6
83	Tangerang	Mekar Baru	6
84	Tangerang	Mauk	6
85	Tangerang	Kemiri	6
86	Tangerang	Sukadiri	6
87	Tangerang	Rajeg	6
88	Tangerang	Sepatan	6
89	Tangerang	Sepatan Timur	6
90	Tangerang	Paku haji	6
91	Tangerang	Teluknaga	6
92	Tangerang	Kosambi	6
93	Serang	Cinangka	6
94	Serang	Padarincang	6
95	Serang	Ciomas	6
96	Serang	Pabuaran	6
97	Serang	Gunung Sari	6
98	Serang	Baros	6
99	Serang	Petir	6
100	Serang	Tunjung Teja	6
101	Serang	Cikeusal	6
102	Serang	Pamarayan	6
103	Serang	Bandung	6
104	Serang	Jawilan	6
105	Serang	Kopo	6
106	Serang	Cikande	6
107	Serang	Kibin	6
108	Serang	Kragilan	6
109	Serang	Waringinkurung	6
110	Serang	Mancak	6
111	Serang	Anyar	6
112	Serang	Bojonegara	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
113	Serang	Pulo Ampel	6
114	Serang	Kramatwatu	6
115	Serang	Ciruas	6
116	Serang	Pontang	6
117	Serang	Lebak Wangi	6
118	Serang	Carenang	6
119	Serang	Binuang	6
120	Serang	Tirtayasa	6
121	Serang	Tanara	6
122	Kota Tangerang	Ciledug	6
123	Kota Tangerang	Larangan	6
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
125	Kota Tangerang	Cipondoh	6
126	Kota Tangerang	Pinang	6
127	Kota Tangerang	Tangerang	6
128	Kota Tangerang	Karawaci	6
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	6
130	Kota Tangerang	Cibodas	6
131	Kota Tangerang	Periuk	6
132	Kota Tangerang	Batuceper	6
133	Kota Tangerang	Neglasari	6
134	Kota Tangerang	Benda	6
135	Kota Cilegon	Ciwandan	6
136	Kota Cilegon	Citangkil	6
137	Kota Cilegon	Pulomerak	6
138	Kota Cilegon	Purwakarta	6
139	Kota Cilegon	Grogol	6
140	Kota Cilegon	Cilegon	6
141	Kota Cilegon	Jombang	6
142	Kota Cilegon	Cibeber	6
143	Kota Serang	Curug	6
144	Kota Serang	Walantaka	6
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	6
146	Kota Serang	Serang	6
147	Kota Serang	Taktakan	6
148	Kota Serang	Kasemen	6
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6



PETA RUMAH TANGGA TANPA AKSES LISTRIK PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



5.4 Tantangan Peningkatan Akses Pangan

Salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap akses pangan adalah harga pangan. Oleh karena itu peningkatan harga pangan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses terhadap pangan dan daya beli masyarakat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan harga pangan diantaranya adalah biaya input yang tinggi dan kondisi iklim yang semakin tidak stabil. Pada sisi *supply*, aspek akses pangan memiliki hubungan yang kuat dengan rantai pasokan makanan. Salah satunya terkait dengan rantai pasok, dimana setiap komoditas pertanian memiliki karakteristik rantai pasoknya masing-masing (Rozaki, 2021). Sementara itu pada sisi *demand*, akses ekonomi dan fisik rumah tangga atas pangan masih menyesuaikan pasca pandemi karena perekonomian masih belum pulih maksimal.

Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam peningkatan akses pangan ditunjukkan dengan peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain:

1. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan pada umumnya adalah petani dan nelayan.
2. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah infrastruktur distribusi, sarana dan prasarana pasca panen, pemasaran keluar daerah, distribusi antar daerah, isolasi daerah, sistem informasi pasar, keterbatasan lembaga pemasaran, adanya pungutan resmi/tak resmi, penimbunan komoditas pangan oleh spekulan dan adanya penurunan akses pangan.
3. Penjaminan stabilitas harga pangan. Hal ini penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang tahun sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen, harga pangan dunia semakin tidak menentu dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

BAB 6

PEMANFAATAN PANGAN

Pemanfaatan pangan umumnya dipahami sebagai cara tubuh manusia untuk memanfaatkan berbagai komponen gizi yang diperoleh dari makanan, yang pada akhirnya menentukan status gizi individu. Asupan gizi beragam seimbang sesuai kecukupan kebutuhan tubuh untuk aktif dan produktif diperoleh dari pola makan yang baik, penyiapan makanan yang baik, keragaman diet/makanan, distribusi makanan antar anggota keluarga dalam rumah tangga, ketersediaan air bersih, tingkat kebersihan dan kesehatan tubuh, dan lain-lain.

Hasil dari interaksi antara makanan yang dikonsumsi, metabolisme zat gizi makanan oleh tubuh dan lingkungan hidup di sekitarnya menentukan gambaran status gizi seseorang. Status gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, ketahanan/kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Masalah gizi, terutama pada ibu/wanita saat ini, dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Dalam jangka panjang kekurangan gizi dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan.

Terpenuhinya kebutuhan gizi akan menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu. Aspek pemanfaatan pangan pada FSVA didekati dari lima indikator, yaitu: (i) rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun; (ii) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; (iii) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; (iv) persentase balita *stunting*; dan (v) angka kesakitan.

6.1 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia Di Atas 15 Tahun

Studi di berbagai Negara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya (Abuya *et al*, 2012). Glewwe (2009) mengidentifikasi 3 kemungkinan mekanisme hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi serta kesehatan, yaitu : (1) pendidikan formal secara langsung akan mentransfer pengetahuan terkait kesehatan kepada calon ibu; (2) kemampuan membaca dan berhitung yang diperoleh perempuan di sekolah akan meningkatkan kemampuan mereka mengenali penyakit dan mencari pengobatan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain itu, kemampuan membaca yang baik akan memudahkan mereka mengikuti instruksi medis untuk penanganan kesehatan dan menerapkannya (Abuya *et al*, 2012); dan (3) lamanya sekolah perempuan meningkatkan penerimaan mereka terhadap pengobatan modern. Perempuan yang bersekolah juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menikah dengan pria yang memiliki pendidikan dan gaji tinggi maupun tinggal di lingkungan yang lebih baik sehingga mempengaruhi status kesehatan anak-anak mereka (Abuya *et al*, 2012).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan melihat durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Semakin lama durasi sekolah maka tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu diasumsikan semakin baik. Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal ibu berhubungan positif dengan perbaikan dalam pola konsumsi pangan keluarga dan pola pemberian makanan pada bayi dan anak.

Berdasarkan hasil analisis indikator rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun, rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kota Tangerang Selatan yaitu 11,23 tahun, diikuti oleh Kota Tangerang (10,72 tahun), dan Kota Cilegon (10,29 tahun). Sedangkan rata-rata lama sekolah terpendek terdapat di Kabupaten Lebak yaitu 7,08 tahun, diikuti Kabupaten Pandeglang (7,28 tahun) dan Kabupaten Serang (8,03 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun yang berada di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Secara umum, terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah perempuan yang berusia di atas 15 tahun di bawah rata-rata provinsi sebesar 8,4 tahun. Rata-rata Provinsi Banten sebesar 8,4 tahun masih belum mencapai target pemerintah yang mencanangkan wajib belajar selama 12 tahun yang terdiri dari pendidikan sekolah dasar selama 6 (enam) tahun dan pendidikan sekolah menengah selama 6 (enam) tahun.

Tabel 6. 1. Hasil Analisis Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia Di Atas 15 Tahun

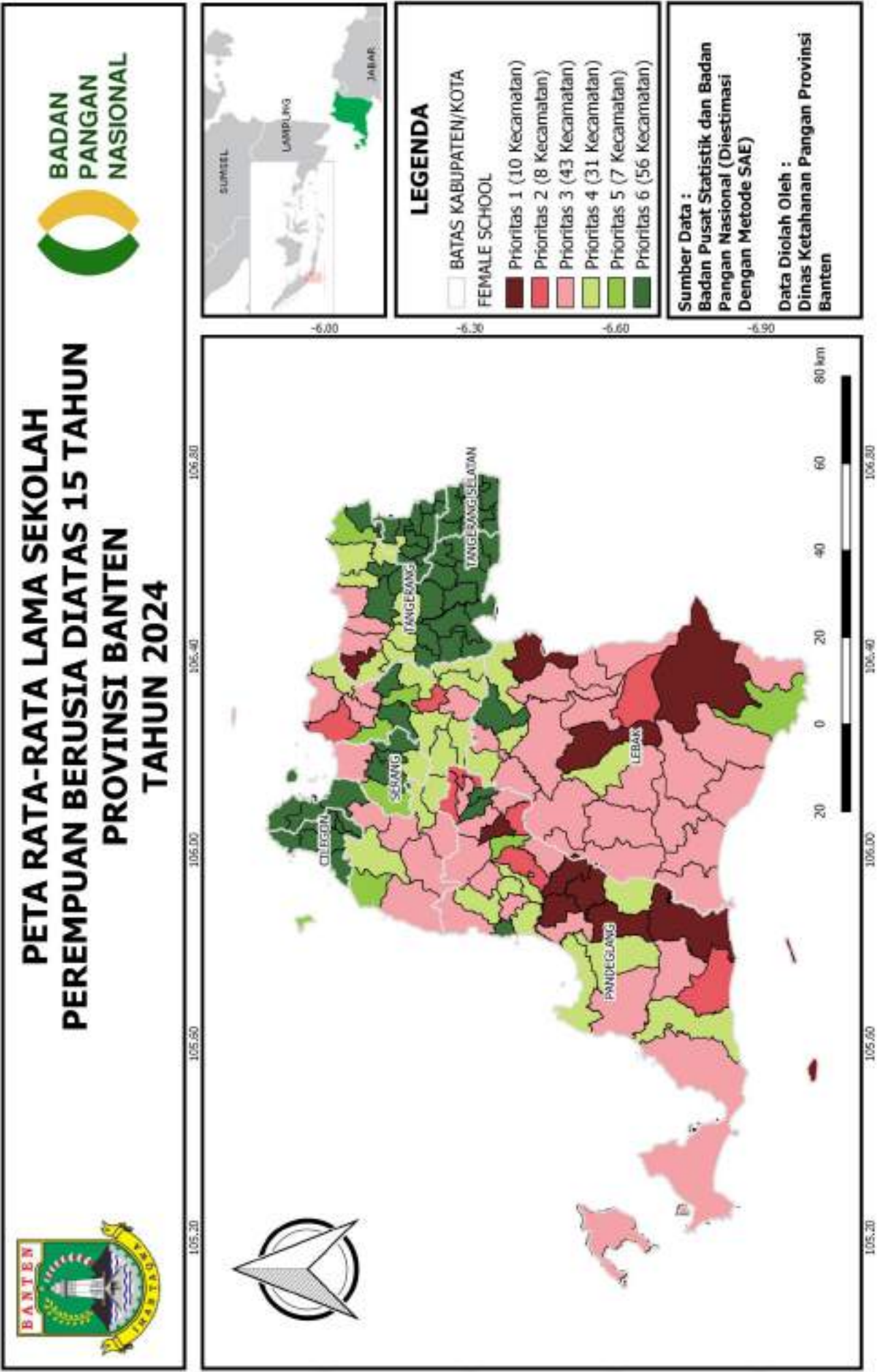
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	3
2	Pandeglang	Cimanggu	4
3	Pandeglang	Cibaliung	3
4	Pandeglang	Cibitung	2
5	Pandeglang	Cikeusik	1
6	Pandeglang	Cigeulis	3
7	Pandeglang	Panimbang	4
8	Pandeglang	Sobang	4
9	Pandeglang	Munjul	4
10	Pandeglang	Angsana	1
11	Pandeglang	Sindangresmi	1
12	Pandeglang	Picung	1
13	Pandeglang	Bojong	3
14	Pandeglang	Saketi	2
15	Pandeglang	Cisata	4
16	Pandeglang	Pagelaran	4
17	Pandeglang	Patia	1
18	Pandeglang	Sukaresmi	3
19	Pandeglang	Labuan	6
20	Pandeglang	Carita	3
21	Pandeglang	Jiput	4
22	Pandeglang	Cikedal	3
23	Pandeglang	Menes	4
24	Pandeglang	Pulosari	3
25	Pandeglang	Mandalawangi	3

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
26	Pandeglang	Cimanuk	1
27	Pandeglang	Cipeucang	5
28	Pandeglang	Banjar	3
29	Pandeglang	Kaduhejo	3
30	Pandeglang	Mekarjaya	2
31	Pandeglang	Pandeglang	6
32	Pandeglang	Majasari	6
33	Pandeglang	Cadasari	2
34	Pandeglang	Karangtanjung	3
35	Pandeglang	Koroncong	2
36	Lebak	Malingping	3
37	Lebak	Wanasalam	3
38	Lebak	Panggarangan	3
39	Lebak	Cihara	3
40	Lebak	Bayah	5
41	Lebak	Cilograng	3
42	Lebak	Cibeber	1
43	Lebak	Cijaku	3
44	Lebak	Cigemblong	3
45	Lebak	Banjarsari	3
46	Lebak	Cileles	3
47	Lebak	Gunung Kencana	3
48	Lebak	Bojongmanik	4
49	Lebak	Cirinten	3
50	Lebak	Leuwidamar	1
51	Lebak	Muncang	3
52	Lebak	Sobang	2
53	Lebak	Cipanas	3
54	Lebak	Lebakgedong	3
55	Lebak	Sajira	3
56	Lebak	Cimarga	3
57	Lebak	Cikulur	3
58	Lebak	Warunggunung	4
59	Lebak	Cibadak	3
60	Lebak	Rangkasbitung	6
61	Lebak	Kalanganyar	4
62	Lebak	Maja	4
63	Lebak	Curugbitung	1
64	Tangerang	Cisoka	6
65	Tangerang	Solear	6
66	Tangerang	Tigaraksa	6
67	Tangerang	Jambe	6
68	Tangerang	Cikupa	6
69	Tangerang	Panongan	6
70	Tangerang	Curug	6
71	Tangerang	Kelapa Dua	6
72	Tangerang	Legok	6
73	Tangerang	Pagedangan	6
74	Tangerang	Cisauk	6
75	Tangerang	Pasarkemis	6
76	Tangerang	Sindang Jaya	4
77	Tangerang	Balaraja	6
78	Tangerang	Jayanti	6
79	Tangerang	Sukamulya	4
80	Tangerang	Kresek	4
81	Tangerang	Gunung Kaler	4
82	Tangerang	Kronjo	3

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
83	Tangerang	Mekar Baru	1
84	Tangerang	Mauk	3
85	Tangerang	Kemiri	3
86	Tangerang	Sukadiri	4
87	Tangerang	Rajeg	6
88	Tangerang	Sepatan	6
89	Tangerang	Sepatan Timur	4
90	Tangerang	Paku haji	4
91	Tangerang	Teluknaga	5
92	Tangerang	Kosambi	6
93	Serang	Cinangka	3
94	Serang	Padarincang	3
95	Serang	Ciomas	3
96	Serang	Pabuaran	4
97	Serang	Gunung Sari	3
98	Serang	Baros	4
99	Serang	Petir	4
100	Serang	Tunjung Teja	4
101	Serang	Cikeusal	4
102	Serang	Pamarayan	3
103	Serang	Bandung	2
104	Serang	Jawilan	4
105	Serang	Kopo	4
106	Serang	Cikande	4
107	Serang	Kibin	5
108	Serang	Kragilan	6
109	Serang	Waringinkurung	3
110	Serang	Mancak	4
111	Serang	Anyar	5
112	Serang	Bojonegara	6
113	Serang	Pulo Ampel	6
114	Serang	Kramatwatu	6
115	Serang	Ciruas	5
116	Serang	Pontang	2
117	Serang	Lebak Wangi	3
118	Serang	Carenang	3
119	Serang	Binuang	6
120	Serang	Tirtayasa	3
121	Serang	Tanara	4
122	Kota Tangerang	Ciledug	6
123	Kota Tangerang	Larangan	6
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
125	Kota Tangerang	Cipondoh	6
126	Kota Tangerang	Pinang	6
127	Kota Tangerang	Tangerang	6
128	Kota Tangerang	Karawaci	6
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	6
130	Kota Tangerang	Cibodas	6
131	Kota Tangerang	Periuk	6
132	Kota Tangerang	Batuceper	6
133	Kota Tangerang	Neglasari	4
134	Kota Tangerang	Benda	6
135	Kota Cilegon	Ciwandan	6
136	Kota Cilegon	Citangkil	6
137	Kota Cilegon	Pulomerak	6
138	Kota Cilegon	Purwakarta	6
139	Kota Cilegon	Grogol	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
140	Kota Cilegon	Cilegon	6
141	Kota Cilegon	Jombang	6
142	Kota Cilegon	Cibeber	6
143	Kota Serang	Curug	4
144	Kota Serang	Walantaka	6
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	6
146	Kota Serang	Serang	6
147	Kota Serang	Taktakan	5
148	Kota Serang	Kasemen	3
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

Jumlah kecamatan pada kategori sangat buruk, buruk, dan agak buruk (Prioritas 1-3) mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 44 kecamatan pada FSVA 2023 menjadi 61 kecamatan pada FSVA 2024. Sedangkan jumlah kecamatan pada kategori agak baik, baik, dan sangat baik (Prioritas 4-6) meningkat dari 111 kecamatan pada FSVA 2023 menjadi 94 kecamatan pada FSVA 2024.



6.2 Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih

Air yang tidak bersih menimbulkan penyakit dan menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih yang rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Kavosi *et al.* 2014).

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air isi ulang/kemasan, leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 meter. Jarak sumber air ke jamban perlu diperhatikan sehingga sumber air tidak tercemar. akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Semakin besar persentase rumah tangga tanpa akses air bersih diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan wilayah.

Berdasarkan hasil analisis indikator persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih terdapat 44 kecamatan (28,39%) yang memiliki rumah tangga tanpa akses ke air bersih dengan kategori sangat buruk, buruk, dan agak buruk (Prioritas 1-3) yang tersebar di wilayah kabupaten meliputi 21 kecamatan (13,55%) di Kabupaten Pandeglang, 17 kecamatan (10,97%) di Kabupaten Lebak, dan 6 kecamatan (3,87%) di Kabupaten Serang. Sedangkan 111 kecamatan lainnya (71,61%) masuk dalam kategori agak baik, baik, dan sangat baik (Prioritas 4-6).

Secara umum, rumah tangga yang berada wilayah kota memiliki akses ke air bersih yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh wilayah kota masuk dalam kategori agak baik, baik, dan sangat baik (Prioritas 4-6). Sedangkan untuk wilayah kabupaten, terdapat 77 kecamatan dari 121 kecamatan masuk dalam kategori agak baik, baik, dan sangat baik (Prioritas 4-6).

Tabel 6. 2. Hasil Analisis Indikator Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Cibitung	6
2	Pandeglang	Cigeulis	1
3	Pandeglang	Munjul	2
4	Pandeglang	Picung	1
5	Pandeglang	Bojong	2
6	Pandeglang	Saketi	4
7	Pandeglang	Pagelaran	1
8	Pandeglang	Patia	3
9	Pandeglang	Carita	1
10	Pandeglang	Cikedal	3
11	Pandeglang	Menes	1
12	Pandeglang	Pulosari	4
13	Pandeglang	Banjar	1
14	Pandeglang	Wanasalam	6
15	Pandeglang	Panggarangan	4
16	Pandeglang	Cihara	5

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
17	Pandeglang	Bayah	3
18	Pandeglang	Cijaku	5
19	Pandeglang	Banjarsari	4
20	Pandeglang	Cileles	2
21	Pandeglang	Bojongmanik	6
22	Pandeglang	Muncang	1
23	Pandeglang	Sobang	4
24	Pandeglang	Cipanas	2
25	Pandeglang	Lebakgedong	4
26	Pandeglang	Cimarga	2
27	Pandeglang	Jayanti	1
28	Pandeglang	Ciomas	5
29	Pandeglang	Cibaliung	2
30	Pandeglang	Cikeusik	6
31	Pandeglang	Malingping	3
32	Pandeglang	Cirinten	1
33	Pandeglang	Leuwidamar	2
34	Pandeglang	Cikulur	1
35	Pandeglang	Gunung Sari	4
36	Lebak	Baros	1
37	Lebak	Cikeusal	1
38	Lebak	Jawilan	2
39	Lebak	Sindangresmi	1
40	Lebak	Jiput	4
41	Lebak	Pandeglang	5
42	Lebak	Cigemblong	4
43	Lebak	Gunung Kencana	2
44	Lebak	Maja	5
45	Lebak	Curugbitung	1
46	Lebak	Kopo	1
47	Lebak	Cimanggu	4
48	Lebak	Labuan	3
49	Lebak	Cipeucang	3
50	Lebak	Majasari	1
51	Lebak	Sajira	2
52	Lebak	Rangkasbitung	1
53	Lebak	Pabuaran	3
54	Lebak	Mancak	1
55	Lebak	Sobang	2
56	Lebak	Cisata	4
57	Lebak	Mandalawangi	2
58	Lebak	Cimanuk	5
59	Lebak	Karangtanjung	6
60	Lebak	Koroncong	6
61	Lebak	Cibeber	6
62	Lebak	Sukamulya	4
63	Lebak	Padarincang	3
64	Tangerang	Anyar	5
65	Tangerang	Curug	6
66	Tangerang	Walantaka	6
67	Tangerang	Taktakan	6
68	Tangerang	Setu	6
69	Tangerang	Pamulang	6
70	Tangerang	Sumur	6
71	Tangerang	Panimbang	6
72	Tangerang	Angsana	6
73	Tangerang	Sukaresmi	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
74	Tangerang	Kaduhejo	6
75	Tangerang	Mekarjaya	6
76	Tangerang	Cadasari	6
77	Tangerang	Cilograng	6
78	Tangerang	Warunggunung	6
79	Tangerang	Cibadak	6
80	Tangerang	Kalanganyar	6
81	Tangerang	Cisoka	6
82	Tangerang	Solear	6
83	Tangerang	Tigaraksa	6
84	Tangerang	Jambe	6
85	Tangerang	Cikupa	6
86	Tangerang	Panongan	6
87	Tangerang	Curug	6
88	Tangerang	Kelapa Dua	6
89	Tangerang	Legok	6
90	Tangerang	Pagedangan	6
91	Tangerang	Cisauk	6
92	Tangerang	Pasarkemis	6
93	Serang	Sindang Jaya	3
94	Serang	Balaraja	6
95	Serang	Kresek	3
96	Serang	Gunung Kaler	6
97	Serang	Kronjo	2
98	Serang	Mekar Baru	3
99	Serang	Mauk	6
100	Serang	Kemiri	1
101	Serang	Sukadiri	5
102	Serang	Rajeg	6
103	Serang	Sepatan	4
104	Serang	Sepatan Timur	6
105	Serang	Pakuhaji	4
106	Serang	Teluknaga	6
107	Serang	Kosambi	6
108	Serang	Cinangka	6
109	Serang	Petir	6
110	Serang	Tunjung Teja	2
111	Serang	Pamarayan	5
112	Serang	Bandung	6
113	Serang	Cikande	6
114	Serang	Kibin	6
115	Serang	Kragilan	6
116	Serang	Waringinkurung	6
117	Serang	Bojonegara	6
118	Serang	Pulo Ampel	6
119	Serang	Kramatwatu	6
120	Serang	Ciruas	6
121	Serang	Pontang	6
122	Kota Tangerang	Lebak Wangi	6
123	Kota Tangerang	Carenang	6
124	Kota Tangerang	Binuang	6
125	Kota Tangerang	Tirtayasa	6
126	Kota Tangerang	Tanara	6
127	Kota Tangerang	Ciledug	6
128	Kota Tangerang	Larangan	6
129	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
130	Kota Tangerang	Cipondoh	6

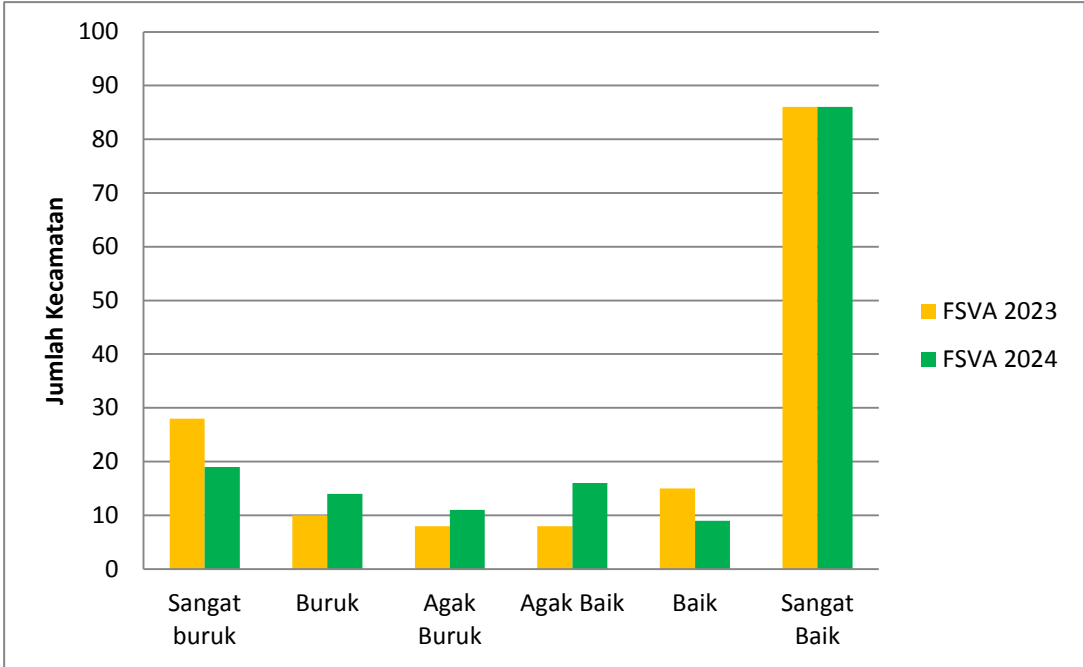
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
131	Kota Tangerang	Pinang	6
132	Kota Tangerang	Tangerang	6
133	Kota Tangerang	Karawaci	6
134	Kota Tangerang	Jati Uwung	6
135	Kota Cilegon	Cibodas	6
136	Kota Cilegon	Periuk	6
137	Kota Cilegon	Batuceper	6
138	Kota Cilegon	Neglasari	6
139	Kota Cilegon	Benda	6
140	Kota Cilegon	Ciwandan	6
141	Kota Cilegon	Citangkil	6
142	Kota Cilegon	Pulomerak	6
143	Kota Serang	Purwakarta	4
144	Kota Serang	Grogol	6
145	Kota Serang	Cilegon	6
146	Kota Serang	Jombang	6
147	Kota Serang	Cibeber	4
148	Kota Serang	Cipocok Jaya	6
149	Kota Tangerang Selatan	Serang	6
150	Kota Tangerang Selatan	Kasemen	6
151	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

Secara makro, indikator persentase rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan FSVA 2023. Peningkatan tersebut menyebabkan beberapa kecamatan mengalami penurunan status. Terdapat 28 kecamatan mengalami penurunan status dan terdapat 14 kecamatan dengan penurunan yang signifikan yaitu:

1. 2 (dua) kecamatan, mengalami penurunan status dari kategori sangat baik menjadi sangat buruk tersebar di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang (Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Tunjung Teja).
2. 2 (dua) kecamatan mengalami penurunan status dari kategori sangat baik menjadi buruk terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Cadasari).
3. 2 (dua) kecamatan mengalami penurunan status dari kategori sangat baik menjadi agak buruk tersebar di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang (Kecamatan Angsana dan Kecamatan Cinangka).
4. 1 (satu) kecamatan mengalami penurunan status dari kategori baik menjadi sangat buruk terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Karang Tanjung).
5. 1 (satu) kecamatan mengalami penurunan status dari kategori baik menjadi buruk terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cimanuk).
6. 1 (satu) kecamatan mengalami penurunan status dari kategori baik menjadi agak buruk terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Sobang).

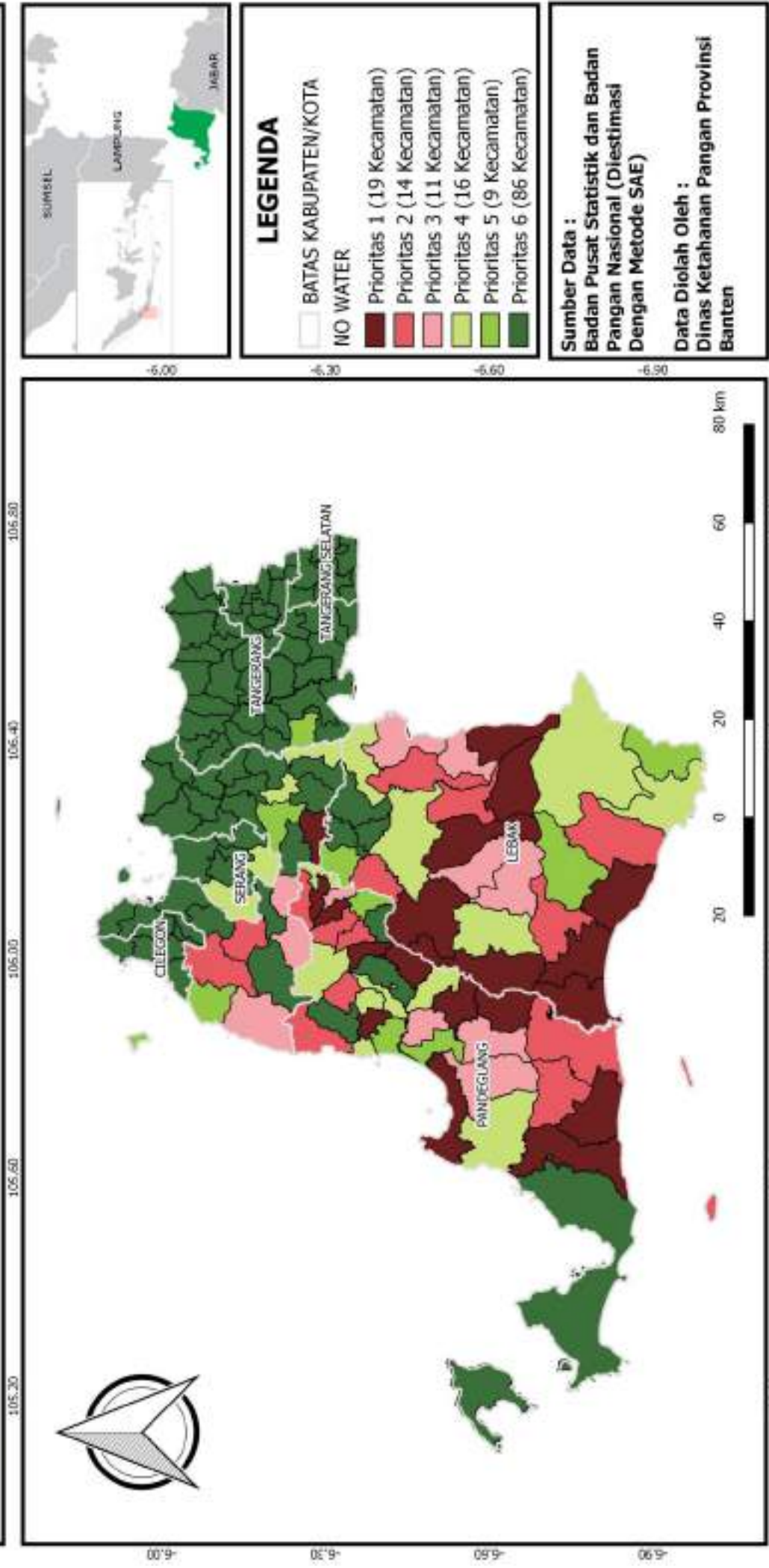
- 7. 3 (tiga) kecamatan mengalami penurunan status dari kategori agak baik menjadi sangat buruk tersebar di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cipeucang dan Kecamatan Majasari).
- 8. 2 (dua) kecamatan mengalami penurunan status dari kategori agak baik menjadi buruk terdapat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang (Kecamatan Sajira dan Kecamatan Mancak).

Gambar 6. 1. Sebaran Kelompok Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih





PETA RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024



6.3 Kecukupan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Sosialisasi dan edukasi terkait dengan gizi dan perilaku hidup sehat juga menjadi tugas pelayanan tenaga kesehatan. Kesehatan masyarakat yang baik akan menunjang fungsi pemanfaatan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas sektor kesehatan harus terus diupayakan untuk meningkatkan status kesehatan setiap individu.

Kecukupan tenaga kesehatan dianalisis dengan menggunakan indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Indikator ini mengukur sejauh mana kesesuaian ketersediaan tenaga kesehatan dengan jumlah masyarakat yang dilayaninya. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan (Lubis, 2010 dan Sofiati, 2009). Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan, hasilnya kemudian dibagi dengan kepadatan penduduk untuk memperoleh jumlah populasi terkoreksi yang dilayani per tenaga kesehatan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin rentan daerah tersebut.

Rasio antara jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2023 adalah dimana 1 (satu) orang tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Banten rata-rata melayani wilayah seluas $1,18 \text{ km}^2$ untuk wilayah kabupaten dan $0,28 \text{ km}^2$ untuk wilayah kota. Rasio tertinggi di wilayah kabupaten terdapat di Kabupaten Pandeglang yaitu Kecamatan Sumur dengan rasio sebesar 4,97 dimana setiap tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas $4,97 \text{ km}^2$. Sedangkan rasio terendah di wilayah kabupaten terdapat di Kabupaten Tangerang yaitu Kecamatan Kelapa Dua dengan rasio 0,20 dimana masing-masing tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas $0,20 \text{ km}^2$.

Sementara itu untuk wilayah kota, rasio tertinggi terdapat di Kota Serang yaitu Kecamatan Curug dengan rasio 0,95 dimana setiap tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas $0,95 \text{ km}^2$ dan rasio terendah terdapat di Kota Tangerang yaitu Kecamatan Periuk dan Kecamatan Cibodas dengan rasio 0,07 dimana setiap tenaga kesehatannya melayani wilayah $0,07 \text{ km}^2$.

Berdasarkan analisis indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Provinsi Banten (100%) sudah memiliki sebaran tenaga kesehatan yang merata sesuai dengan kepadatan penduduk dimana 155 kecamatan (100%) masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 6. 3. Hasil Analisis Indikator Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap
Kepadatan Penduduk

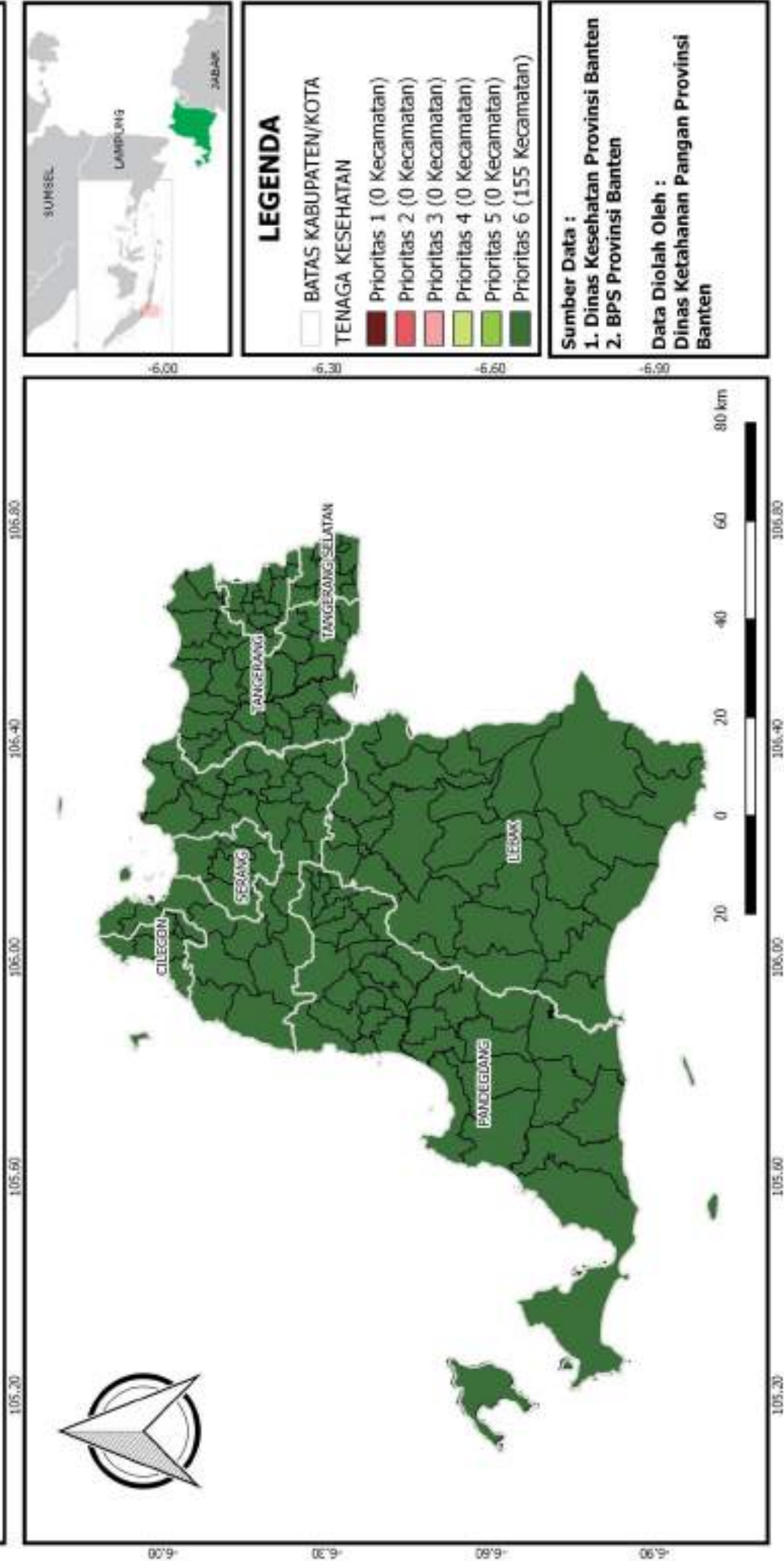
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	6
2	Pandeglang	Cimanggu	6
3	Pandeglang	Cibaliung	6
4	Pandeglang	Cibitung	6
5	Pandeglang	Cikeusik	6
6	Pandeglang	Cigeulis	6
7	Pandeglang	Panimbang	6
8	Pandeglang	Sobang	6
9	Pandeglang	Munjul	6
10	Pandeglang	Angsana	6
11	Pandeglang	Sindangresmi	6
12	Pandeglang	Picung	6
13	Pandeglang	Bojong	6
14	Pandeglang	Saketi	6
15	Pandeglang	Cisata	6
16	Pandeglang	Pagelaran	6
17	Pandeglang	Patia	6
18	Pandeglang	Sukaresmi	6
19	Pandeglang	Labuan	6
20	Pandeglang	Carita	6
21	Pandeglang	Jiput	6
22	Pandeglang	Cikedal	6
23	Pandeglang	Menes	6
24	Pandeglang	Pulosari	6
25	Pandeglang	Mandalawangi	6
26	Pandeglang	Cimanuk	6
27	Pandeglang	Cipeucang	6
28	Pandeglang	Banjar	6
29	Pandeglang	Kaduhejo	6
30	Pandeglang	Mekarjaya	6
31	Pandeglang	Pandeglang	6
32	Pandeglang	Majasari	6
33	Pandeglang	Cadasari	6
34	Pandeglang	Karangtanjung	6
35	Pandeglang	Koroncong	6
36	Lebak	Malingping	6
37	Lebak	Wanasalam	6
38	Lebak	Panggarangan	6
39	Lebak	Cihara	6
40	Lebak	Bayah	6
41	Lebak	Cilograng	6
42	Lebak	Cibeber	6
43	Lebak	Cijaku	6
44	Lebak	Cigemblong	6
45	Lebak	Banjarsari	6
46	Lebak	Cileles	6
47	Lebak	Gunung Kencana	6
48	Lebak	Bojongmanik	6
49	Lebak	Cirinten	6
50	Lebak	Leuwidamar	6
51	Lebak	Muncang	6
52	Lebak	Sobang	6
53	Lebak	Cipanas	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
54	Lebak	Lebakgedong	6
55	Lebak	Sajira	6
56	Lebak	Cimarga	6
57	Lebak	Cikulur	6
58	Lebak	Warunggunung	6
59	Lebak	Cibadak	6
60	Lebak	Rangkasbitung	6
61	Lebak	Kalanganyar	6
62	Lebak	Maja	6
63	Lebak	Curugbitung	6
64	Tangerang	Cisoka	6
65	Tangerang	Solear	6
66	Tangerang	Tigaraksa	6
67	Tangerang	Jambe	6
68	Tangerang	Cikupa	6
69	Tangerang	Panongan	6
70	Tangerang	Curug	6
71	Tangerang	Kelapa Dua	6
72	Tangerang	Legok	6
73	Tangerang	Pagedangan	6
74	Tangerang	Cisauk	6
75	Tangerang	Pasarkemis	6
76	Tangerang	Sindang Jaya	6
77	Tangerang	Balaraja	6
78	Tangerang	Jayanti	6
79	Tangerang	Sukamulya	6
80	Tangerang	Kresek	6
81	Tangerang	Gunung Kaler	6
82	Tangerang	Kronjo	6
83	Tangerang	Mekar Baru	6
84	Tangerang	Mauk	6
85	Tangerang	Kemiri	6
86	Tangerang	Sukadiri	6
87	Tangerang	Rajeg	6
88	Tangerang	Sepatan	6
89	Tangerang	Sepatan Timur	6
90	Tangerang	Pakuhaji	6
91	Tangerang	Teluknaga	6
92	Tangerang	Kosambi	6
93	Serang	Cinangka	6
94	Serang	Padarincang	6
95	Serang	Ciomas	6
96	Serang	Pabuaran	6
97	Serang	Gunung Sari	6
98	Serang	Baros	6
99	Serang	Petir	6
100	Serang	Tunjung Teja	6
101	Serang	Cikeusal	6
102	Serang	Pamarayan	6
103	Serang	Bandung	6
104	Serang	Jawilan	6
105	Serang	Kopo	6
106	Serang	Cikande	6
107	Serang	Kibin	6
108	Serang	Kragilan	6
109	Serang	Waringinkurung	6
110	Serang	Mancak	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
111	Serang	Anyar	6
112	Serang	Bojonegara	6
113	Serang	Pulo Ampel	6
114	Serang	Kramatwatu	6
115	Serang	Ciruas	6
116	Serang	Pontang	6
117	Serang	Lebak Wangi	6
118	Serang	Carenang	6
119	Serang	Binuang	6
120	Serang	Tirtayasa	6
121	Serang	Tanara	6
122	Kota Tangerang	Ciledug	6
123	Kota Tangerang	Larangan	6
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
125	Kota Tangerang	Cipondoh	6
126	Kota Tangerang	Pinang	6
127	Kota Tangerang	Tangerang	6
128	Kota Tangerang	Karawaci	6
129	Kota Tangerang	Jati Ujung	6
130	Kota Tangerang	Cibodas	6
131	Kota Tangerang	Periuk	6
132	Kota Tangerang	Batuceper	6
133	Kota Tangerang	Neglasari	6
134	Kota Tangerang	Benda	6
135	Kota Cilegon	Ciwandan	6
136	Kota Cilegon	Citangkil	6
137	Kota Cilegon	Pulomerak	6
138	Kota Cilegon	Purwakarta	6
139	Kota Cilegon	Grogol	6
140	Kota Cilegon	Cilegon	6
141	Kota Cilegon	Jombang	6
142	Kota Cilegon	Cibeber	6
143	Kota Serang	Curug	6
144	Kota Serang	Walantaka	6
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	6
146	Kota Serang	Serang	6
147	Kota Serang	Taktakan	6
148	Kota Serang	Kasemen	6
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6



**PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK
DIBANDINGKAN DENGAN TENAGA KESEHATAN
TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**



6.4 Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar/Tinggi Kurang (Stunting)

Status gizi merupakan hasil dari interaksi antara makanan yang dikonsumsi, metabolisme zat gizi makanan oleh tubuh dan lingkungan hidup manusia. Status gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Masalah gizi pada saat ini dapat berdampak pada kualitas sumberdaya manusia pada generasi berikutnya. Dalam jangka panjang kekurangan gizi dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi muda yang cerdas dan berkualitas (*lost generation*) karena tidak produktif dan tidak mampu bersaing di masa depan. Terpenuhiya kebutuhan gizi akan menurunkan terjadinya kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga meningkatkan kualitas kesehatan individu.

Status gizi dipengaruhi oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Status ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak, selain pola asuh dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan air bersih. Sedangkan pola konsumsi makanan dan penyakit infeksi yang diderita berpengaruh langsung terhadap status gizi anak. Setiap faktor penyebab baik langsung ataupun tidak langsung akan saling mempengaruhi dan berinteraksi satu dengan lainnya. Sebagai contoh, anak yang konsumsi pangannya kurang baik maka daya tahan tubuhnya akan lemah, sehingga akan lebih mudah terserang infeksi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status gizinya. Seorang anak dengan konsumsi pangan yang baikpun tidak serta merta memiliki status gizi yang baik. Jika anak tersebut sering menderita penyakit infeksi, maka situasi kesehatannya tersebut akan berpengaruh terhadap penyerapan zat gizi oleh tubuh yang berpengaruh terhadap status gizinya.

Status gizi balita diukur menggunakan 3 indikator, yaitu prevalensi *stunting* (tinggi badan menurut umur), *underweight* (berat badan menurut umur) dan *wasting* (berat badan menurut tinggi badan).

1. Pendek atau *stunting* : rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah-2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus menerus, dalam jangka panjang dan kronis.
2. Gizi kurang dan buruk atau *underweight* : rasio berat badan menurut umur-BB/U-di bawah-2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO, yang menggambarkan kurang gizi.
3. Kurus atau *wasting* : rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah – 2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan berdasarkan prevalensi *underweight*, *stunting* dan *wasting* dalam populasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 6. 4. Klasifikasi WHO Untuk Underweight, Stunting dan Wasting Dalam Populasi

Klasifikasi	Underweight	Stunting	Wasting
Baik	<10%	<20%	<5%
Kurang	10-19%	20-29%	5-9%
Buruk	20-29%	30-39%	10-14%
Sangat Buruk	≥30%	≥40%	≥15%

Sumber : WHO 2000

Status gizi balita stunting (balita tinggi kurang) menjadi permasalahan kesehatan dengan jumlah dan persentase yang cukup besar di Indonesia. Untuk mengetahui apakah balita memiliki tinggi badan kurang atau tidak, maka harus dilakukan pengukuran tinggi badan dan pencatatan umur dalam bulan. Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh badan “National Centre For Health Statistics, Centers for Disease Control, USA (NCHS Standard)”.

Secara teknis kesehatan, anak stunting adalah salah satu bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan. Janin dalam kandungan membutuhkan asupan gizi yang cukup melalui ibunya. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan ibu hamil dan menyusui menjadi sangat krusial karena menentukan kualitas bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang di dua tahun pertama kehidupannya.

Angka prevalensi *stunting* nasional turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023, artinya terjadi penurunan prevalensi stunting sebesar 9,3% dalam 5 tahun terakhir. Prevalensi stunting Provinsi Banten terus mengalami penurunan sejak tahun 2021 sebesar 24.5%, turun menjadi 20 % tahun 2022, dan mengalami kenaikan tahun 2023 menjadi 24.0%. Terdapat 3 kabupaten/kota di Banten yang prevalensi stuntingnya turun secara konsisten dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2021 ke tahun 2023 yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan (Kemenko PMK RI, 2024).

Berdasarkan hasil analisis indikator prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar/tinggi badan kurang (*Stunting*) dengan sumber data EPPGBM tahun 2023, terdapat 1 kecamatan (0,65%) yang masuk dalam klasifikasi kurang terdapat di Kabupaten Pandeglang dan 154 kecamatan lainnya (99,35%) masuk dalam klasifikasi baik.

Tabel 6. 5. Hasil Analisis Indikator Prevalensi Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar/Tinggi Badan Kurang (*Stunting*)

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	4
2	Pandeglang	Cimanggu	4
3	Pandeglang	Cibaliung	4
4	Pandeglang	Cibitung	4
5	Pandeglang	Cikeusik	4
6	Pandeglang	Cigeulis	4
7	Pandeglang	Panimbang	4
8	Pandeglang	Sobang	4
9	Pandeglang	Munjul	4

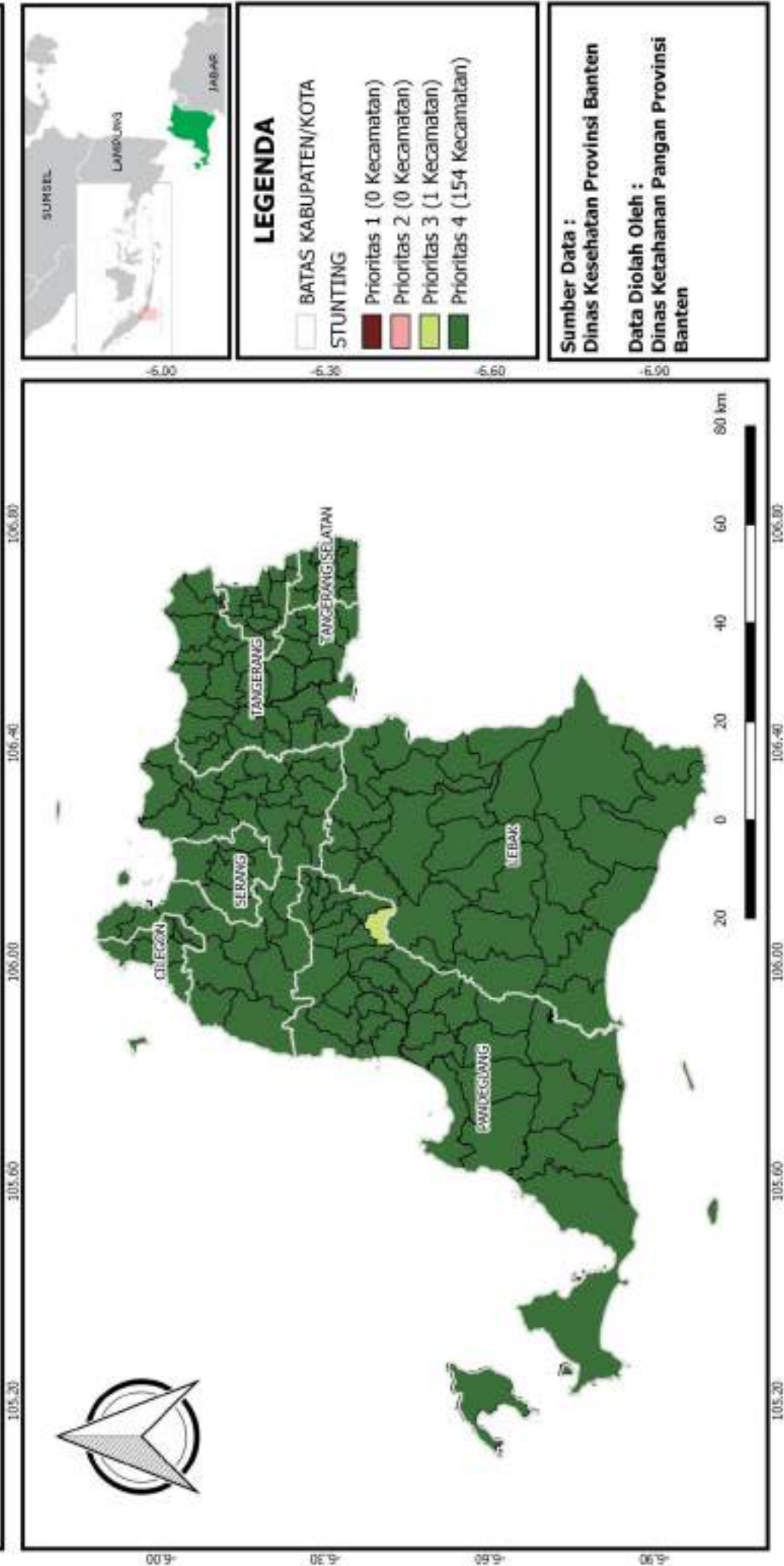
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
10	Pandeglang	Angsana	4
11	Pandeglang	Sindangresmi	4
12	Pandeglang	Picung	4
13	Pandeglang	Bojong	4
14	Pandeglang	Saketi	4
15	Pandeglang	Cisata	4
16	Pandeglang	Pagelaran	4
17	Pandeglang	Patia	4
18	Pandeglang	Sukaresmi	4
19	Pandeglang	Labuan	4
20	Pandeglang	Carita	4
21	Pandeglang	Jiput	4
22	Pandeglang	Cikedal	4
23	Pandeglang	Menes	4
24	Pandeglang	Pulosari	4
25	Pandeglang	Mandalawangi	4
26	Pandeglang	Cimanuk	4
27	Pandeglang	Cipeucang	4
28	Pandeglang	Banjar	4
29	Pandeglang	Kaduhejo	4
30	Pandeglang	Mekarjaya	3
31	Pandeglang	Pandeglang	4
32	Pandeglang	Majasari	4
33	Pandeglang	Cadasari	4
34	Pandeglang	Karangtanjung	4
35	Pandeglang	Koroncong	4
36	Lebak	Malingping	4
37	Lebak	Wanasalam	4
38	Lebak	Panggarangan	4
39	Lebak	Cihara	4
40	Lebak	Bayah	4
41	Lebak	Cilograng	4
42	Lebak	Cibeber	4
43	Lebak	Cijaku	4
44	Lebak	Cigemblong	4
45	Lebak	Banjarsari	4
46	Lebak	Cileles	4
47	Lebak	Gunung Kencana	4
48	Lebak	Bojongmanik	4
49	Lebak	Cirinten	4
50	Lebak	Leuwidamar	4
51	Lebak	Muncang	4
52	Lebak	Sobang	4
53	Lebak	Cipanas	4
54	Lebak	Lebakgedong	4
55	Lebak	Sajira	4
56	Lebak	Cimarga	4
57	Lebak	Cikulur	4
58	Lebak	Warunggunung	4
59	Lebak	Cibadak	4
60	Lebak	Rangkasbitung	4
61	Lebak	Kalanganyar	4
62	Lebak	Maja	4
63	Lebak	Curugbitung	4
64	Tangerang	Cisoka	4
65	Tangerang	Solear	4
66	Tangerang	Tigaraksa	4

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
67	Tangerang	Jambe	4
68	Tangerang	Cikupa	4
69	Tangerang	Panongan	4
70	Tangerang	Curug	4
71	Tangerang	Kelapa Dua	4
72	Tangerang	Legok	4
73	Tangerang	Pagedangan	4
74	Tangerang	Cisauk	4
75	Tangerang	Pasarkemis	4
76	Tangerang	Sindang Jaya	4
77	Tangerang	Balaraja	4
78	Tangerang	Jayanti	4
79	Tangerang	Sukamulya	4
80	Tangerang	Kresek	4
81	Tangerang	Gunung Kaler	4
82	Tangerang	Kronjo	4
83	Tangerang	Mekar Baru	4
84	Tangerang	Mauk	4
85	Tangerang	Kemiri	4
86	Tangerang	Sukadiri	4
87	Tangerang	Rajeg	4
88	Tangerang	Sepatan	4
89	Tangerang	Sepatan Timur	4
90	Tangerang	Pakuhaji	4
91	Tangerang	Teluknaga	4
92	Tangerang	Kosambi	4
93	Serang	Cinangka	4
94	Serang	Padarincang	4
95	Serang	Ciomas	4
96	Serang	Pabuaran	4
97	Serang	Gunung Sari	4
98	Serang	Baros	4
99	Serang	Petir	4
100	Serang	Tunjung Teja	4
101	Serang	Cikeusal	4
102	Serang	Pamarayan	4
103	Serang	Bandung	4
104	Serang	Jawilan	4
105	Serang	Kopo	4
106	Serang	Cikande	4
107	Serang	Kibin	4
108	Serang	Kragilan	4
109	Serang	Waringinkurung	4
110	Serang	Mancak	4
111	Serang	Anyar	4
112	Serang	Bojonegara	4
113	Serang	Pulo Ampel	4
114	Serang	Kramatwatu	4
115	Serang	Ciruas	4
116	Serang	Pontang	4
117	Serang	Lebak Wangi	4
118	Serang	Carenang	4
119	Serang	Binuang	4
120	Serang	Tirtayasa	4
121	Serang	Tanara	4
122	Kota Tangerang	Ciledug	4
123	Kota Tangerang	Larangan	4

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	4
125	Kota Tangerang	Cipondoh	4
126	Kota Tangerang	Pinang	4
127	Kota Tangerang	Tangerang	4
128	Kota Tangerang	Karawaci	4
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	4
130	Kota Tangerang	Cibodas	4
131	Kota Tangerang	Periuk	4
132	Kota Tangerang	Batuceper	4
133	Kota Tangerang	Neglasari	4
134	Kota Tangerang	Benda	4
135	Kota Cilegon	Ciwandan	4
136	Kota Cilegon	Citangkil	4
137	Kota Cilegon	Pulomerak	4
138	Kota Cilegon	Purwakarta	4
139	Kota Cilegon	Grogol	4
140	Kota Cilegon	Cilegon	4
141	Kota Cilegon	Jombang	4
142	Kota Cilegon	Cibeber	4
143	Kota Serang	Curug	4
144	Kota Serang	Walantaka	4
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	4
146	Kota Serang	Serang	4
147	Kota Serang	Taktakan	4
148	Kota Serang	Kasemen	4
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	4
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	4
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	4
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	4
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	4
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	4
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	4



**PETA PREVALENSI BALITA
DENGAN TINGGI BADAN DI BAWAH STANDAR
(STUNTING)
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**



6.5 Angka Kesakitan

Angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan merupakan salah satu kesehatan di suatu wilayah. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Dalam analisis FSVA, angka kesakitan dibagi ke dalam enam kategori. Kategori sangat buruk, buruk, dan agak buruk jika angka kesakitannya lebih dari 12% dan kategori agak baik, baik, dan sangat baik jika angka kesakitannya kurang dari 12%. Berdasarkan analisis indikator angka kesakitan dengan data yang digunakan bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode *Small Area Estimation* (SAE), terdapat 38 kecamatan (25,52%) memiliki angka kesakitan dalam kategori sangat buruk (Prioritas 1) tersebar di 36 kecamatan wilayah Kabupaten dan 2 kecamatan di wilayah kota. Sedangkan untuk kategori buruk berjumlah 15 kecamatan (9,68%) dan kategori agak buruk berjumlah 15 kecamatan (9,68%) tersebar di wilayah kabupaten dan kota. Sementara itu, untuk kategori agak baik berjumlah 14 kecamatan (9,03%), kategori baik berjumlah 24 kecamatan (15,48%), dan kategori sangat baik berjumlah 49 kecamatan (31,61%) yang tersebar di wilayah kabupaten dan kota.

Tabel 6. 6. Hasil Analisis Indikator Angka Kesakitan

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	6
2	Pandeglang	Cimanggu	6
3	Pandeglang	Cibaliung	4
4	Pandeglang	Cibitung	3
5	Pandeglang	Cikeusik	4
6	Pandeglang	Cigeulis	1
7	Pandeglang	Panimbang	6
8	Pandeglang	Sobang	1
9	Pandeglang	Munjul	6
10	Pandeglang	Angsana	3
11	Pandeglang	Sindangresmi	2
12	Pandeglang	Picung	2
13	Pandeglang	Bojong	5
14	Pandeglang	Saketi	6
15	Pandeglang	Cisata	5
16	Pandeglang	Pagelaran	4
17	Pandeglang	Patia	2
18	Pandeglang	Sukaresmi	2
19	Pandeglang	Labuan	1

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
20	Pandeglang	Carita	1
21	Pandeglang	Jiput	1
22	Pandeglang	Cikedal	6
23	Pandeglang	Menes	5
24	Pandeglang	Pulosari	1
25	Pandeglang	Mandalawangi	6
26	Pandeglang	Cimanuk	1
27	Pandeglang	Cipeucang	5
28	Pandeglang	Banjar	4
29	Pandeglang	Kaduhejo	6
30	Pandeglang	Mekarjaya	2
31	Pandeglang	Pandeglang	1
32	Pandeglang	Majasari	1
33	Pandeglang	Cadasari	2
34	Pandeglang	Karangtanjung	5
35	Pandeglang	Koroncong	1
36	Lebak	Malingping	1
37	Lebak	Wanasalam	4
38	Lebak	Panggarangan	6
39	Lebak	Cihara	1
40	Lebak	Bayah	2
41	Lebak	Cilograng	1
42	Lebak	Cibeber	4
43	Lebak	Cijaku	6
44	Lebak	Cigemblong	2
45	Lebak	Banjarsari	2
46	Lebak	Cileles	5
47	Lebak	Gunung Kencana	6
48	Lebak	Bojongmanik	6
49	Lebak	Cirinten	5
50	Lebak	Leuwidamar	1
51	Lebak	Muncang	1
52	Lebak	Sobang	3
53	Lebak	Cipanas	1
54	Lebak	Lebakgedong	3
55	Lebak	Sajira	1
56	Lebak	Cimarga	3
57	Lebak	Cikulur	5
58	Lebak	Warunggunung	1
59	Lebak	Cibadak	3
60	Lebak	Rangkasbitung	1
61	Lebak	Kalanganyar	3
62	Lebak	Maja	1
63	Lebak	Curugbitung	1
64	Tangerang	Cisoka	1
65	Tangerang	Solear	5
66	Tangerang	Tigaraksa	4
67	Tangerang	Jambe	6
68	Tangerang	Cikupa	3
69	Tangerang	Panongan	6
70	Tangerang	Curug	6
71	Tangerang	Kelapa Dua	4
72	Tangerang	Legok	1
73	Tangerang	Pagedangan	6
74	Tangerang	Cisauk	3
75	Tangerang	Pasarkemis	3
76	Tangerang	Sindang Jaya	6

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
77	Tangerang	Balaraja	5
78	Tangerang	Jayanti	5
79	Tangerang	Sukamulya	4
80	Tangerang	Kresek	2
81	Tangerang	Gunung Kaler	5
82	Tangerang	Kronjo	6
83	Tangerang	Mekar Baru	1
84	Tangerang	Mauk	6
85	Tangerang	Kemiri	1
86	Tangerang	Sukadiri	1
87	Tangerang	Rajeg	5
88	Tangerang	Sepatan	2
89	Tangerang	Sepatan Timur	2
90	Tangerang	Paku haji	6
91	Tangerang	Teluknaga	1
92	Tangerang	Kosambi	5
93	Serang	Cinangka	3
94	Serang	Padarincang	6
95	Serang	Ciomas	5
96	Serang	Pabuaran	2
97	Serang	Gunung Sari	5
98	Serang	Baros	6
99	Serang	Petir	6
100	Serang	Tunjung Teja	1
101	Serang	Cikeusal	1
102	Serang	Pamarayan	1
103	Serang	Bandung	4
104	Serang	Jawilan	1
105	Serang	Kopo	1
106	Serang	Cikande	4
107	Serang	Kibin	5
108	Serang	Kragilan	1
109	Serang	Waringinkurung	4
110	Serang	Mancak	1
111	Serang	Anyar	5
112	Serang	Bojonegara	2
113	Serang	Pulo Ampel	1
114	Serang	Kramatwatu	3
115	Serang	Ciruas	6
116	Serang	Pontang	6
117	Serang	Lebak Wangi	6
118	Serang	Carenang	3
119	Serang	Binuang	6
120	Serang	Tirtayasa	1
121	Serang	Tanara	6
122	Kota Tangerang	Ciledug	5
123	Kota Tangerang	Larangan	6
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	6
125	Kota Tangerang	Cipondoh	6
126	Kota Tangerang	Pinang	6
127	Kota Tangerang	Tangerang	6
128	Kota Tangerang	Karawaci	6
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	6
130	Kota Tangerang	Cibodas	6
131	Kota Tangerang	Periuk	6
132	Kota Tangerang	Batuceper	6
133	Kota Tangerang	Neglasari	5

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Prioritas
134	Kota Tangerang	Benda	6
135	Kota Cilegon	Ciwandan	5
136	Kota Cilegon	Citangkil	5
137	Kota Cilegon	Pulomerak	4
138	Kota Cilegon	Purwakarta	6
139	Kota Cilegon	Grogol	3
140	Kota Cilegon	Cilegon	5
141	Kota Cilegon	Jombang	3
142	Kota Cilegon	Cibeber	6
143	Kota Serang	Curug	6
144	Kota Serang	Walantaka	1
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	5
146	Kota Serang	Serang	2
147	Kota Serang	Taktakan	4
148	Kota Serang	Kasemen	1
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	6
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	6
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	6
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	6
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

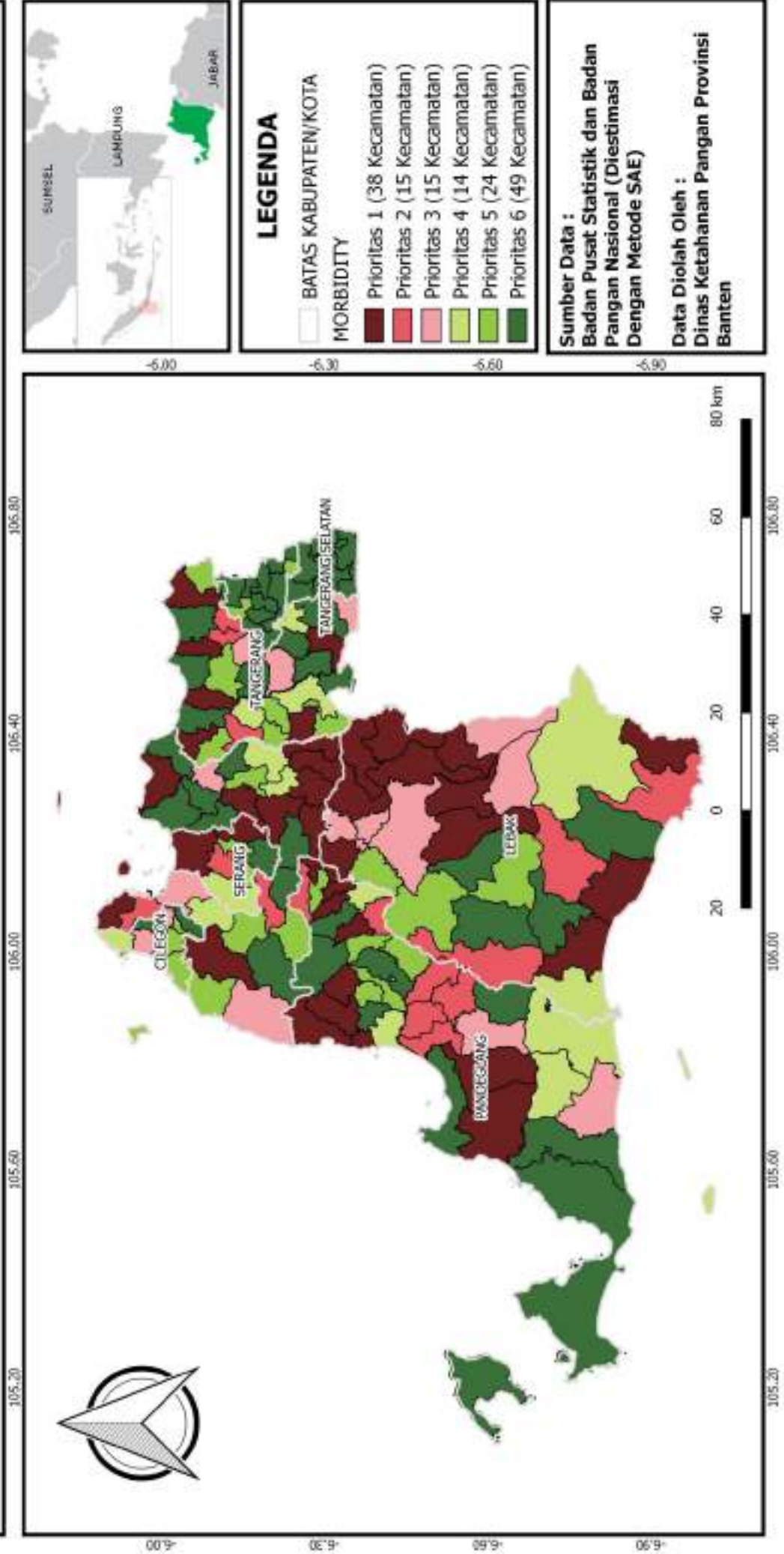
Berdasarkan hasil analisis FSVA 2024 pada indikator angka kesakitan, Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan angka kesakitan terbanyak di wilayah kabupaten dimana 67,86% kecamatan di Kabupaten Lebak memiliki nilai angka kesakitan tinggi (> 12%), disusul oleh Kabupaten Pandeglang sebesar 51,43%, Kabupaten Serang sebesar 48,28%, dan Kabupaten Tangerang sebesar 41,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah kabupaten cenderung tinggi.

Sementara untuk wilayah kota, angka kesakitan paling banyak terdapat di Kota Serang dengan persentase 50% dimana 3 dari 6 kecamatan di Kota Serang memiliki nilai angka kesakitan lebih dari 12%. Selain itu, Kota Cilegon juga memiliki rata-rata angka kesakitan yang tinggi dimana 25% kecamatan di Kota Cilegon memiliki nilai angka kesakitan lebih dari 12%. Sedangkan untuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki angka kesakitan yang cenderung rendah dengan rata-rata angka kesakitan kurang dari 10% dan masuk dalam kategori baik.

Jika membaca data dan hasil analisis pada indikator angka kesakitan dapat disimpulkan bahwa banyak orang sakit di Wilayah Provinsi Banten terutama untuk wilayah kabupaten. Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan menjadi penyebab semakin banyak orang yang mengeluh sakit sehingga peduli untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Angka kesakitan di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat di wilayah kota memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya vaksinasi dan pemenuhan gizi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).



PETA ANGKA KESAKITAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



6.6 Tantangan Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Tantangan peningkatan pemanfaatan pangan berdasarkan hasil analisis FSVA Provinsi Banten Tahun 2024, diantaranya meningkatkan pendidikan perempuan di wilayah pedesaan dan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar, meningkatkan infrastruktur pendidikan, meningkatkan infrastruktur dasar layanan air bersih, meningkatkan pencegahan terhadap penyakit, dan meningkatkan jumlah balita dengan status gizi baik.

BAB 7

SUMBER DAYA ALAM DAN KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA

Sumber daya alam di wilayah Provinsi Banten berkaitan erat dengan potensi kerentanan pangan transien. **Kerentanan pangan transien yaitu kondisi suatu wilayah menjadi rentan rawan pangan yang disebabkan oleh kejadian di suatu wilayah pada waktu tertentu yang menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan masyarakat.** Kerentanan pangan transien dibagi menjadi dua, yaitu berulang (*cylical*), dimana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya “musim paceklik” yang terjadi dalam periode sebelum panen dan temporal (*temporary*) yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek, seperti kekeringan atau kejadian bencana. Konflik sipil juga termasuk dalam kategori guncangan (*Shock*) temporal meskipun dampak negatifnya terhadap kerentanan pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama.

Kerentanan pangan transien dapat terjadi pada masyarakat yang tinggal di wilayah rentan pangan kronis dan juga masyarakat yang tinggal di wilayah tahan pangan. Faktor iklim dan lingkungan serta kemampuan *early warning*, mitigasi, dan *recovery* masyarakat terhadap guncangan sangat menentukan apakah suatu negara atau wilayah dapat mempertahankan atau meningkatkan ketahanan pangan dan status gizinya.

Adanya dampak perubahan iklim akibat pemanasan global juga menjadi permasalahan dalam penyediaan pangan yang berkaitan erat dengan kerentanan pangan transien. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas tanaman dan pendapatan petani. Dampak tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung melalui serangan OPT, fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT. Perubahan iklim juga berimplikasi terhadap munculnya ras, strain, biotipe, genome baru dari hama dan penyakit yang mempengaruhi tanaman, ternak dan manusia dan berdampak menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan.

Faktor perubahan iklim yang semakin intensif dan sulit diprediksi perlu diatasi melalui pemanfaatan teknologi untuk upaya adaptasi dan mitigasi atas perubahan tersebut. Selain itu, perlu pula meningkatkan kemampuan para petani dan masyarakat untuk mengatasi guncangan akibat dampak perubahan iklim dan kejadian bencana alam agar ketahanan pangan dan gizi dapat dipertahankan. Untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi iklim yang mempengaruhi dan menyebabkan kerentanan pangan transien, tiga indikator kerentanan pangan transien yang digunakan dalam FSVA 2023 yaitu : i) data kejadian bencana alam yang terjadi di tingkat kabupaten/kota; ii) variabilitas curah hujan; iii) estimasi kehilangan produksi akibat banjir, kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman.

7.1 Bencana Alam

Hasil Kajian Risiko Bencana periode 2022 – 2026 menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki 15 potensi bencana yaitu Banjir, Banjir Bandang, Covid-19, Cuaca Ekstrem, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kegagalan Teknologi, Kekeringan, Letusan Gunungapi Karang, Letusan Gunungapi Pulosari, Likuefaksi, Tanah Longsor, dan Tsunami.

Tingkat risiko bencana Provinsi Banten dianalisis berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Provinsi Banten.

Tabel 7. 1. Tingkat Risiko Bencana Prioritas di Provinsi Banten

NO	ANCAMAN BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3	COVID-19	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
4	CUACA EKSTREM	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
5	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
6	GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
7	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
8	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
9	KEGAGALAN TEKNOLOGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
10	KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11	LETUSAN GUNUNGAPI KARANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
12	LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
13	LIKUEFAKSI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
14	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
15	TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: KRB Provinsi Banten 2022-2026

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Banten berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat risiko rendah untuk bencana Covid-19, Epidemi Wabah Peyakit. Tingkat risiko sedang untuk bencana Kegagalan Teknologi, Likuefaksi, Letusan Gunungapi Karang. Sementara itu, untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempabumi, Kekeringan, Letusan Gunungapi Pulosari, Tanah Longsor dan Tsunami memiliki tingkat risiko tinggi.

Tingginya potensi bencana di Provinsi Banten belum diiringi dengan kemampuan dan kapasitas daerah kabupaten/ kota di Provinsi Banten dalam menghadapi bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/ kota berada dalam rentang Rendah-Sedang. Hal ini berimplikasi pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) kabupaten/ kota dan provinsi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan penanggulangan bencana (pra bencana – tanggap darurat – pascabencana) baik yang dilakukan melalui kewenangan Pemerintah Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Adapun wilayah yang paling rentan terhadap bencana alam pada tahun 2023 adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kejadian bencana alam yang tinggi pada kedua kabupaten tersebut. Pada tahun 2023, jenis bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem dengan jumlah kejadian sebanyak 490 kejadian. Cuaca ekstrem menyebabkan banyak pohon tumbang dan kerusakan rumah. Kejadian cuaca ekstrem paling banyak terjadi di Kota Serang sebanyak 114 kejadian dan kabupaten Lebak sebanyak 97 kejadian. Bencana alam lain yang sering terjadi di Provinsi Banten adalah bencana banjir. Pada tahun 2023, terdapat 228 kejadian banjir di 8 Kabupaten/Kota. Bencana banjir juga merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi di wilayah kota.

Tabel 7. 2. Jumlah Kejadian Bencana Di Provinsi Banten Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana				
		Banjir	Longsor	Kekeringan	Gempa Bumi	Cuaca Ekstrem
1	Kabupaten Pandeglang	16	3	86	239	48
2	Kabupaten Lebak	21	56	27	159	97
3	Kabupaten Tangerang	78	2	49	3	18
4	Kabupaten Serang	9	6	25	3	46
5	Kota Tangerang	13	0	0	0	77
6	Kota Cilegon	33	5	7	1	56
7	Kota Serang	28	2	13	0	114
8	Kota Tangerang Selatan	30	19	307	0	34
Jumlah		228	93	514	405	490

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2024

7.2 Variabilitas Curah Hujan

Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina atau El Nino. Parameter iklim utama yang menjadi perhatian adalah suhu udara dan hujan. Variabilitas suhu udara dan hujan mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Perubahan suhu udara dan ketersediaan curah hujan dalam kurun waktu musiman sangat mempengaruhi produktivitas dari aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut.

Pada tahun 2023, rata-rata suhu tertinggi di wilayah Provinsi Banten tercatat di Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan sebesar 32,70C pada bulan Oktober 2023 dan rata-rata suhu terendah tercatat di stasiun Meteorologi Budiarto Kabupaten Tangerang sebesar 26,20C pada bulan Februari 2023. Tempat - tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sementara itu, Curah hujan tertinggi selama tahun 2023 (jumlah curah hujan dari dua belas bulan) tercatat di Stasiun Meteorologi Budiarto Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 1.766,60 mm/tahun dan hari hujan terbanyak juga tercatat di Stasiun Meteorologi Budiarto Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 170 hari (jumlah hari hujan dalam dua belas bulan).

Tabel 7. 3. Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Provinsi Banten Tahun 2023

Bulan	Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan		Stasiun Meteorologi Serang		Stasiun Meteorologi Curug		Stasiun Geofisika Tangerang	
	Curah hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	109	15	149	27	80	17	83	18
Februari	448	25	311	24	244	25	386	25
Maret	261	20	277	18	233	19	278	20
April	77	13	130	12	125	19	129	14
Mei	91	14	69	7	79	14	70	12
Juni	125	15	151	17	278	14	156	11
Juli	54	8	89	9	171	11	99	8
Agustus	4	2	0	0	79	3	2	1
September	30	3	1	3	0	4	2	1
Oktober	13	2	0	3	13	5	25	2
November	227	15	138	14	308	21	139	12
Desember	222	15	78	12	157	14	89	10

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Banten, 2024

Pada umumnya Jumlah Curah Hujan Bulanan pada tahun 2023 di Stasiun Klimatologi Banten secara umum lebih rendah dibandingkan dengan nilai normalnya (1991-2020). Jumlah Curah Hujan Bulanan tertinggi tercatat pada bulan Februari 2023 dengan nilai 448 mm sedangkan Jumlah Curah Hujan Bulanan terendah tercatat pada bulan Agustus 2023 dengan nilai 4 mm seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 7. 1. Perbandingan Curah Hujan Bulanan Tahun 2023 dengan Normalnya



Sumber: BMKG Stasiun Klimatologi Banten, 2024

Berdasarkan data curah hujan yang diterima dari Stasiun/Pos hujan di Provinsi Banten, maka analisis curah hujan tahun 2023 dapat diinformasikan pada tabel berikut.

Tabel 7. 4. Analisis Curah Hujan di Provinsi Banten Tahun 2023

CURAH HUJAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
Rendah (0-100 mm)	Kabupaten Pandeglang	Carita
	Kabupaten Serang	Anyer, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Ciruas, Kasemen, Kibin, Kramatwatu, Pontang, Puloampel, Tanara, Tirtayasa, Waringinkurung
	Kota Tangerang	Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jati Uwung, Karang Tengah, Karawaci, Periuk, Pinang, Tangerang
	Kota Cilegon	Cibeber, Cilegon, Citangkil, Ciwadan, Grogol, Jombang, Pulomerak, Purwakarta
	Kota Serang	Cipocokjaya, Kasemen, Serang, Taktakan, Walantaka
	Kota Tangerang Selatan	Pondok aren, Serpong Utara
Menengah (101-300 mm)	Kabupaten Pandeglang	Angsana, Banjar, Bojong, Cadasari, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, Cikedal, Cikeusik, Cimanggu, Cimanuk, Cipeucang, Cisata, Jiput, Kaduhejo, Koroncong, Labuhan, Majasari, Mandalawangi, Mekar Jaya, Menes, Munjul, Pagelaran, Panimbang, Patia, Picung, Saketi, Sobang, Sukaresmi, Sumur
	Kabupaten Serang	Bandung, Baros, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Gunungsari, Jawilan, Kopo, Kragilan, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, TenjungTeja
	Kota Tangerang	Balaraja, Cisauk, Cisoka, Curug, Jambe, Legok, Pagedangan, Panongan, Solear, Tigaraksa
	Kota Cilegon	Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cirinten, Curug Bitung, Gunung Kencana, Kalanganyar, Leuwidamar, Maja, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Sarija, Sobang, Wanasalam, Warung Gunung
	Kota Serang	Curug
	Kota Tangerang Selatan	Ciputat, Pamulang, Serpong, Setu

7.3 Kehilangan Produksi Akibat Banjir, Kekeringan, dan OPT

Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan/atau penularan hama oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Kehilangan produksi lebih banyak disebabkan oleh tanaman rusak (puso). Luas tanaman rusak/tidak berhasil (Puso) adalah tanaman yang mengalami serangan organisme pengganggu tanaman atau bencana alam sedemikian rupa sehingga tanaman tersebut mengalami penurunan produksi lebih besar atau sama dengan 90 persen dibandingkan dengan keadaan normal, termasuk tanaman yang sengaja dirusak sebelum waktu dipanen karena organisme pengganggu tanaman, untuk makanan ternak dan sebagainya.

Tabel 7. 5 Luas Puso Akibat Serangan OPT Dan DPI Pada Tanaman Padi Di Provinsi Banten Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	OPT (Ha)	Banjir (Ha)	Kekeringan (Ha)
1	Pandeglang	63	719	59
2	Lebak	3	115	25
3	Tangerang	6	490,64	127
4	Serang	16	678	86
5	Kota Tangerang	0	0	0
6	Kota Cilegon	0	0	0
7	Kota Serang	2	90,3	7
8	Kota Tangerang Selatan	0	0	0
Jumlah		90	2.092,94	304

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat puso seluas 2.092,94 ha yang diakibatkan oleh bencana banjir, dan 90 ha yang diakibatkan oleh OPT dan 304 ha diakibatkan oleh kekeringan. Puso terluas pada tahun 2023 terdapat di Kabupaten Pandeglang dengan luas puso 841 ha. Hal ini berkaitan erat dengan potensi bencana banjir yang tinggi di wilayah tersebut. Sedangkan Puso yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman terdapat dengan luas sebesar 63 ha sebagian besar disebabkan oleh 5 OPT utama meliputi PBP, WBC, Tikus, BLB, dan Blas.

BAB 8

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu dalam memahami aspek-aspek mana saja yang mempengaruhi ketahanan dan kerentanan pangan di setiap Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Kecamatan, dan dengan demikian akan mempermudah para pengambil kebijakan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

8.1 Rekomendasi Lokasi Fokus Program dan Intervensi

Berdasarkan karakteristik daerah rentan rawan pangan dalam FSVA 2024, maka rekomendasi fokus pengentasan kerentanan pangan di Provinsi Banten diprioritaskan pada lokasi berikut.

1. Kecamatan-kecamatan rentan pangan yang tersebar di Kabupaten Lebak (7 Kecamatan), Kabupaten Tangerang (6 Kecamatan) Kabupaten Pandeglang (5 Kecamatan), dan Kabupaten Serang (3 Kecamatan).
2. Kecamatan-Kecamatan yang memiliki produktivitas pangan rendah dan keterbatasan lahan yang diakibatkan alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman atau industri serta Kecamatan yang terletak di daerah pesisir.
3. Kecamatan-Kecamatan perbatasan/pemekaran/memiliki lokasi yang relatif jauh dari pusat ibukota Kabupaten/Kota serta infrastruktur dan SDMnya masih terbatas secara kualitas maupun kuantitas.
4. Kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi dan daya beli terbatas.
5. Kecamatan-kecamatan yang memiliki akses air bersih rendah
6. Kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase pendidikan perempuan yang usia diatas 15 tahun rendah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang.
7. Kecamatan-kecamatan yang memiliki angka kesakitan tinggi dan kesadaran ke fasilitas kesehatan yang rendah.
8. Kecamatan-kecamatan yang sering dilanda kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan memiliki puso yang tinggi.

8.2 Rekomendasi Program dan Intervensi

Intervensi pada daerah rentan rawan pangan didasarkan pada faktor yang menjadi penyebab kerentanan pangan. Jika permasalahan disebabkan oleh faktor ketersediaan, maka perlu upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan, baik melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, maupun perbaikan pada sistem perdagangan antar wilayah serta perencanaan impor apabila benar-benar diperlukan dengan memperhatikan dengan seksama kepentingan produsen dan konsumen. Permasalahan pada akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan penyediaan lapangan kerja atau jaring pengaman sosial. Keterbatasan infrastruktur dapat diatasi dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan gudang untuk penyimpanan stok pangan serta penyempurnaan sistem logistik dan distribusi pangan. Masalah kesehatan dan gizi diatasi dengan penyuluhan tentang gizi, sosialisasi pentingnya konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan serta pemerataan tenaga kesehatan. Sementara itu, penanganan kerentanan pangan transien yang disebabkan bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial dapat dilakukan melalui intervensi penyaluran cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan/atau program pasca bencana untuk meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Kerangka pengentasan daerah rentan rawan pangan secara detail disajikan pada gambar berikut.

Gambar 8. 1. Kerangka Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan



Program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama (indikator) kerentanan pangan yang ditinjau dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

1. Aspek Ketersediaan

Permasalahan utama yaitu terbatasnya jumlah produksi untuk mencukupi permintaan konsumsi penduduk yang disebabkan oleh keterbatasan lahan, direkomendasikan program dan kegiatan:

- a. Meningkatkan kapasitas produksi dan penyediaan pangan dengan mendorong produksi pangan yang aman dan sesuai dengan potensi biodiversitas pangan serta kearifan lokal di masing-masing wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan.
- b. Peningkatan Jalur Distribusi Pangan di wilayah urban untuk meningkatkan kelancaran perdagangan antarwilayah.
- c. Pengadaan cadangan pangan desa untuk wilayah plural melalui pengembangan dan penguatan lumbung pangan masyarakat; terutama pada kabupaten yang sering mengalami gangguan akses pangan dan wilayah yang bukan sentra produksi pangan.
- d. Peningkatan bantuan pangan pemerintah.
- e. Kajian dan penelitian untuk peningkatan ketersediaan pangan

2. Aspek Keterjangkauan

Permasalahan utama yaitu terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan, direkomendasikan program dan kegiatan :

- a. Penyediaan Lapangan Kerja melalui peningkatan kegiatan ekonomi wilayah.
- b. Peningkatan Stabilitas Pangan sehingga pangan terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui pemerataan ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah termasuk daerah rentan pangan dan penerapan kebijakan harga pangan dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen.
- c. Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan.
- d. Peningkatan akses permodalan melalui Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan..
- e. Penyaluran bantuan sosial (tunai dan/atau pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana (alam dan sosial). Jenis bantuan pangan yang disalurkan untuk memenuhi gizi masyarakat dengan memperhatikan bahan pangan lokal.
- f. Pembangunan infrastruktur dasar (terutama berupa jalan usahatani, irigasi, listrik, jaringan internet) untuk meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah.

3. Aspek Pemanfaatan

Permasalahan utama yaitu terbatasnya akses terhadap air bersih, tingkat pendidikan perempuan yang rendah, dan angka kesakitan yang tinggi, direkomendasikan program dan kegiatan:

- a. Pembangunan infrastruktur dasar layanan air bersih.
- b. Peningkatan program pendidikan Perempuan dan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan serta peningkatan infrastruktur pendidikan.

- c. Penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak serta peningkatan konsumsi pangan (B2SA).
- d. Peningkatan partisipasi vaksin /imunisasi, fasilitasi sanitasi lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kecamatan seperti digambarkan pada Gambar berikut.

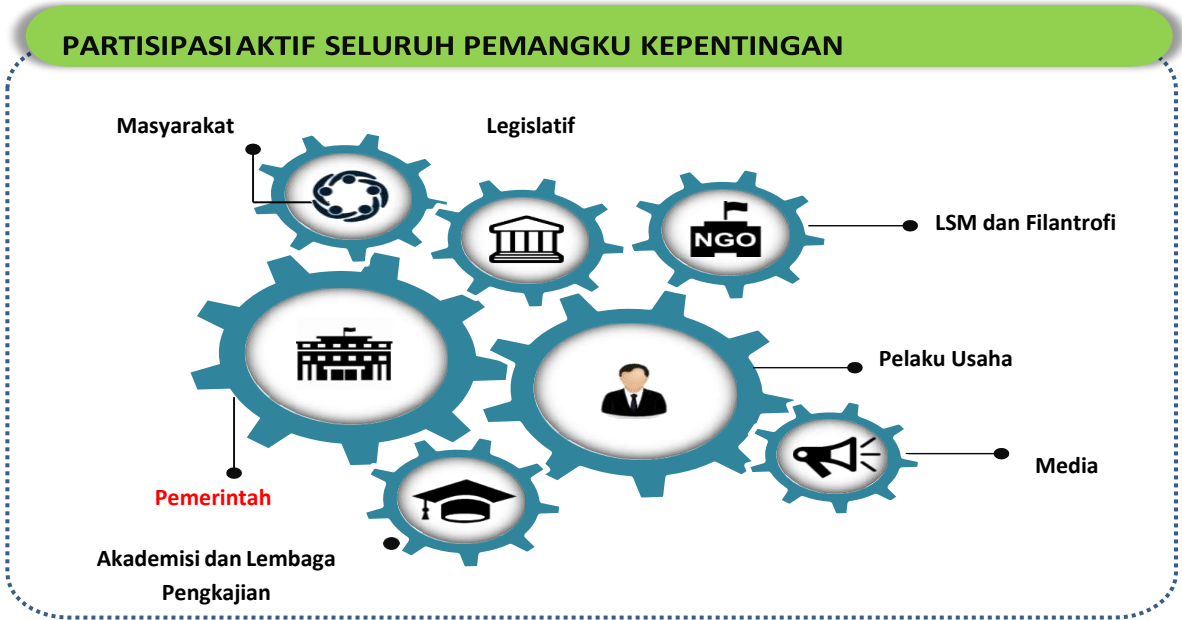
Gambar 8. 2. Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



8.3 Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilakukan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan sesuai amanat UU Pangan No. 18 Tahun 2012. Sementara kondisi kerentanan pangan dan gizi di suatu wilayah disebabkan oleh permasalahan yang bersifat multi sektor dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas di pusat dan daerah) yang bersinergi dalam bentuk program yang koheren.

Gambar 8. 3. Peran Aktif Pemangku Kepentingan dalam Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan



Upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan dan peningkatan ketahanan pangan secara umum ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan dan pelibatan lintas sektor. Dibutuhkan kerjasama antar lintas program dan lintas sektor baik di tingkat pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengentasan daerah rentan rawan pangan. Adapun pembagian kewenangan dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 8. 1. Pembagian Kewenangan dalam Upaya Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

Permasalahan	Upaya	Instansi Terkait
Ketersediaan Pangan		
Kapasitas produksi yang tidak mencukupi permintaan konsumsi penduduk	Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Penyediaan Pangan	Dinas Pertanian
	Peningkatan jalur distribusi pangan di wilayah urban	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Perhubungan
	Pengadaan cadangan pangan desa	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian 3. BUMN/BUMD
	Peningkatan bantuan pangan pemerintah	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Kajian dan penelitian untuk peningkatan ketersediaan pangan	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian 3. Akademisi
Akses Pangan		
Daya beli terbatas karena kemiskinan	Penyediaan Lapangan Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dinas Koperasi dan UMKM

Permasalahan	Upaya	Instansi Terkait
		4. Swasta/BUMN
	Peningkatan Stabilitas Pangan	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. BUMN Pangan
	Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan akses permodalan	1. Dinas Koperasi dan UMKM 2. Dinas Ketahanan Pangan
	Penyaluran bantuan sosial	1. Dinas Sosial 2. Dinas Ketahanan Pangan
	Pembangunan infrastruktur dasar (Jalan, irigasi, listrik, jaringan internet, dll)	1. DPUPR 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. DPRKP 5. DPMD 6. DESDM 7. Dinas Komunikasi dan Informasi 8. Swasta/BUMN
Pemanfaatan Pangan		
Terbatasnya akses terhadap air bersih, dan sanitasi	Pembangunan infrastruktur dasar layanan air bersih	1. DPUPR 2. DPRKP 3. DPMD
Tingkat pendidikan perempuan yang rendah	Peningkatan program pendidikan Perempuan dan partisipasi perempuan dalam program wajib belajar dan program kejar paket/pendidikan kesetaraan melalui penyuluhan, fasilitasi dan dukungan anggaran pendidikan serta peningkatan infrastruktur pendidikan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. DP3AKKB 3. DPMD
Pemanfaatan Pangan		
Tingginya angka kesakitan	1. Peningkatan partisipasi vaksin /imunisasi, fasilitasi sanitasi lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi dan higienitas lingkungan 2. Penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak serta peningkatan konsumsi pangan (B2SA)	1. Dinas Kesehatan 2. DP3AKKB 3. DPMD

Upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan juga harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak baik swasta/BUMN, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar program pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat dilakukan secara masif dan terarah sampai tingkat administrasi terendah. Sinergi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir program.

BAB 9

INDEKS KETAHANAN PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan 2024 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Tabel 9.1. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2024

Peringkat	Kabupaten	Kecamatan	IKP
1	Serang	Binuang	95.91
2	Serang	Lebak Wangi	94.92
3	Serang	Ciruas	94.81
4	Serang	Kramatwatu	93.62
5	Serang	Kibin	92.48
6	Serang	Pontang	91.91
7	Serang	Tanara	90.22
8	Serang	Carenang	90.09
9	Serang	Bojonegara	89.60
10	Serang	Tirtayasa	87.24
11	Serang	Kragilan	86.82
12	Serang	Pulo Ampel	83.81
13	Serang	Cikande	83.61
14	Pandeglang	Sobang	81.62
15	Lebak	Bayah	81.50
16	Serang	Cikeusal	80.92
17	Tangerang	Gunung Kaler	79.99
18	Serang	Bandung	79.72
19	Tangerang	Kronjo	79.00
20	Serang	Jawilan	78.80
21	Lebak	Cibadak	78.38
22	Lebak	Rangkasbitung	78.16
23	Lebak	Cibeber	78.14
24	Lebak	Warunggunung	77.86
25	Tangerang	Balaraja	77.47
26	Pandeglang	Menes	77.32
27	Tangerang	Mauk	76.95
28	Tangerang	Kresiek	76.08
29	Lebak	Maja	75.77
30	Pandeglang	Sumur	75.66
31	Lebak	Kalanganyar	75.47
32	Serang	Padarincang	75.45
33	Tangerang	Mekar Baru	75.39
34	Tangerang	Jayanti	75.38
35	Tangerang	Sukadiri	75.24
36	Tangerang	Paku haji	74.86
37	Pandeglang	Pagelaran	74.54
38	Lebak	Lebakgedong	74.07
39	Lebak	Cihara	73.94
40	Pandeglang	Sukaesmi	73.27
41	Pandeglang	Saketi	73.25
42	Pandeglang	Panimbang	73.12
43	Serang	Anyar	73.05
44	Tangerang	Jambe	72.78
45	Pandeglang	Pandeglang	72.71
46	Serang	Petir	72.65
47	Lebak	Cikurur	72.39
48	Pandeglang	Jiput	72.20
49	Pandeglang	Karangtanjung	72.06
50	Pandeglang	Mekarjaya	72.03
51	Serang	Tunjung Teja	71.85
52	Tangerang	Sukamulya	71.71
53	Tangerang	Kemiri	71.53
54	Tangerang	Sepatan	71.52
55	Tangerang	Sindang Jaya	71.12
56	Serang	Pamarayan	70.98
57	Pandeglang	Labuan	70.37
58	Tangerang	Rajeg	69.98
59	Pandeglang	Banjar	69.65
60	Pandeglang	Picung	69.44
61	Serang	Waringinkurung	69.40
62	Serang	Pabuaran	69.22
63	Tangerang	Pasarkemis	68.90
64	Pandeglang	Patia	68.84
65	Pandeglang	Mandalawangi	68.84
66	Tangerang	Solear	68.74
67	Tangerang	Kosambi	68.54
68	Lebak	Cigemblong	68.03
69	Pandeglang	Cisata	67.70
70	Tangerang	Kelapa Dua	66.70
71	Pandeglang	Munjul	66.57
72	Serang	Baros	66.57
73	Pandeglang	Cigeulis	66.56
74	Tangerang	Cisoka	66.31
75	Lebak	Gunung Kencana	65.94
76	Pandeglang	Cimanggu	65.92
77	Lebak	Cipanas	65.48
78	Pandeglang	Angsana	65.48
79	Lebak	Bojongmanik	65.27
80	Pandeglang	Koroncong	65.14

Peringkat	Kabupaten	Kecamatan	IKP
81	Pandeglang	Sindangresmi	64.51
82	Pandeglang	Cipeucang	64.49
83	Lebak	Cijaku	64.43
84	Lebak	Cilograng	64.26
85	Serang	Cinangka	64.20
86	Pandeglang	Cibaliung	64.14
87	Lebak	Cirinten	64.12
88	Serang	Kopo	63.98
89	Lebak	Cimarga	63.48
90	Pandeglang	Pulosari	63.07
91	Pandeglang	Cikeusik	63.04
92	Lebak	Panggarangan	62.99
93	Lebak	Sobang	62.73
94	Tangerang	Teluknaga	62.68
95	Pandeglang	Cibitung	62.58
96	Tangerang	Curug	62.15
97	Tangerang	Legok	62.08
98	Lebak	Wanasalam	62.04
99	Pandeglang	Cikedal	61.11
100	Pandeglang	Bojong	61.01
101	Serang	Mancak	60.63

Peringkat	Kabupaten	Kecamatan	IKP
102	Lebak	Cileles	60.54
103	Lebak	Malingping	60.51
104	Lebak	Curugbitung	60.17
105	Pandeglang	Carita	59.84
106	Tangerang	Cikupa	59.63
107	Serang	Ciomas	59.53
108	Pandeglang	Kaduhejo	59.13
109	Lebak	Sajira	59.07
110	Lebak	Banjarsari	58.92
111	Pandeglang	Cimanuk	58.70
112	Tangerang	Sepatan Timur	55.74
113	Pandeglang	Cadasari	55.70
114	Tangerang	Tigaraksa	55.66
115	Serang	Gunung Sari	55.10
116	Lebak	Muncang	53.95
117	Lebak	Leuwidamar	53.93
118	Pandeglang	Majasari	50.53
119	Tangerang	Panongan	50.08
120	Tangerang	Cisauk	49.43
121	Tangerang	Pagedangan	48.25

Pada wilayah kabupaten, Indeks Ketahanan Pangan tertinggi terdapat di Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dengan skor 95,91 dan indeks ketahanan pangan terendahnya terdapat di Kecamatan Pagedangan Kabupaten tangerang dengan nilai indeks sebesar 48,25. Sedangkan pada wilayah kota, indeks ketahanan pangan tertinggi terdapat di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dengan skor 95,91 dan indeks ketahanan pangan terendahnya terdapat di Kecamatan Curug Kota Serang dengan skor 42,98.

Tabel 9.2 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tahun 2024

Peringkat	Kota	Kecamatan	IKP
1	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	95.91
2	Kota Cilegon	Purwakarta	88.56
3	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	86.23
4	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	83.79
5	Kota Tangerang Selatan	Setu	83.49
6	Kota Tangerang Selatan	Serpong	81.30
7	Kota Cilegon	Cilegon	81.09
8	Kota Tangerang	Periuk	78.84
9	Kota Tangerang	Batuceper	78.81

Peringkat	Kota	Kecamatan	IKP
10	Kota Tangerang	Cibodas	78.71
11	Kota Tangerang	Karawaci	78.64
12	Kota Cilegon	Cibeber	78.40
13	Kota Cilegon	Jombang	78.21
14	Kota Tangerang	Tangerang	77.83
15	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	77.38
16	Kota Tangerang	Karang Tengah	77.20
17	Kota Tangerang	Benda	76.76
18	Kota Tangerang	Cipondoh	75.91

Peringkat	Kota	Kecamatan	IKP
19	Kota Tangerang	Larangan	74.95
20	Kota Tangerang	Pinang	74.01
21	Kota Tangerang	Ciledug	73.63
22	Kota Serang	Serang	71.14
23	Kota Cilegon	Grogol	70.73
24	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	69.18
25	Kota Tangerang	Neglasari	68.71
26	Kota Cilegon	Citangkil	65.03

Peringkat	Kota	Kecamatan	IKP
27	Kota Tangerang	Jati Uwung	64.73
28	Kota Cilegon	Pulomerak	61.67
29	Kota Serang	Cipocok Jaya	59.66
30	Kota Cilegon	Ciwandan	58.82
31	Kota Serang	Walantaka	48.38
32	Kota Serang	Kasemen	46.93
33	Kota Serang	Taktakan	43.84
34	Kota Serang	Curug	42.98

BAB 10

PENUTUP

FSVA menyediakan informasi untuk pelaksanaan program yang lebih bersifat preventif, yaitu memberikan indikasi awal bahwa di daerah-daerah (lokus) tertentu bisa saja terjadi kerawanan pangan apabila tidak segera dilakukan tindakan-tindakan yang relevan dan sistematis untuk pencegahan dan penanganannya.

Penyusunan FSVA tidak mungkin terwujud tanpa dukungan semua stakeholder di level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya kontribusi dari semua pemangku kepentingan, termasuk dari daerah, maka tidak akan dapat dihasilkan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan.

Update dan upgrade metodologi merupakan kebutuhan rutin yang terus dilakukan untuk menjamin tetap terjaganya kualitas hasil analisis dan layanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat. Akurasi peta juga terus ditingkatkan dengan mendetailkan pemetaan sampai tingkat desa, agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan stunting dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu, dengan FSVA, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan agar kejadian rawan pangan dapat segera diidentifikasi. Kolaborasi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan seluruh stakeholders serta masyarakat menjadi kunci untuk penanganan wilayah rentan rawan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abuya, B.A., James Ciera and Elizabeth Kimani-Murage. 2012. Effect of mother’s education on child’s nutritional status in the slums of Nairobi. BMC Pediatrics 12:80.

Azwar A. 2004. Aspek Kesehatan dan Gizi dalam Ketahanan Pangan. Dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII: Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Jakarta: BPS, Departemen Kesehatan, Badan POM, Bappenas, Departemen Pertanian dan Ristek.

Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme [BKP dan WFP]. 2010. Percontohan Monitoring Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG Plus). Jakarta : BKP dan WFP.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika [BMKG] Stasiun Klimatologi Banten. 2023. Buletin Klimatologi Provinsi Banten dan DKI Jakarta Tahun 2022. Tangerang Selatan: BMKG Stasiun Klimatologi Banten.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]. 2021. Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Banten 2022-2026. Jakarta: BNPB.

Badan Pangan Nasional. 2024. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024. Jakarta : Badan Pangan Nasional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Provinsi Banten. 2023. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Banten 2023-2027. Serang: BPBD Provinsi Banten.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Provinsi Banten. Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Banten Tahun 2023

Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Lebak. 2024. Kabupaten Lebak Dalam Angka 2024. Lebak : BPS Kabupaten Lebak.

Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Pandeglang. 2024. Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2024. Pandeglang : BPS Kabupaten Pandeglang.

Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Serang. 2024. Kabupaten Serang Dalam Angka 2024. Serang : BPS Kabupaten Serang.

Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Tangerang. 2024. Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024. Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik [BPS] Kota Cilegon. 2024. Kota Cilegon Dalam Angka 2024. Cilegon : BPS Kota Cilegon.

Badan Pusat Statistik [BPS] Kota Serang. 2024. Kota Serang Dalam Angka 2024. Serang: BPS Kota Serang.

Badan Pusat Statistik [BPS] Kota Tangerang Selatan. 2024. Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2024. Tangerang Selatan: BPS Kota Tangerang Selatan.

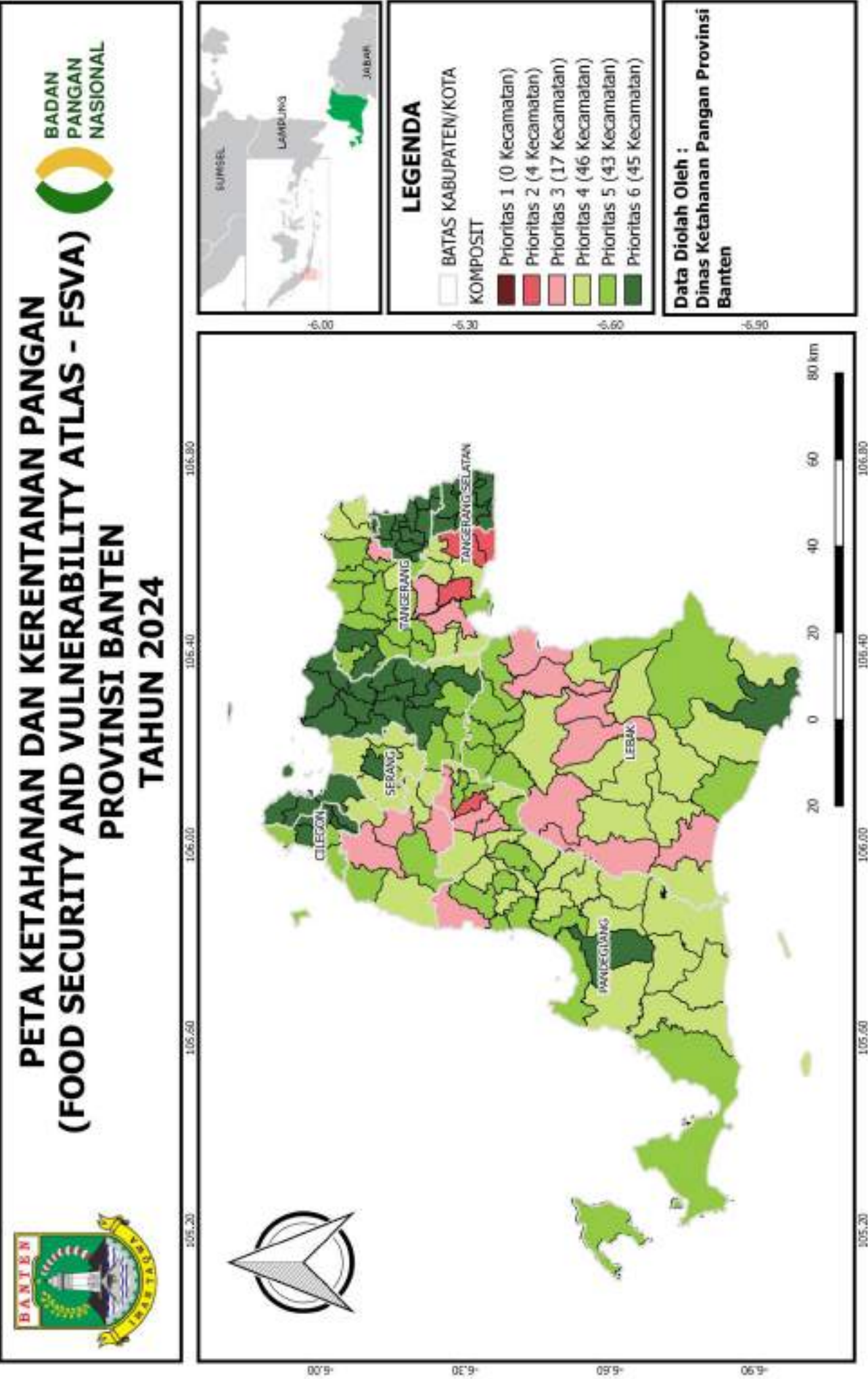
Badan Pusat Statistik [BPS] Kota Tangerang. 2024. Kota Tangerang Dalam Angka 2024. Tangerang : BPS Kota Tangerang.

Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2023. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2023. Serang: BPS Provinsi Banten.

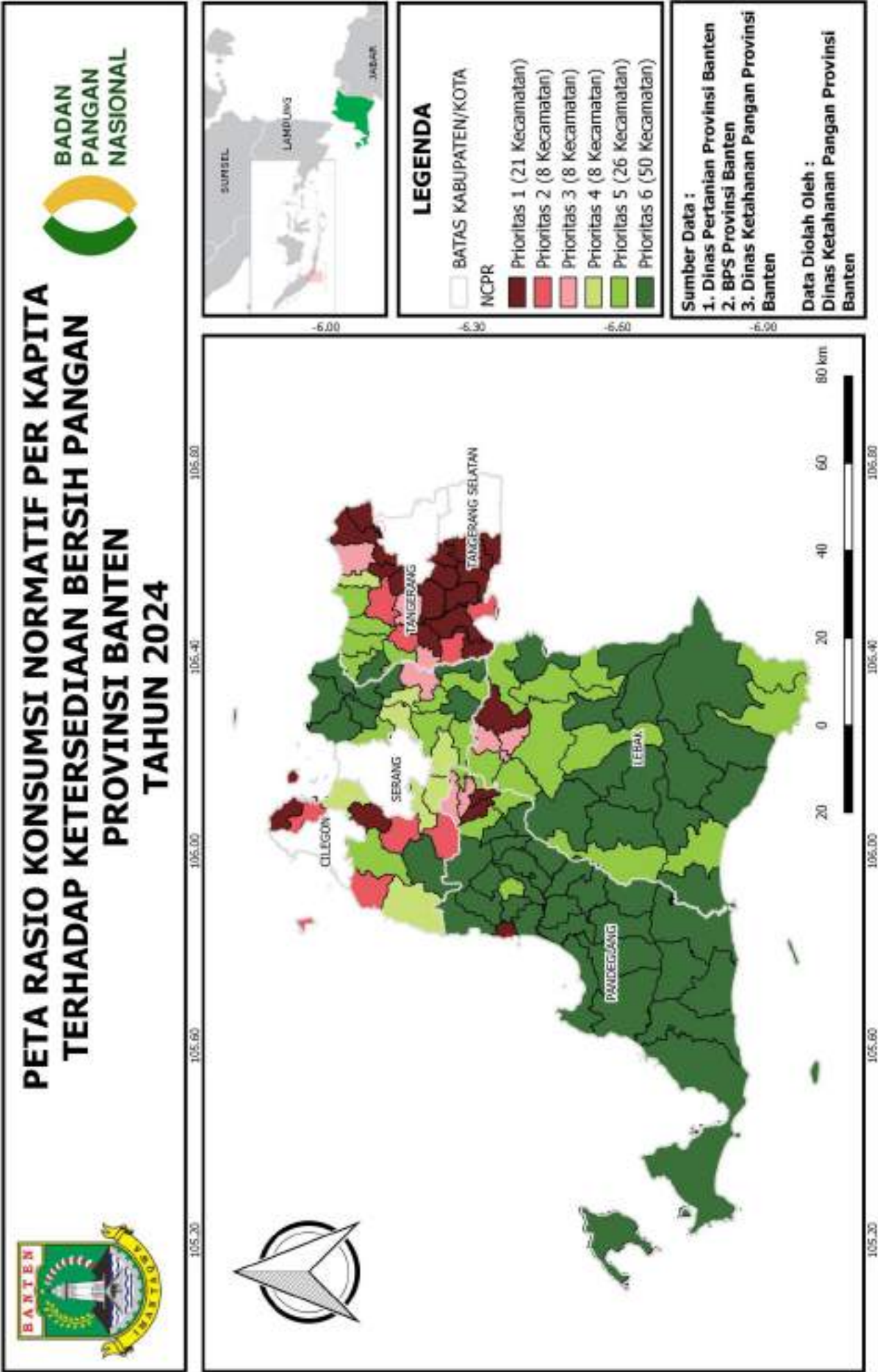
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2022. Keadaan Ketenagakerjaan Banten Agustus 2022. Berita Resmi Statistik No.56/11/36/Th. XVI, 7 November 2022. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2022. Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Provinsi Banten September 2022. Berita Resmi Statistik No.47/10/36/Th. XVI, 3 Oktober 2022. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2023. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2024. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Banten 2023. Serang : BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2024. Indikator Makro Provinsi Banten 2023. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2024. Indikator Pertanian Provinsi Banten 2023. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2024. Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Maret 2024. Serang : BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2024. Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Banten 2023 (Angka Tetap). Berita Resmi Statistik No.14/03/36/Th. XVIII, 1 Maret 2024. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2023. Profil Kemiskinan di Banten Maret 2024. Berita Resmi Statistik No.36/07/36/Th. XVIII, 1 Juli 2024. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2024. Profil Statistik Pertambangan dan Energi Provinsi Banten 2023. Serang : BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Provinsi Banten. 2024. Provinsi Banten Dalam Angka 2024. Serang: BPS Provinsi Banten.
- Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme [DKP dan WFP]. 2015. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta (ID): DKP dan WFP
- Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Data EPPGBM Stunting Tahun 2023
- Dinas Pertanian Provinsi Banten. Data Produksi Padi, jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar Provinsi Banten Tahun 2023.
- Dinas Pertanian Provinsi Banten. Data Puso Padi Tahun 2023
- Glewwe (2009): Pendidikan ibu terhadap kesejahteraan balita
- Kemenko PMK RI. Data P3KE Sebaran Keluarga dan Individu Status Kesejahteraan Desil 1 Tahun 2023.
- Sofiati EL. 2010. Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Kota Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- World Health Organization [WHO]. 2000. Classification of Severity of Malnutrition in a Community for Children Under 5 Years of Age from 'The Management of Nutrition in Major Emergencies'. Genewa: WHO

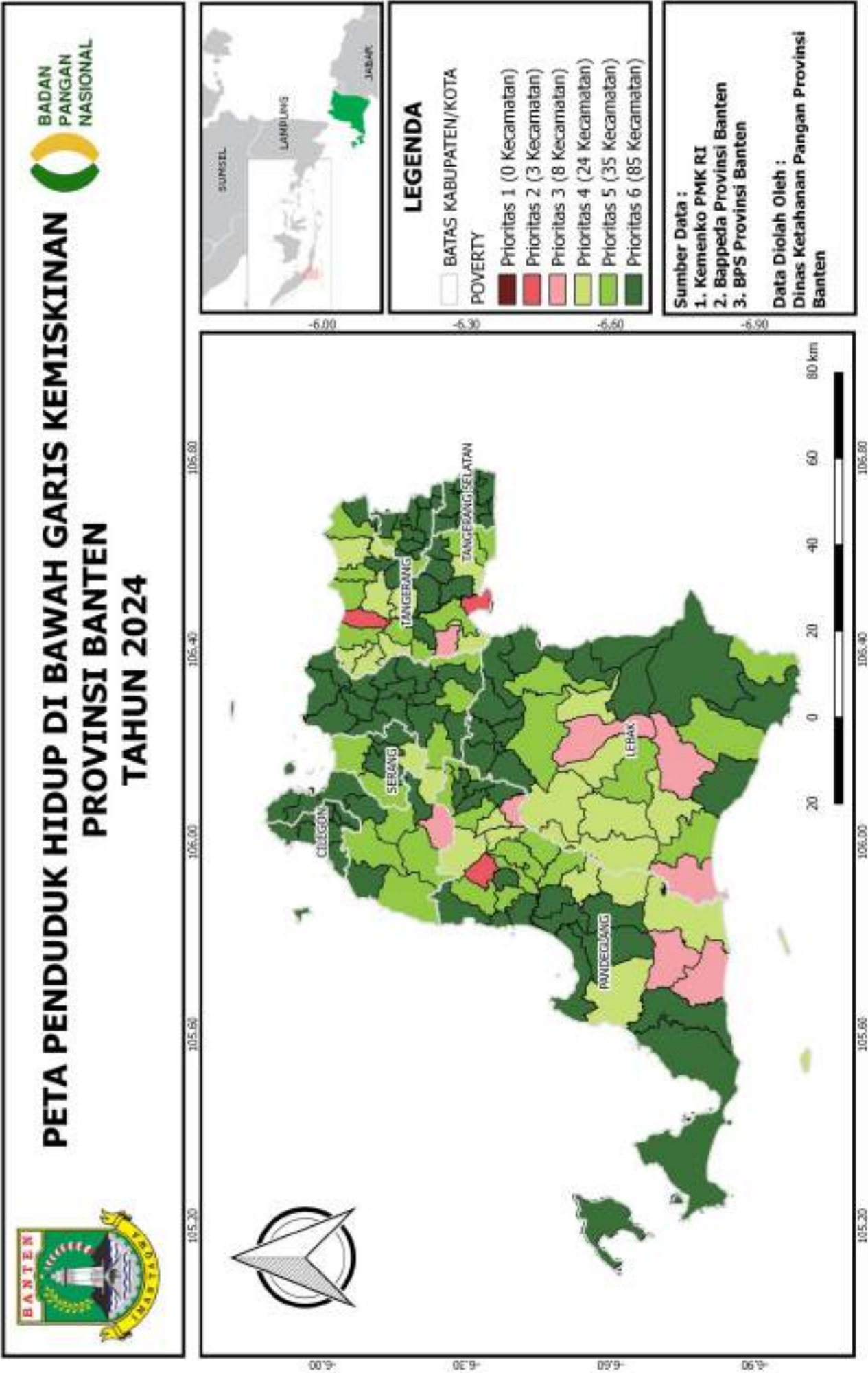
LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024

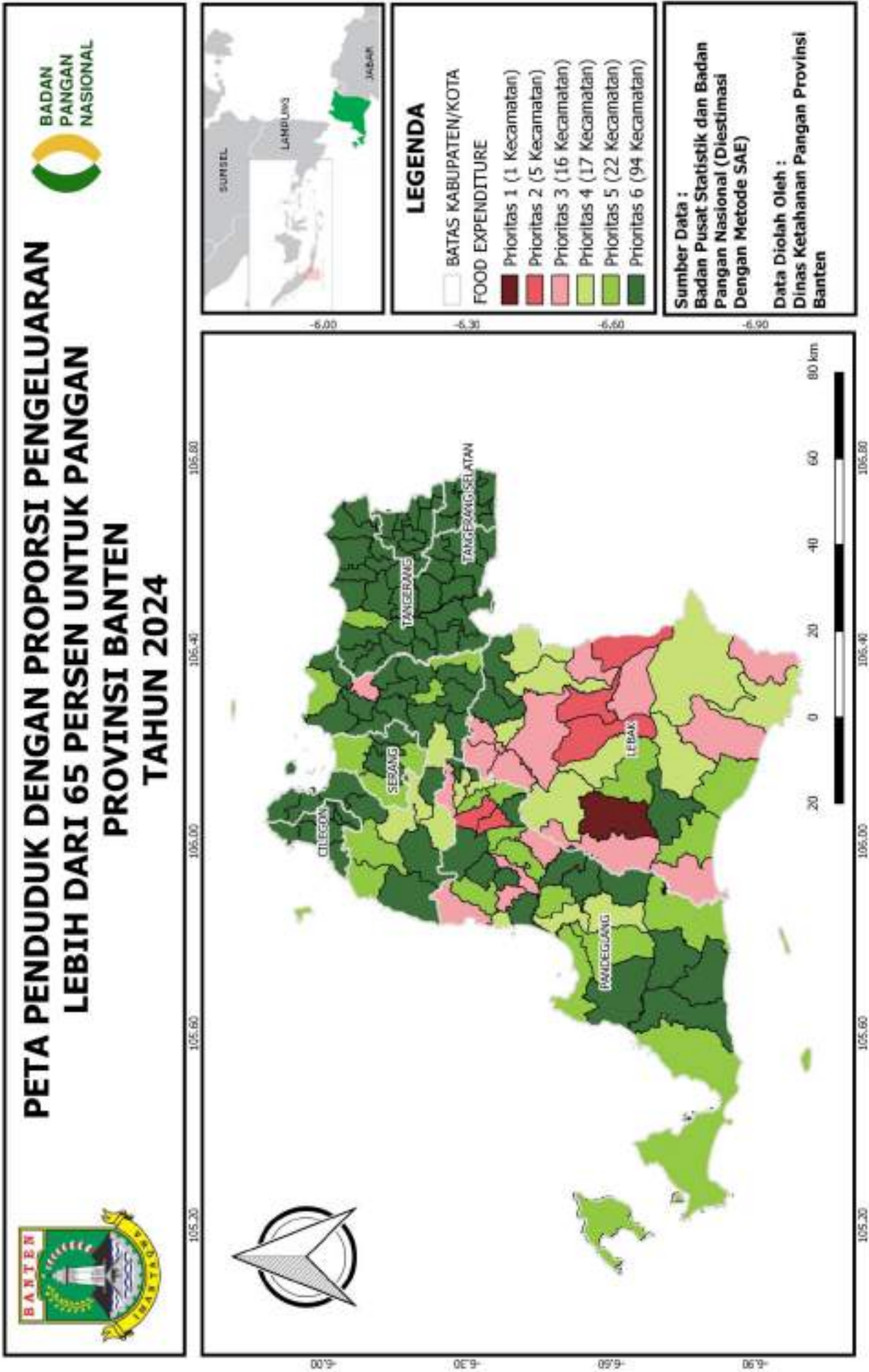


Lampiran 2. Peta Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Bersih Pangan Provinsi Banten Tahun 2024

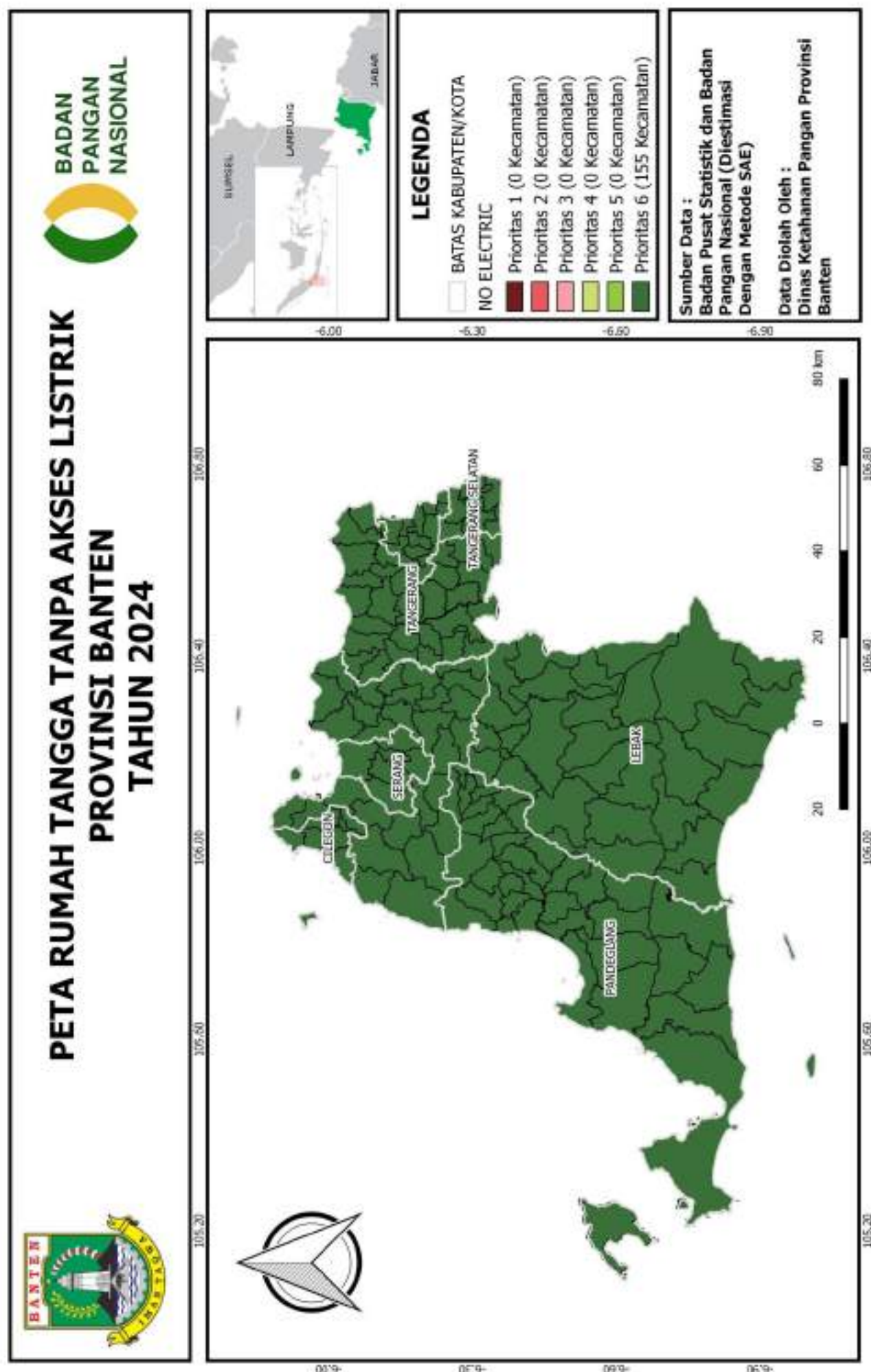




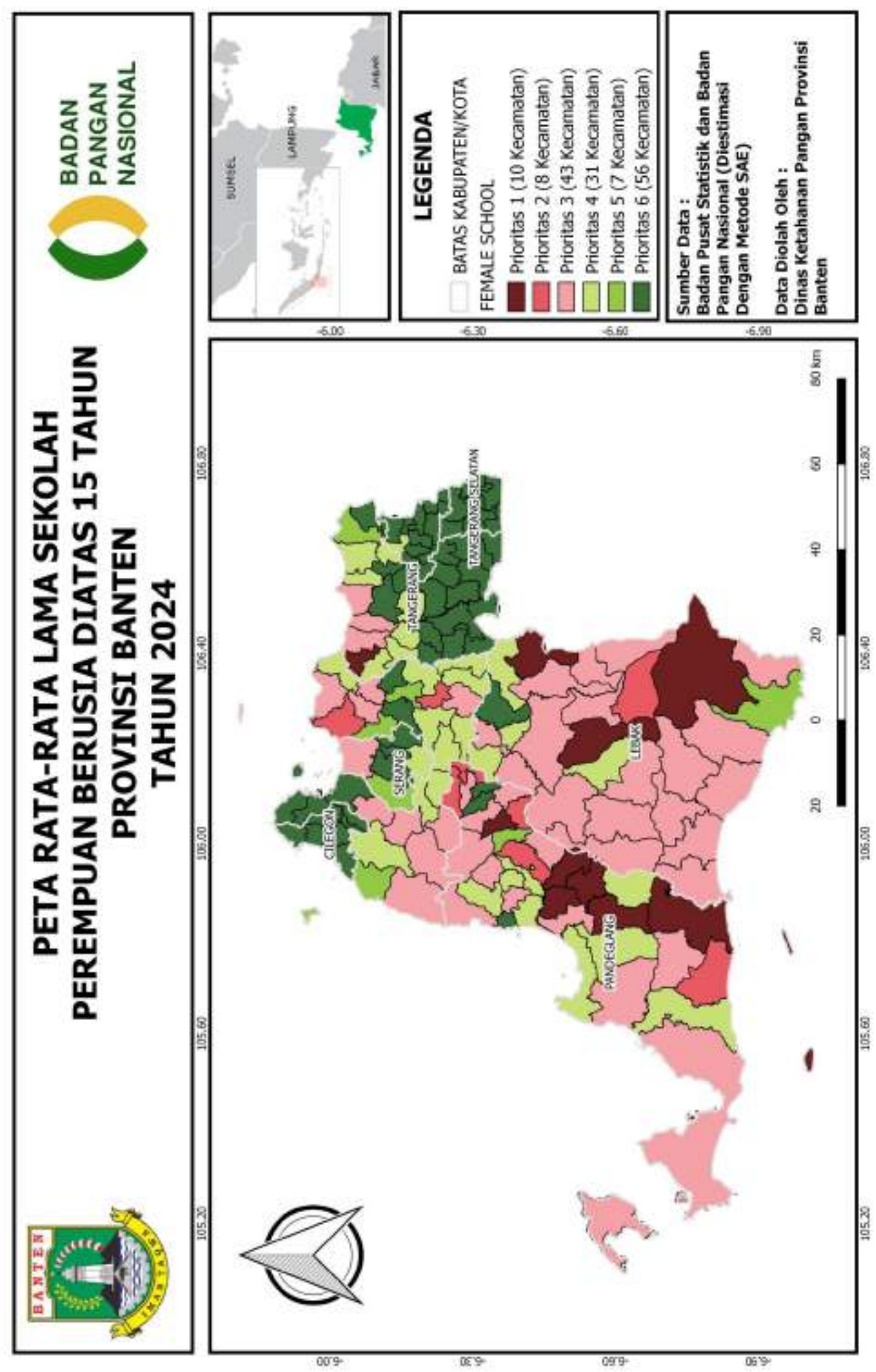
Lampiran 4. Peta Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran Provinsi Banten Tahun 2024



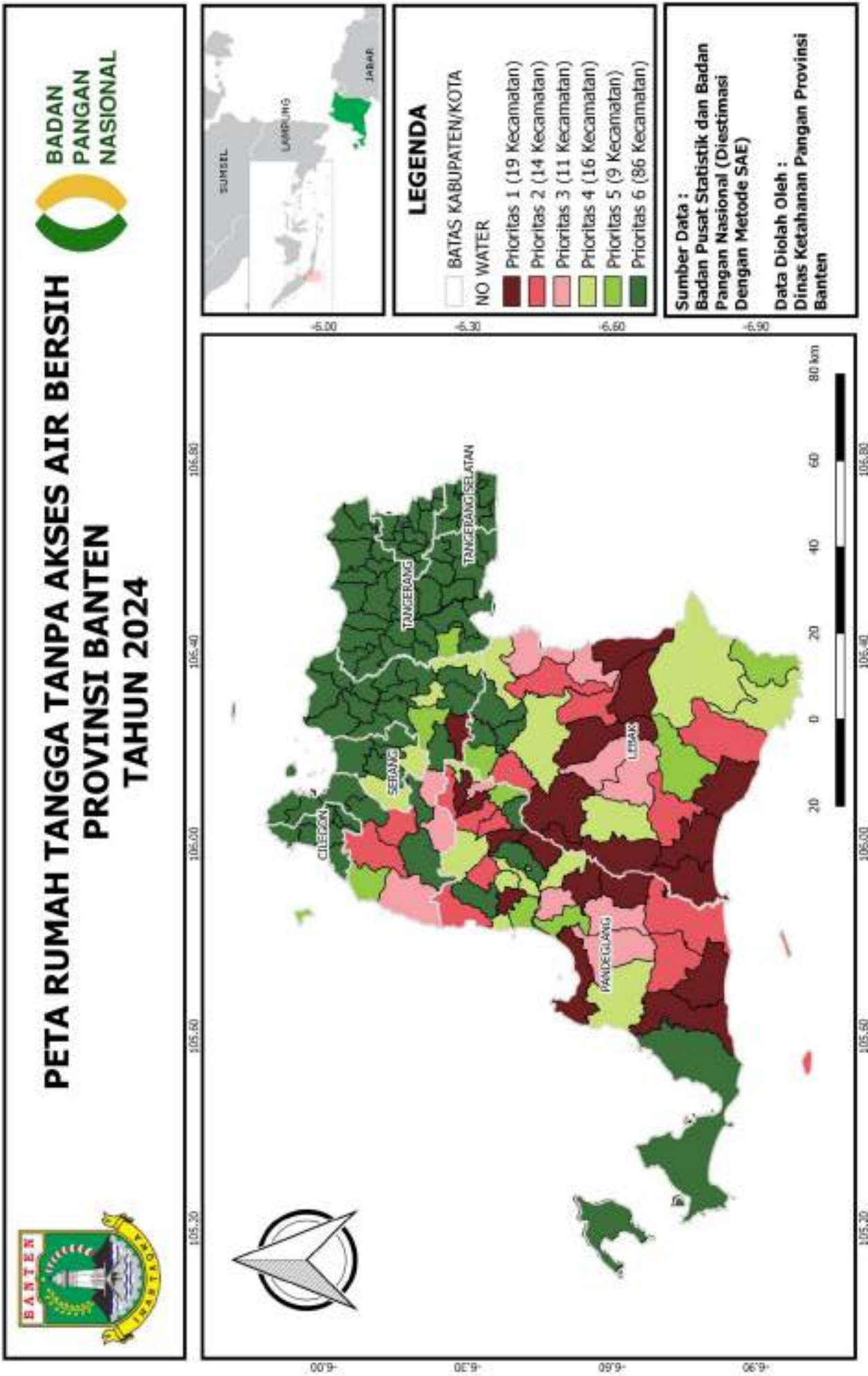
Lampiran 5. Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik Provinsi Banten Tahun 2024



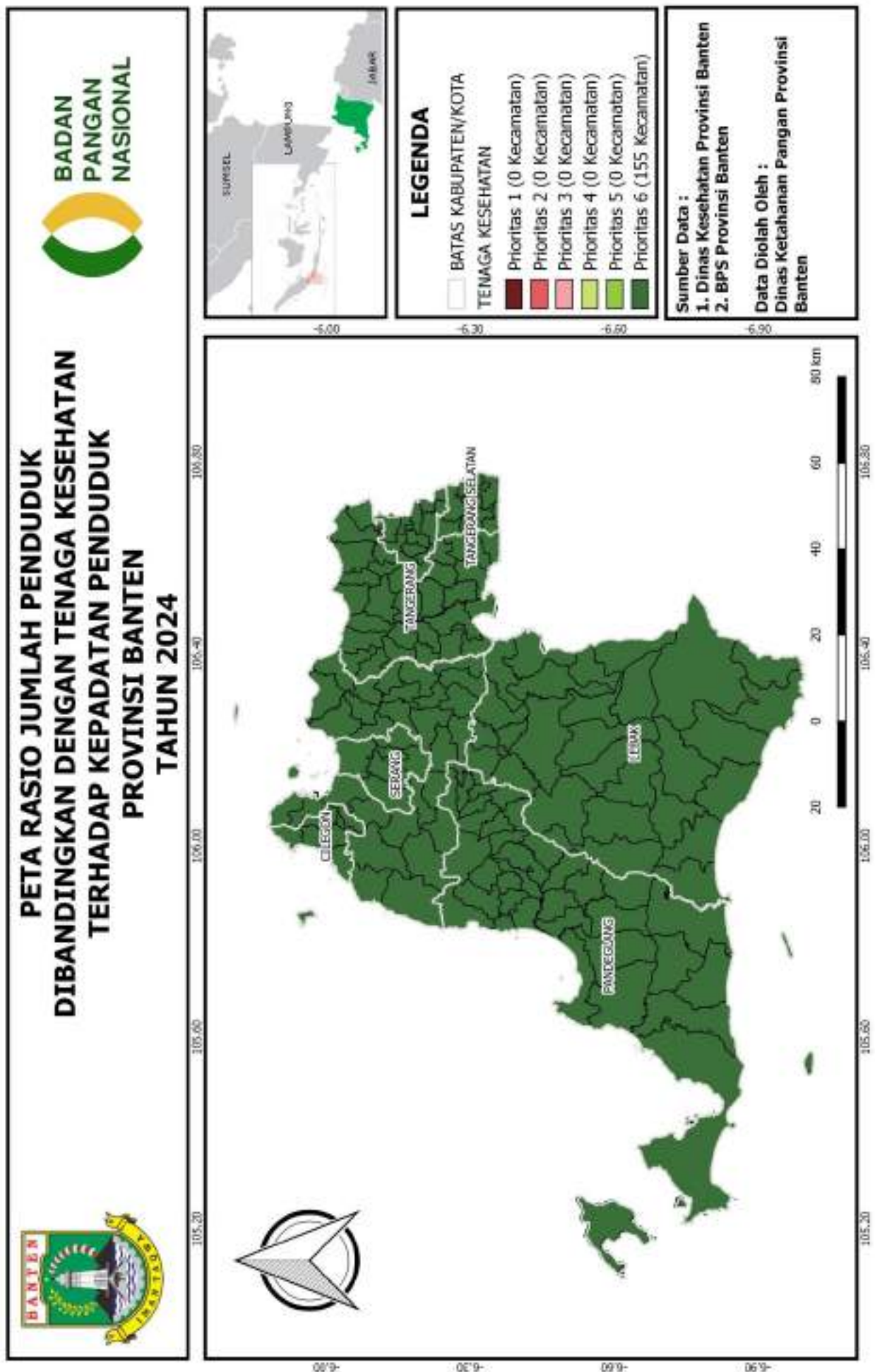
Lampiran 6. Peta Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Berusia Di Atas 15 Tahun Provinsi Banten
Tahun 2024



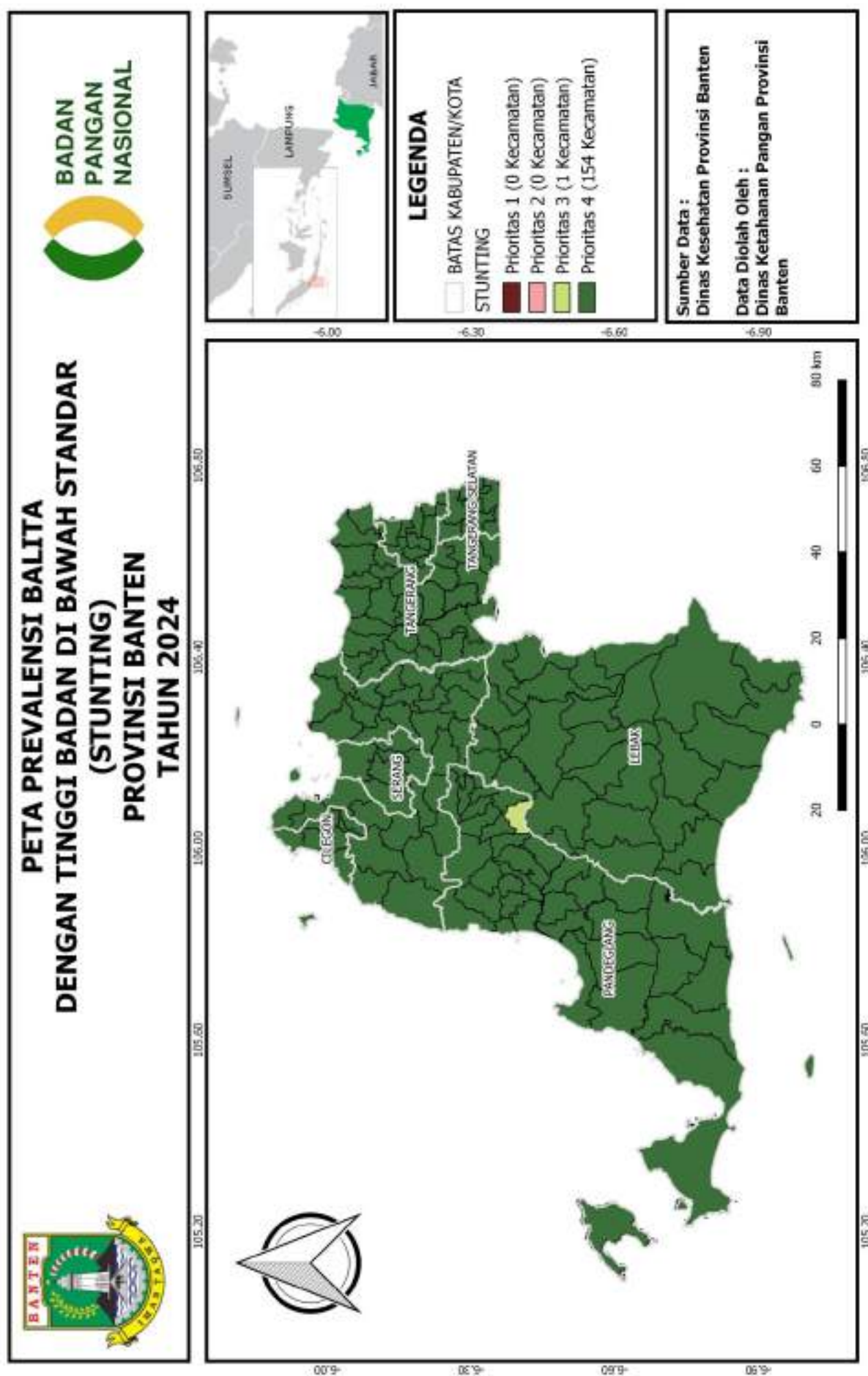
Lampiran 7. Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Provinsi Banten Tahun 2024



Lampiran 8. Peta Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2024



Lampiran 9. Peta Prevalensi Balita Dengan Tinggi Badan Dibawah Standar / Tinggi Badan Kurang (Stunting) Provinsi Banten Tahun 2024



Lampiran 11. Hasil Analisis FSVA Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec	Nama Kecamatan	1. Prioritas NCPR	2. Prioritas POVERTY	3. Prioritas FOOD EXPENDITURE >65%	4. Prioritas No ELECTRIC	5. Prioritas No WATER	6. Prioritas MOBIRDITY	7. Prioritas RASIO TENKES	8. Prioritas FEMALE SCHOOL	9. Prioritas STUNTING	INDEK KP KUMULATIF	PERINGKAT KP	PRIORITAS KOMPOSIT
1	Pandeglang	3601	3601010	Sumur	6	6	5	6	6	6	6	3	4	75.66	30	5
2	Pandeglang	3601	3601020	Cimanggu	6	6	6	6	1	6	6	4	4	65.92	76	4
3	Pandeglang	3601	3601030	Cibaliung	6	3	6	6	2	4	6	3	4	64.14	86	4
4	Pandeglang	3601	3601031	Cibitung	6	3	6	6	1	3	6	2	4	62.58	95	4
5	Pandeglang	3601	3601040	Cikeusik	6	4	5	6	2	4	6	1	4	63.04	91	4
6	Pandeglang	3601	3601050	Cigeulis	6	4	6	6	4	1	6	3	4	66.56	73	4
7	Pandeglang	3601	3601060	Panimbang	6	6	5	6	1	6	6	4	4	73.12	42	5
8	Pandeglang	3601	3601061	Sobang	6	6	5	6	3	1	6	4	4	81.62	14	6
9	Pandeglang	3601	3601070	Munjul	6	4	6	6	1	6	6	4	4	66.57	71	4
10	Pandeglang	3601	3601071	Angsana	6	6	4	6	3	3	6	1	4	65.48	78	4
11	Pandeglang	3601	3601072	Sindangresmi	6	4	6	6	1	2	6	1	4	64.51	81	4
12	Pandeglang	3601	3601080	Picung	6	5	6	6	4	2	6	1	4	69.44	60	4
13	Pandeglang	3601	3601090	Bojong	6	5	3	6	1	5	6	3	4	61.01	100	4
14	Pandeglang	3601	3601100	Saketi	6	5	5	6	6	6	6	2	4	73.25	41	5
15	Pandeglang	3601	3601101	Cisata	6	5	3	6	4	5	6	4	4	67.70	69	4
16	Pandeglang	3601	3601110	Pagelaran	6	6	6	6	5	4	6	4	4	74.54	37	5
17	Pandeglang	3601	3601111	Patia	6	6	5	6	3	2	6	1	4	68.84	64	4
18	Pandeglang	3601	3601112	Sukaresmi	6	6	4	6	5	2	6	3	4	73.27	40	5
19	Pandeglang	3601	3601120	Labuan	1	6	4	6	4	1	6	6	4	70.37	57	5
20	Pandeglang	3601	3601121	Carita	6	6	3	6	2	1	6	3	4	59.84	105	3
21	Pandeglang	3601	3601130	Jiput	6	5	5	6	6	1	6	4	4	72.20	48	5
22	Pandeglang	3601	3601131	Cikedal	6	5	3	6	1	6	6	3	4	61.11	99	4
23	Pandeglang	3601	3601140	Menes	5	6	6	6	4	5	6	4	4	77.32	26	5

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec	Nama Kecamatan	1. Prioritas NCPR	2. Prioritas POVERTY	3. Prioritas FOOD EXPENDITURE >65%	4. Prioritas No ELECTRIC	5. Prioritas No WATER	6. Prioritas MOBIRDITY	7. Prioritas RASIO TENKES	8. Prioritas FEMALE SCHOOL	9. Prioritas STUNTING	INDEK KP KUMULATIF	PERINGKAT KP	PRIORITAS KOMPOSIT
24	Pandeglang	3601	3601141	Pulosari	6	2	6	6	2	1	6	3	4	63.07	90	4
25	Pandeglang	3601	3601150	Mandalawangi	6	4	6	6	4	6	6	3	4	68.84	65	4
26	Pandeglang	3601	3601160	Cimanuk	6	4	2	6	2	1	6	1	4	58.70	111	3
27	Pandeglang	3601	3601161	Cipeucang	6	4	5	6	1	5	6	5	4	64.49	82	4
28	Pandeglang	3601	3601170	Banjar	5	6	5	6	5	4	6	3	4	69.65	59	4
29	Pandeglang	3601	3601171	Kaduhejo	5	5	2	6	2	6	6	3	4	59.13	108	3
30	Pandeglang	3601	3601172	Mekarjaya	6	3	6	6	6	2	6	2	3	72.03	50	5
31	Pandeglang	3601	3601180	Pandeglang	1	6	4	6	3	1	6	6	4	72.71	45	5
32	Pandeglang	3601	3601181	Majasari	1	6	5	6	1	1	6	6	4	50.53	118	2
33	Pandeglang	3601	3601190	Cadasari	3	5	3	6	2	2	6	2	4	55.70	113	3
34	Pandeglang	3601	3601191	Karangtanjung	3	6	4	6	1	5	6	3	4	72.06	49	5
35	Pandeglang	3601	3601192	Koroncong	5	5	6	6	4	1	6	2	4	65.14	80	4
36	Lebak	3602	3602010	Malingping	5	5	5	6	1	1	6	3	4	60.51	103	3
37	Lebak	3602	3602011	Wanasalam	6	3	3	6	1	4	6	3	4	62.04	98	4
38	Lebak	3602	3602020	Panggarangan	6	5	3	6	2	6	6	3	4	62.99	92	4
39	Lebak	3602	3602021	Cihara	6	6	5	6	1	1	6	3	4	73.94	39	5
40	Lebak	3602	3602030	Bayah	5	6	4	6	4	2	6	5	4	81.50	15	6
41	Lebak	3602	3602031	Cilograng	5	5	3	6	5	1	6	3	4	64.26	84	4
42	Lebak	3602	3602040	Cibeber	6	6	4	6	4	4	6	1	4	78.14	23	5
43	Lebak	3602	3602050	Cijaku	6	4	6	6	2	6	6	3	4	64.43	83	4
44	Lebak	3602	3602051	Cigemblong	6	3	4	6	5	2	6	3	4	68.03	68	4
45	Lebak	3602	3602060	Banjarsari	5	4	3	6	1	2	6	3	4	58.92	110	3
46	Lebak	3602	3602070	Cileles	6	4	4	6	1	5	6	3	4	60.54	102	3
47	Lebak	3602	3602080	Gunung Kencana	6	4	1	6	4	6	6	3	4	65.94	75	4
48	Lebak	3602	3602090	Bojongmanik	6	4	4	6	3	6	6	4	4	65.27	79	4

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec	Nama Kecamatan	1. Prioritas NCPR	2. Prioritas POVERTY	3. Prioritas FOOD EXPENDITURE >65%	4. Prioritas No ELECTRIC	5. Prioritas No WATER	6. Prioritas MOBIRDITY	7. Prioritas RASIO TENKES	8. Prioritas FEMALE SCHOOL	9. Prioritas STUNTING	INDEK KP KUMULATIF	PERINGKAT KP	PRIORITAS KOMPOSIT
49	Lebak	3602	3602091	Cirinten	6	5	5	6	3	5	6	3	4	64.12	87	4
50	Lebak	3602	3602100	Leuwidamar	5	3	2	6	1	1	6	1	4	53.93	117	3
51	Lebak	3602	3602110	Muncang	6	4	2	6	2	1	6	3	4	53.95	116	3
52	Lebak	3602	3602111	Sobang	6	6	3	6	1	3	6	2	4	62.73	93	4
53	Lebak	3602	3602120	Cipanas	5	6	3	6	3	1	6	3	4	65.48	77	4
54	Lebak	3602	3602121	Lebakgedong	6	6	2	6	1	3	6	3	4	74.07	38	5
55	Lebak	3602	3602130	Sajira	5	5	4	6	2	1	6	3	4	59.07	109	3
56	Lebak	3602	3602140	Cimarga	5	5	3	6	4	3	6	3	4	63.48	89	4
57	Lebak	3602	3602150	Cikulur	5	6	3	6	2	5	6	3	4	72.39	47	5
58	Lebak	3602	3602160	Warunggunung	5	6	3	6	5	1	6	4	4	77.86	24	5
59	Lebak	3602	3602170	Cibadak	3	6	3	6	6	3	6	3	4	78.38	21	5
60	Lebak	3602	3602180	Rangkasbitung	1	6	6	6	6	1	6	6	4	78.16	22	5
61	Lebak	3602	3602181	Kalanganyar	3	6	4	6	6	3	6	4	4	75.47	31	5
62	Lebak	3602	3602190	Maja	5	6	6	6	4	1	6	4	4	75.77	29	5
63	Lebak	3602	3602191	Curugbitung	6	6	4	6	3	1	6	1	4	60.17	104	3
64	Tangerang	3603	3603010	Cisoka	2	3	6	6	5	1	6	6	4	66.31	74	4
65	Tangerang	3603	3603011	Solear	1	4	6	6	6	5	6	6	4	68.74	66	4
66	Tangerang	3603	3603020	Tigaraksa	1	5	6	6	6	4	6	6	4	55.66	114	3
67	Tangerang	3603	3603021	Jambe	2	2	6	6	6	6	6	6	4	72.78	44	5
68	Tangerang	3603	3603030	Cikupa	1	6	6	6	6	3	6	6	4	59.63	106	3
69	Tangerang	3603	3603040	Panongan	1	6	6	6	6	6	6	6	4	50.08	119	2
70	Tangerang	3603	3603050	Curug	1	6	6	6	6	6	6	6	4	62.15	96	4
71	Tangerang	3603	3603051	Kelapa Dua	1	6	6	6	6	4	6	6	4	66.70	70	4
72	Tangerang	3603	3603060	Legok	1	4	6	6	6	1	6	6	4	62.08	97	4
73	Tangerang	3603	3603070	Pagedangan	1	5	6	6	6	6	6	6	4	48.25	121	2

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec	Nama Kecamatan	1. Prioritas NCPR	2. Prioritas POVERTY	3. Prioritas FOOD EXPENDITURE >65%	4. Prioritas No ELECTRIC	5. Prioritas No WATER	6. Prioritas MOBIRDITY	7. Prioritas RASIO TENKES	8. Prioritas FEMALE SCHOOL	9. Prioritas STUNTING	INDEK KP KUMULATIF	PERINGKAT KP	PRIORITAS KOMPOSIT
74	Tangerang	3603	3603081	Cisauk	1	5	6	6	6	3	6	6	4	49.43	120	2
75	Tangerang	3603	3603120	Pasarkemis	1	6	6	6	6	3	6	6	4	68.90	63	4
76	Tangerang	3603	3603121	Sindang Jaya	3	4	6	6	6	6	6	4	4	71.12	55	5
77	Tangerang	3603	3603130	Balaraja	1	6	6	6	6	5	6	6	4	77.47	25	5
78	Tangerang	3603	3603131	Jayanti	3	5	6	6	6	5	6	6	4	75.38	34	5
79	Tangerang	3603	3603132	Sukamulya	2	5	6	6	6	4	6	4	4	71.71	52	5
80	Tangerang	3603	3603140	Kresiek	5	4	6	6	6	2	6	4	4	76.08	28	5
81	Tangerang	3603	3603141	Gunung Kaler	6	4	6	6	6	5	6	4	4	79.99	17	6
82	Tangerang	3603	3603150	Kronjo	5	5	6	6	6	6	6	3	4	79.00	19	6
83	Tangerang	3603	3603151	Mekar Baru	5	4	6	6	6	1	6	1	4	75.39	33	5
84	Tangerang	3603	3603160	Mauk	5	5	6	6	6	6	6	3	4	76.95	27	5
85	Tangerang	3603	3603161	Kemiri	5	2	5	6	6	1	6	3	4	71.53	53	5
86	Tangerang	3603	3603162	Sukadiri	4	5	6	6	6	1	6	4	4	75.24	35	5
87	Tangerang	3603	3603170	Rajeg	2	4	6	6	6	5	6	6	4	69.98	58	5
88	Tangerang	3603	3603180	Sepatan	1	6	6	6	6	2	6	6	4	71.52	54	5
89	Tangerang	3603	3603181	Sepatan Timur	1	4	6	6	6	2	6	4	4	55.74	112	3
90	Tangerang	3603	3603190	Pakuhaji	3	4	6	6	6	6	6	4	4	74.86	36	5
91	Tangerang	3603	3603200	Teluknaga	1	5	6	6	6	1	6	5	4	62.68	94	4
92	Tangerang	3603	3603210	Kosambi	1	6	6	6	6	5	6	6	4	68.54	67	4
93	Serang	3604	3604010	Cinangka	4	5	6	6	3	3	6	3	4	64.20	85	4
94	Serang	3604	3604020	Padarincang	6	5	6	6	6	6	6	3	4	75.45	32	5
95	Serang	3604	3604030	Ciomas	2	3	4	6	3	5	6	3	4	59.53	107	3
96	Serang	3604	3604040	Pabuaran	4	6	4	6	6	2	6	4	4	69.22	62	4
97	Serang	3604	3604041	Gunung Sari	2	5	4	6	2	5	6	3	4	55.10	115	3
98	Serang	3604	3604050	Baros	4	4	6	6	3	6	6	4	4	66.57	72	4

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec	Nama Kecamatan	1. Prioritas NCPR	2. Prioritas POVERTY	3. Prioritas FOOD EXPENDITURE >65%	4. Prioritas No ELECTRIC	5. Prioritas No WATER	6. Prioritas MOBIRDITY	7. Prioritas RASIO TENKES	8. Prioritas FEMALE SCHOOL	9. Prioritas STUNTING	INDEK KP KUMULATIF	PERINGKAT KP	PRIORITAS KOMPOSIT
99	Serang	3604	3604060	Petir	4	5	4	6	6	6	6	4	4	72.65	46	5
100	Serang	3604	3604061	Tunjung Teja	5	6	6	6	1	1	6	4	4	71.85	51	5
101	Serang	3604	3604080	Cikeusal	5	6	6	6	5	1	6	4	4	80.92	16	6
102	Serang	3604	3604090	Pamarayan	6	5	6	6	6	1	6	3	4	70.98	56	5
103	Serang	3604	3604091	Bandung	5	6	5	6	4	4	6	2	4	79.72	18	6
104	Serang	3604	3604100	Jawilan	5	6	6	6	6	1	6	4	4	78.80	20	6
105	Serang	3604	3604110	Kopo	6	5	5	6	4	1	6	4	4	63.98	88	4
106	Serang	3604	3604120	Cikande	3	6	6	6	6	4	6	4	4	83.61	13	6
107	Serang	3604	3604121	Kibin	4	6	6	6	6	5	6	5	4	92.48	5	6
108	Serang	3604	3604130	Kragilan	4	6	6	6	6	1	6	6	4	86.82	11	6
109	Serang	3604	3604180	Waringinkurung	1	6	6	6	6	4	6	3	4	69.40	61	4
110	Serang	3604	3604190	Mancak	5	5	5	6	2	1	6	4	4	60.63	101	3
111	Serang	3604	3604200	Anyar	2	6	5	6	5	5	6	5	4	73.05	43	5
112	Serang	3604	3604210	Bojonegara	2	6	6	6	6	2	6	6	4	89.60	9	6
113	Serang	3604	3604211	Pulo Ampel	1	6	6	6	6	1	6	6	4	83.81	12	6
114	Serang	3604	3604220	Kramatwatu	4	6	6	6	6	3	6	6	4	93.62	4	6
115	Serang	3604	3604240	Ciruas	5	6	6	6	6	6	6	5	4	94.81	3	6
116	Serang	3604	3604250	Pontang	6	6	6	6	6	6	6	2	4	91.91	6	6
117	Serang	3604	3604251	Lebak Wangi	6	6	6	6	6	6	6	3	4	94.92	2	6
118	Serang	3604	3604260	Carenang	6	6	3	6	6	3	6	3	4	90.09	8	6
119	Serang	3604	3604261	Binuang	6	6	6	6	6	6	6	6	4	95.91	1	6
120	Serang	3604	3604270	Tirtayasa	6	6	5	6	6	1	6	3	4	87.24	10	6
121	Serang	3604	3604271	Tanara	6	6	6	6	6	6	6	4	4	90.22	7	6
122	Kota Tangerang	3671	3671010	Ciledug	0	6	6	6	6	5	6	6	4	73.63	21	6
123	Kota Tangerang	3671	3671011	Larangan	0	6	6	6	6	6	6	6	4	74.95	19	6

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec	Nama Kecamatan	1. Prioritas NCPR	2. Prioritas POVERTY	3. Prioritas FOOD EXPENDITURE >65%	4. Prioritas No ELECTRIC	5. Prioritas No WATER	6. Prioritas MOBIRDITY	7. Prioritas RASIO TENKES	8. Prioritas FEMALE SCHOOL	9. Prioritas STUNTING	INDEK KP KUMULATIF	PERINGKAT KP	PRIORITAS KOMPOSIT
124	Kota Tangerang	3671	3671012	Karang Tengah	0	6	6	6	6	6	6	6	4	77.20	16	6
125	Kota Tangerang	3671	3671020	Cipondoh	0	6	6	6	6	6	6	6	4	75.91	18	6
126	Kota Tangerang	3671	3671021	Pinang	0	6	6	6	6	6	6	6	4	74.01	20	6
127	Kota Tangerang	3671	3671030	Tangerang	0	6	6	6	6	6	6	6	4	77.83	14	6
128	Kota Tangerang	3671	3671031	Karawaci	0	6	6	6	6	6	6	6	4	78.64	11	6
129	Kota Tangerang	3671	3671040	Jati Uwung	0	5	6	6	6	6	6	6	4	64.73	27	5
130	Kota Tangerang	3671	3671041	Cibodas	0	6	6	6	6	6	6	6	4	78.71	10	6
131	Kota Tangerang	3671	3671042	Periuk	0	6	6	6	6	6	6	6	4	78.84	8	6
132	Kota Tangerang	3671	3671050	Batuceper	0	6	6	6	6	6	6	6	4	78.81	9	6
133	Kota Tangerang	3671	3671051	Neglasari	0	5	6	6	6	5	6	4	4	68.71	25	6
134	Kota Tangerang	3671	3671060	Benda	0	6	6	6	6	6	6	6	4	76.76	17	6
135	Kota Cilegon	3672	3672010	Ciwandan	0	6	6	6	6	5	6	6	4	58.82	30	5
136	Kota Cilegon	3672	3672011	Citangkil	0	6	6	6	6	5	6	6	4	65.03	26	5
137	Kota Cilegon	3672	3672020	Pulomerak	0	6	6	6	6	4	6	6	4	61.67	28	5
138	Kota Cilegon	3672	3672021	Purwakarta	0	6	6	6	6	6	6	6	4	88.56	2	6
139	Kota Cilegon	3672	3672022	Grogol	0	6	6	6	6	3	6	6	4	70.73	23	6
140	Kota Cilegon	3672	3672030	Cilegon	0	6	6	6	6	5	6	6	4	81.09	7	6
141	Kota Cilegon	3672	3672031	Jombang	0	6	6	6	6	3	6	6	4	78.21	13	6
142	Kota Cilegon	3672	3672040	Cibeber	0	6	6	6	6	6	6	6	4	78.40	12	6
143	Kota Serang	3673	3673010	Curug	0	4	5	6	4	6	6	4	4	42.98	34	4
144	Kota Serang	3673	3673020	Walantaka	0	6	6	6	6	1	6	6	4	48.38	31	4
145	Kota Serang	3673	3673030	Cipocok Jaya	0	6	6	6	6	5	6	6	4	59.66	29	5
146	Kota Serang	3673	3673040	Serang	0	6	6	6	6	2	6	6	4	71.14	22	6
147	Kota Serang	3673	3673050	Taktakan	0	5	5	6	4	4	6	5	4	43.84	33	4
148	Kota Serang	3673	3673060	Kasemen	0	5	5	6	6	1	6	3	4	46.93	32	4

No.	Nama Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Kode Kec	Nama Kecamatan	1. Prioritas NCPR	2. Prioritas POVERTY	3. Prioritas FOOD EXPENDITURE >65%	4. Prioritas No ELECTRIC	5. Prioritas No WATER	6. Prioritas MOBIRDITY	7. Prioritas RASIO TENKES	8. Prioritas FEMALE SCHOOL	9. Prioritas STUNTING	INDEK KP KUMULATIF	PERINGKAT KP	PRIORITAS KOMPOSIT
149	Kota Tangerang Selatan	3674	3674010	Setu	0	6	6	6	6	6	6	6	4	83.49	5	6
150	Kota Tangerang Selatan	3674	3674020	Serpong	0	6	6	6	6	6	6	6	4	81.30	6	6
151	Kota Tangerang Selatan	3674	3674030	Pamulang	0	6	6	6	6	6	6	6	4	77.38	15	6
152	Kota Tangerang Selatan	3674	3674040	Ciputat	0	6	6	6	6	6	6	6	4	69.18	24	6
153	Kota Tangerang Selatan	3674	3674050	Ciputat Timur	0	6	6	6	6	6	6	6	4	83.79	4	6
154	Kota Tangerang Selatan	3674	3674060	Pondok Aren	0	6	6	6	6	6	6	6	4	86.23	3	6
155	Kota Tangerang Selatan	3674	3674070	Serpong Utara	0	6	6	6	6	6	6	6	4	95.91	1	6

Lampiran 12. Susunan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten
Tahun 2024

SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN
PANGAN
(*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA*)
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pengarah I | : | Gubernur Banten |
| Pengarah II | : | Sekretaris Daerah Provinsi Banten |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten |
| Ketua | : | Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten |
| Sekretaris | : | Analisis Ketahanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten |
| Anggota | : | |
1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten
 2. Statistisi Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
 3. Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
 4. Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten
 5. Penyuluh Sosial pada Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten
 6. Analisis Gizi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten
 7. Inspektur Ketenagalistrikan pada Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Banten
 8. Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 9. Analisis Sumberdaya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
 10. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
 11. Analisis Kebencanaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten
 12. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Banten

Sekretariat :
Ketua : Analis Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten
Wakil Ketua : Analis Ketahanan Pangan Pada Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Banten
1. Perencana Pada Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten
2. Analis Pangan Pada Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Banten
3. Analis Pangan Pada Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Banten
4. Pengadministrasi Umum Pada Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Lampiran 13. Berita Acara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS –FSVA)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini disusun oleh Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 dengan Dinas Ketahanan Pangan sebagai instansi penerbit dan dalam penyusunannya sudah diketahui dan disetujui sebagaimana hasil rapat teknis tim penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.

Serang, Desember 2024

Diketahui dan disetujui

Tim Penyusun,

Dr. Agus Supriyadi, S.Sos.,M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)

Wiwi Yulyani Saptawianti, SE.,MM
NIP. 19740706 200112 2 003
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)

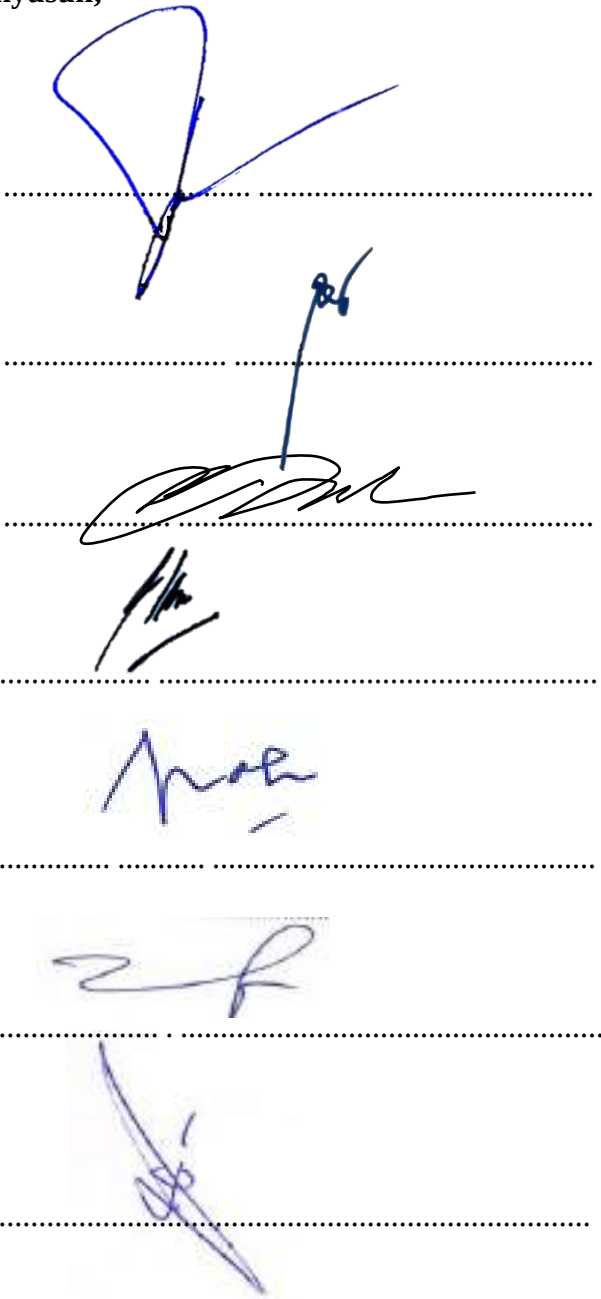
Rudi Wahyu Rudito, STP
NIP. 19680720 200112 1 006
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)

Hariyanto, SST, M.Si
NIP. 19730609 199403 1 001
(Badan Pusat Statistik Provinsi Banten)

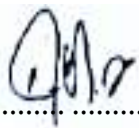
Indah Damayanti, ST.,MM
NIP. 19750808 200112 2 002
(Bappeda Provinsi Banten)

Dadan Firdaus Setya P, STP.,M.Si
NIP. 19801201 200502 1 007
(Dinas Pertanian Provinsi Banten)

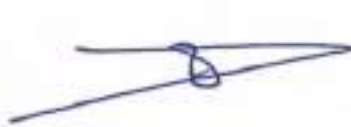
Drs. H. Asep Saepudin, M.Si
NIP. 19680608 199303 1 008
(Dinas Sosial Provinsi Banten)



Neneng Istiqomah, SKM.MH
NIP. 19820101 201101 2 005
(Dinas Kesehatan Provinsi Banten)



Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm.,A.Pt
NIP. 19860813 201101 1 005
(Dinas Kesehatan Provinsi Banten)



Inda Merliana, ST.,M.Sc
NIP. 19840202 201001 2 007
(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten)



Haris Efendi, SE.,MM
NIP. 19700118 199803 1 009
(Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten)



Ahmad Heri Sudrajat, ST.,M.Si
NIP. 19750220 200604 1 005
(Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten)



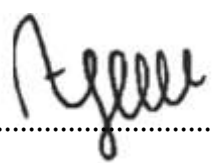
Rudi Yatmawan, SE.,M.Si
NIP. 19760327 200112 1 005
(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten)



Jumena Sukmawijaya, ST.,M.Si
NIP. 19770330 200212 1 002
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten)



Mustofa Angkie Bangun Permana, S.Tr
NIP. 19990906 202204 1 001
(Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Banten)



Tiara Luthfie, SKM.,MKM
NIP. 19770829 200212 2 007
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)



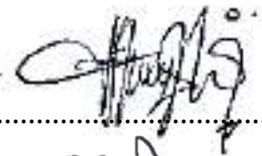
Hj. Indriafitri Gumelar, ST.,MM
NIP. 19760928 200312 2 005
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)



Ratih Wulansari, SE.,M.Si
NIP. 19770914 200112 2 002
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)


.....

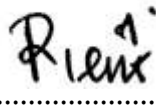
Nuke Azzahra, S.P
NIP. 19911206 201503 2 002
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)


.....

Silvirawati Surya, SP.,M.Si
NIP. 19850610 201503 2 004
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)


.....

Rindang Riftiani
NIP. 19790825 200801 2 012
(Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten)


.....

Lampiran 14.Data Dasar Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Produksi Padi	Produksi Jagung	Produksi Ubi Kayu	Produksi Ubi Jalar	% Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	% Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	% RT Tanpa Akses Listrik	% RT Tanpa Akses Air Bersih	Persentase Angka Kesakitan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan > 15 tahun	% Stunting
1	Pandeglang	Sumur	30,917	701	100	132	9.17	31.12	0.00	24.00	6.63	52	258.54	101.7444109	26305	6.92	0.98
2	Pandeglang	Cimanggu	33,584	578	674	153	9.91	21.67	0.00	74.79	4.97	54	259.73	150.4023409	39064	8.06	1.36
3	Pandeglang	Cibaliung	16,590	3,249	674	34	24.12	21.73	0.00	65.38	10.71	65	221.88	143.1269154	31757	7.29	0.60
4	Pandeglang	Cibitung	14,644	493	474	119	22.63	29.97	0.00	72.93	12.40	65	180.72	124.6347942	22524	6.18	4.81
5	Pandeglang	Cikeusik	77,237	7,964	874	-	15.24	35.89	0.00	63.85	10.96	70	322.76	167.917338	54197	5.68	0.94
6	Pandeglang	Cigeulis	29,481	6,054	1,024	-	18.24	26.78	0.00	48.84	19.72	53	176.21	209.4035526	36899	6.58	0.38
7	Pandeglang	Panimbang	43,088	1,451	425	-	6.55	33.60	0.00	74.27	4.94	84	132.84	406.66215	54021	8.12	0.86
8	Pandeglang	Sobang	47,103	3,256	300	-	4.19	34.64	0.00	50.34	22.58	53	138.80	276.7146974	38408	8.40	3.56
9	Pandeglang	Munjul	25,190	1,452	649	17	17.81	18.99	0.00	86.90	5.68	42	75.25	336.8770764	25350	8.12	1.18
10	Pandeglang	Angsana	40,310	3,799	1,349	-	9.18	47.35	0.00	52.36	12.47	62	64.84	438.7415176	28448	5.49	4.01
11	Pandeglang	Sindangresmi	28,956	113	874	-	17.59	11.74	0.00	77.81	14.24	65	65.20	364.7392638	23781	5.95	1.48
12	Pandeglang	Picung	29,575	-	474	-	10.15	14.96	0.00	41.15	15.63	40	56.74	692.4039478	39287	5.86	2.80
13	Pandeglang	Bojong	18,225	-	474	-	13.17	53.42	0.00	88.74	9.22	66	50.72	735.1537855	37287	6.71	1.50
14	Pandeglang	Saketi	20,633	1,626	1,033	974	11.95	35.36	0.00	23.08	5.25	67	54.13	891.4649917	48255	6.48	3.71
15	Pandeglang	Cisata	17,381	-	974	409	12.85	58.74	0.00	42.77	8.15	73	32.65	798.9892802	26087	7.50	0.40
16	Pandeglang	Pagelaran	27,162	49	350	119	8.75	28.67	0.00	32.51	11.63	46	42.76	914.4293732	39101	7.98	2.61
17	Pandeglang	Patia	41,265	-	924	-	7.66	35.89	0.00	59.67	14.02	68	45.48	651.2532982	29619	5.77	0.29
18	Pandeglang	Sukaresmi	42,822	63	350	50	8.65	41.82	0.00	31.90	15.68	82	57.30	668.1500873	38285	7.21	2.19
19	Pandeglang	Labuan	3,750	-	75	100	3.75	40.12	0.00	48.76	18.30	51	15.66	3687.292465	57743	10.24	1.17
20	Pandeglang	Carita	14,554	1,607	1,448	579	8.90	59.23	0.00	69.76	24.37	62	41.87	837.1387628	35051	7.07	7.36
21	Pandeglang	Jiput	15,304	106	849	562	11.26	37.00	0.00	25.31	18.90	45	53.04	636.6704374	33769	8.34	1.01

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Produksi Padi	Produksi Jagung	Produksi Ubi Kayu	Produksi Ubi Jalar	% Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	% Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	% RT Tanpa Akses Listrik	% RT Tanpa Akses Air Bersih	Persentase Angka Kesakitan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan > 15 tahun	% Stunting
22	Pandeglang	Cikedal	13,694	157	225	316	10.50	55.24	0.00	88.88	5.48	46	26.00	1346.846154	35018	7.17	0.96
23	Pandeglang	Menes	14,045	-	624	1,026	7.05	20.29	0.00	40.22	8.45	57	22.41	1832.931727	41076	8.21	1.27
24	Pandeglang	Pulosari	20,140	521	1,324	528	27.10	25.14	0.00	65.68	18.58	56	31.33	1070.730929	33546	7.43	1.32
25	Pandeglang	Mandalawangi	22,442	4,173	699	562	16.18	26.79	0.00	45.43	3.17	49	80.19	711.1609926	57028	7.37	0.59
26	Pandeglang	Cimanuk	24,960	1,216	75	48	16.39	60.53	0.00	61.73	19.96	65	23.64	1891.032149	44704	5.13	0.25
27	Pandeglang	Cipeucang	15,168	-	125	-	17.90	30.29	0.00	92.10	8.30	60	21.16	1526.795841	32307	8.55	2.23
28	Pandeglang	Banjar	12,136	303	474	-	9.71	35.89	0.00	32.42	11.66	49	30.50	1199.213115	36576	7.00	1.51
29	Pandeglang	Kaduhejo	10,322	289	200	-	13.13	61.19	0.00	65.12	4.80	53	33.57	1299.076556	43610	7.49	4.49
30	Pandeglang	Mekarjaya	10,600	120	1,049	136	22.46	16.79	0.00	24.48	14.87	67	31.34	759.7319719	23810	6.49	22.33
31	Pandeglang	Pandeglang	4,547	-	474	272	1.85	43.46	0.00	54.53	23.78	62	16.85	2687.181009	45279	10.49	1.74
32	Pandeglang	Majasari	3,493	-	-	-	8.33	35.08	0.00	74.15	33.75	45	19.57	2830.965764	55402	10.37	5.42
33	Pandeglang	Cadasari	5,413	78	175	102	13.00	56.34	0.00	61.11	15.04	53	26.20	1461.183206	38283	6.38	3.20
34	Pandeglang	Karangtanjung	5,701	-	225	-	3.27	41.02	0.00	73.18	9.86	71	19.07	2023.754588	38593	6.83	6.78
35	Pandeglang	Koroncong	6,336	14	75	51	10.02	29.34	0.00	42.53	20.14	54	17.86	1248.37626	22296	6.12	2.75
36	Lebak	Malingping	22,232	175	727	1,447	10.92	31.86	0.00	74.33	19.67	106	109.97	668.7187415	73539	7.13	0.96
37	Lebak	Wanasalam	42,147	70	501	272	21.48	50.23	0.00	72.79	10.36	116	116.35	514.0696175	59812	7.02	2.28
38	Lebak	Panggarangan	26,349	21	251	102	12.36	53.60	0.00	63.21	2.58	81	176.99	221.6339906	39227	7.41	0.81
39	Lebak	Cihara	15,962	28	251	85	4.61	39.28	0.00	84.91	20.85	59	124.55	273.2637495	34035	6.83	1.13
40	Lebak	Bayah	15,189	84	200	85	2.23	45.57	0.00	44.92	14.84	61	144.05	322.9642485	46523	8.87	1.60
41	Lebak	Cilograng	12,256	209	50	83	11.00	57.97	0.00	30.34	38.40	61	95.96	375.3751563	36021	6.98	1.19
42	Lebak	Cibeber	26,034	524	251	98	5.15	47.04	0.00	41.94	10.75	142	400.92	142.1480595	56990	5.71	3.00
43	Lebak	Cijaku	16,343	-	75	17	15.23	22.22	0.00	69.61	2.97	46	106.81	294.9255688	31501	7.09	7.10
44	Lebak	Cigemblong	19,535	3	276	-	21.76	46.85	0.00	39.66	14.15	32	153.11	144.0075763	22049	6.69	3.75

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Produksi Padi	Produksi Jagung	Produksi Ubi Kayu	Produksi Ubi Jalar	% Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	% Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	% RT Tanpa Akses Listrik	% RT Tanpa Akses Air Bersih	Persentase Angka Kesakitan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan > 15 tahun	% Stunting
45	Lebak	Banjarsari	19,915	175	576	-	19.11	59.31	0.00	83.50	14.18	91	151.86	444.1393389	67447	7.35	0.67
46	Lebak	Cileles	19,588	2,164	-	-	15.32	47.45	0.00	84.84	9.77	69	164.64	342.936103	56461	6.69	2.42
47	Lebak	Gunung Kencana	15,522	3,351	3,056	-	18.43	70.60	0.00	41.41	6.97	76	141.49	281.4827903	39827	6.87	1.05
48	Lebak	Bojongmanik	13,173	42	25	17	15.19	42.75	0.00	56.38	2.47	29	95.96	265.0062526	25430	7.62	2.58
49	Lebak	Cirinten	18,540	-	301	-	13.48	39.01	0.00	58.61	9.68	41	122.60	247.3409462	30324	6.65	5.52
50	Lebak	Leuwidamar	16,700	14	25	51	22.78	66.82	0.35	80.33	20.93	88	143.10	385.9818309	55234	5.90	8.27
51	Lebak	Muncang	18,973	-	977	-	19.35	63.18	0.00	65.24	50.03	46	81.93	473.4773587	38792	6.65	0.73
52	Lebak	Sobang	19,126	33	100	17	8.65	51.79	0.00	88.26	13.68	51	116.69	273.3481875	31897	6.37	3.13
53	Lebak	Cipanas	16,103	-	332	68	6.85	54.23	0.00	50.55	44.93	70	64.91	806.932676	52378	7.05	2.84
54	Lebak	Lebakgedong	8,427	-	50	17	2.69	60.53	0.00	85.48	13.75	50	91.44	238.1452318	21776	6.63	1.45
55	Lebak	Sajira	19,617	98	1,203	-	14.23	41.08	0.00	67.30	23.97	95	106.05	551.2211221	58457	6.89	8.47
56	Lebak	Cimarga	18,094	91	-	-	14.05	54.81	0.00	46.15	12.46	73	187.11	397.0605526	74294	7.21	6.64
57	Lebak	Cikulur	17,344	-	150	-	4.95	51.94	0.00	64.59	9.51	86	60.51	1019.517435	61691	6.86	3.69
58	Lebak	Warunggunung	19,170	-	-	-	5.69	53.70	0.00	33.56	18.34	102	46.09	1401.974398	64617	8.18	2.16
59	Lebak	Cibadak	13,051	-	-	-	5.57	53.82	0.00	21.78	12.62	105	36.52	2038.773275	74456	6.69	5.83
60	Lebak	Rangkasbitung	11,522	77	551	34	1.65	22.08	0.00	21.35	33.81	143	73.76	1893.126356	139637	9.04	1.43
61	Lebak	Kalanganyar	6,451	-	276	-	6.38	48.13	0.00	28.40	12.76	66	28.90	1410.069204	40751	8.01	1.06
62	Lebak	Maja	16,911	761	827	187	6.16	25.78	0.00	41.26	23.43	68	78.58	791.1427844	62168	7.96	4.83
63	Lebak	Curugbitung	12,291	328	2,405	562	9.42	45.91	0.00	59.63	19.14	51	91.33	420.0591262	38364	5.88	1.70
64	Tangerang	Cisoka	11,411	132	49	34	20.27	17.45	0.00	33.69	18.41	64	31.21	3126.882409	97590	9.55	0.12
65	Tangerang	Solear	10,543	-	74	103	18.34	26.18	0.00	21.86	8.38	50	34.07	2992.955679	101970	9.61	0.02
66	Tangerang	Tigaraksa	6,505	73	98	52	11.64	9.71	0.01	28.13	11.36	102	55.30	2957.142857	163530	10.49	1.85
67	Tangerang	Jambe	6,530	-	98	52	25.28	26.09	0.00	14.01	1.69	44	28.25	1969.911504	55650	9.81	0.99

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Produksi Padi	Produksi Jagung	Produksi Ubi Kayu	Produksi Ubi Jalar	% Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	% Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	% RT Tanpa Akses Listrik	% RT Tanpa Akses Air Bersih	Persentase Angka Kesakitan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan > 15 tahun	% Stunting
68	Tangerang	Cikupa	1,896	44	196	189	5.17	16.25	0.00	27.11	13.58	85	46.00	4546.521739	209140	11.24	0.76
69	Tangerang	Panongan	3,403	-	74	34	9.63	18.06	0.00	19.24	4.59	44	36.15	3596.127248	130000	9.81	1.00
70	Tangerang	Curug	2,224	124	613	138	4.91	11.47	0.00	25.86	4.96	100	30.83	5728.83555	176620	12.22	1.91
71	Tangerang	Kelapa Dua	244	-	25	34	2.23	2.73	0.00	16.23	10.15	131	26.22	6390.160183	167550	10.23	5.59
72	Tangerang	Legok	8,943	15	147	103	15.43	21.93	0.00	21.32	28.04	114	37.28	3334.763948	124320	9.55	2.93
73	Tangerang	Pagedangan	1,214	-	98	120	10.66	15.57	0.00	25.59	6.12	39	50.75	2191.527094	111220	9.29	3.64
74	Tangerang	Cisauk	2,302	190	221	103	13.10	21.39	0.00	14.71	13.34	80	30.05	3042.928453	91440	9.15	2.72
75	Tangerang	Pasarkemis	2,282	-	25	-	2.44	1.73	0.00	6.77	12.25	86	30.73	8309.469574	255350	11.40	1.19
76	Tangerang	Sindang Jaya	13,968	88	74	-	18.31	17.34	0.00	24.24	4.97	41	41.39	2309.253443	95580	8.49	0.06
77	Tangerang	Balaraja	9,660	-	74	103	6.14	18.35	0.00	12.85	8.94	106	32.30	3843.034056	124130	9.40	0.86
78	Tangerang	Jayanti	11,440	-	25	-	13.32	21.52	0.00	13.59	9.00	40	24.88	2842.845659	70730	10.55	0.65
79	Tangerang	Sukamulya	9,319	44	49	-	13.58	23.67	0.00	13.49	11.01	46	25.44	2920.990566	74310	8.44	0.78
80	Tangerang	Kresek	17,404	-	-	-	15.01	23.72	0.00	7.53	15.15	54	29.99	2394.131377	71800	8.04	0.39
81	Tangerang	Gunung Kaler	21,651	-	-	-	18.16	15.08	0.00	5.18	8.15	50	32.77	1713.762588	56160	8.16	0.90
82	Tangerang	Kronjo	17,794	117	-	-	12.55	6.44	0.00	5.11	3.43	53	46.51	1410.449366	65600	7.23	0.69
83	Tangerang	Mekar Baru	15,180	22	-	-	19.50	20.94	0.00	0.00	18.90	41	25.78	1712.567882	44150	5.51	3.50
84	Tangerang	Mauk	21,764	-	-	-	11.68	22.64	0.00	0.00	3.75	82	44.94	2033.377837	91380	6.97	10.19
85	Tangerang	Kemiri	14,132	-	49	-	28.31	39.77	0.01	0.00	35.93	45	33.45	1524.06577	50980	6.90	1.67
86	Tangerang	Sukadiri	16,082	-	-	-	12.13	23.26	0.00	6.55	22.02	54	24.99	2668.267307	66680	8.12	2.02
87	Tangerang	Rajeg	22,284	22	49	-	15.27	17.53	0.00	24.91	9.60	98	53.30	3531.144465	188210	9.87	0.67
88	Tangerang	Sepatan	5,598	-	-	-	5.79	15.74	0.00	10.43	15.58	59	19.22	5842.351717	112290	9.58	4.91
89	Tangerang	Sepatan Timur	3,755	-	-	-	15.09	14.66	0.00	12.11	14.07	46	19.66	5391.149542	105990	7.54	2.32
90	Tangerang	Pakuhaji	19,667	-	-	-	18.71	25.02	0.00	6.57	3.71	90	54.55	2334.188818	127330	7.66	0.90

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Produksi Padi	Produksi Jagung	Produksi Ubi Kayu	Produksi Ubi Jalar	% Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	% Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	% RT Tanpa Akses Listrik	% RT Tanpa Akses Air Bersih	Persentase Angka Kesakitan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan > 15 tahun	% Stunting
91	Tangerang	Teluknaga	8,548	-	-	-	10.87	17.17	0.00	0.00	19.22	82	52.41	3205.113528	167980	8.79	5.57
92	Tangerang	Kosambi	297	-	-	-	4.31	11.68	0.00	5.85	7.71	68	36.09	3095.317262	111710	10.22	1.71
93	Serang	Cinangka	13,919	-	-	-	11.30	25.57	0.00	50.68	12.77	50	111.47	562.0525702	62652	7.33	0.04
94	Serang	Padarincang	64,529	-	26	52	12.07	22.46	0.00	25.94	1.98	43	99.12	722.8813559	71652	7.44	1.77
95	Serang	Ciomas	5,831	-	53	52	21.90	44.45	0.00	54.51	7.97	55	48.53	910.7974449	44201	7.16	3.33
96	Serang	Pabuaran	7,675	402	1,748	774	9.64	41.12	0.00	25.16	16.54	44	79.14	561.0563558	44402	8.30	2.61
97	Serang	Gunung Sari	2,797	93	185	-	13.04	48.34	0.00	69.74	9.09	34	48.60	507.7160494	24675	7.11	2.69
98	Serang	Baros	13,856	36	106	138	16.73	11.08	0.00	52.74	3.70	51	44.07	1391.763104	61335	7.98	0.78
99	Serang	Petir	14,123	93	26	17	12.95	48.87	0.00	15.58	5.94	58	46.94	1390.072433	65250	8.25	0.00
100	Serang	Tunjung Teja	14,427	194	1,165	619	4.71	28.47	0.00	71.96	37.78	48	39.52	1249.038462	49362	8.12	3.57
101	Serang	Cikeusal	25,402	50	715	224	5.45	19.25	0.00	35.53	20.05	57	88.25	909.0424929	80223	8.30	8.30
102	Serang	Pamarayan	25,805	-	265	86	10.30	28.68	0.00	25.95	21.46	56	41.92	1500.548664	62903	7.07	0.04
103	Serang	Bandung	14,165	-	106	86	3.25	38.20	0.00	48.19	11.84	37	25.18	1617.196187	40721	6.04	5.07
104	Serang	Jawilan	18,015	1,560	477	103	4.92	27.46	0.00	15.53	92.82	44	38.95	1579.460847	61520	8.45	1.16
105	Serang	Kopo	18,351	323	3,232	980	12.40	31.70	0.00	47.08	33.63	73	44.69	1225.262922	54757	7.89	0.28
106	Serang	Cikande	17,554	-	-	-	2.00	28.86	0.00	27.60	10.41	67	50.53	2289.986147	115713	8.36	0.89
107	Serang	Kibin	12,201	-	53	-	0.26	14.46	0.00	0.00	8.75	46	33.51	1830.737093	61348	8.60	7.71
108	Serang	Kragilan	20,074	-	132	-	2.19	14.45	0.00	26.73	20.68	68	36.33	2251.96807	81814	9.04	2.07
109	Serang	Waringinkurung	3,489	36	-	-	8.40	28.47	0.00	0.44	10.51	41	51.29	991.9282511	50876	7.43	0.17
110	Serang	Mancak	15,904	86	26	-	10.87	38.50	0.00	65.12	17.13	49	74.03	666.9998649	49378	7.65	0.07
111	Serang	Anyar	7,790	625	-	34	6.75	38.80	0.00	35.69	7.16	50	56.81	1067.171273	60626	8.60	0.00
112	Serang	Bojonegara	6,286	14	1,245	344	1.58	22.25	0.00	0.00	15.38	40	30.30	1739.735974	52714	9.82	0.21
113	Serang	Pulo Ampel	4,107	446	265	-	1.79	20.80	0.00	4.64	38.50	40	32.56	1247.143735	40607	9.23	5.28

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Produksi Padi	Produksi Jagung	Produksi Ubi Kayu	Produksi Ubi Jalar	% Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	% Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	% RT Tanpa Akses Listrik	% RT Tanpa Akses Air Bersih	Persentase Angka Kesakitan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan > 15 tahun	% Stunting
114	Serang	Kramatwatu	24,726	-	-	-	1.67	18.53	0.00	6.76	13.25	63	48.59	2125.951842	103300	11.32	4.56
115	Serang	Ciruas	31,562	-	-	-	0.90	14.39	0.00	8.24	5.54	63	34.49	2480.342128	85547	8.58	1.46
116	Serang	Pontang	32,395	-	-	-	4.11	23.96	0.00	13.95	4.04	58	58.09	855.3623687	49688	6.26	7.71
117	Serang	Lebak Wangi	26,617	-	-	-	2.30	13.18	0.00	7.74	4.92	37	31.71	1279.848628	40584	6.79	0.00
118	Serang	Carenang	21,730	-	-	-	1.31	50.45	0.00	10.48	12.80	51	32.80	1250.97561	41032	7.23	0.68
119	Serang	Binuang	21,206	-	-	-	1.76	28.47	0.00	7.46	0.67	51	26.17	1255.636225	32860	9.57	0.06
120	Serang	Tirtayasa	27,351	-	-	-	5.24	30.38	0.00	5.37	29.51	62	64.46	756.4070742	48758	7.21	2.56
121	Serang	Tanara	21,897	-	106	-	5.66	24.08	0.00	2.83	2.54	58	49.30	885.0912779	43635	7.63	0.53
122	Kota Tangerang	Ciledug	-	-	-	-	7.89	2.15	0.00	14.79	7.97	96.00	8.77	17125.42759	150190	11.14	3.66
123	Kota Tangerang	Larangan	-	-	-	-	8.03	5.41	0.00	10.27	6.03	67.00	9.40	16155.31915	151860	10.68	3.10
124	Kota Tangerang	Karang Tengah	-	-	-	-	8.08	6.03	0.00	4.82	6.76	81.00	10.47	11216.80993	117440	11.03	5.36
125	Kota Tangerang	Cipondoh	-	-	-	-	5.23	9.42	0.00	5.71	6.63	129.00	17.91	12904.91346	231127	10.33	5.79
126	Kota Tangerang	Pinang	-	-	-	-	7.72	1.18	0.00	13.07	5.60	134.00	21.59	8646.178786	186671	10.68	3.74
127	Kota Tangerang	Tangerang	-	-	-	-	6.75	5.81	0.00	5.72	6.27	101.00	15.79	10486.06713	165575	11.61	4.56
128	Kota Tangerang	Karawaci	-	-	-	-	9.29	3.12	0.00	2.25	4.12	127.00	13.48	14353.11573	193480	11.46	6.09
129	Kota Tangerang	Jati Uwung	-	-	-	-	10.72	11.82	0.00	20.90	6.23	35.00	14.41	7460.791117	107510	9.58	5.36
130	Kota Tangerang	Cibodas	-	-	-	-	9.33	3.80	0.00	2.99	1.45	145.00	9.61	16444.95317	158036	11.27	2.57
131	Kota Tangerang	Periuk	-	-	-	-	6.32	5.42	0.00	2.20	3.87	131.00	9.54	15161.42558	144640	12.17	4.50
132	Kota Tangerang	Batuceper	-	-	-	-	7.30	1.27	0.00	2.67	4.51	117.00	11.58	8244.732297	95474	11.44	4.85
133	Kota Tangerang	Neglasari	-	-	-	-	12.85	18.26	0.00	1.88	8.22	70.00	16.08	7767.848259	124907	8.06	3.48
134	Kota Tangerang	Benda	-	-	-	-	8.28	1.84	0.00	0.00	4.47	63.00	5.92	14488.00676	85769	9.94	5.74
135	Kota Cilegon	Ciwandan	-	-	-	-	9.92	13.88	0.00	24.15	9.09	58.00	33.33	1536.753675	51220	9.31	4.56
136	Kota Cilegon	Citangkil	-	-	-	-	9.03	13.00	0.00	22.62	8.48	101.00	25.90	3251.737452	84220	10.28	5.59

No.	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Produksi Padi	Produksi Jagung	Produksi Ubi Kayu	Produksi Ubi Jalar	% Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	% Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran	% RT Tanpa Akses Listrik	% RT Tanpa Akses Air Bersih	Persentase Angka Kesakitan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan > 15 tahun	% Stunting
137	Kota Cilegon	Pulomerak	-	-	-	-	7.27	13.36	0.00	16.72	11.83	52.00	25.70	1933.463035	49690	9.94	7.67
138	Kota Cilegon	Purwakarta	-	-	-	-	2.62	10.47	0.00	2.43	5.72	47.00	16.60	2629.518072	43650	10.84	2.26
139	Kota Cilegon	Grogol	-	-	-	-	3.95	22.52	0.00	0.50	13.44	44.00	23.71	1827.920709	43340	10.22	4.69
140	Kota Cilegon	Cilegon	-	-	-	-	4.06	8.74	0.00	2.70	9.51	51.00	8.21	5870.88916	48200	11.13	2.46
141	Kota Cilegon	Jombang	-	-	-	-	3.90	9.03	0.00	2.15	12.72	49.00	10.31	6450.048497	66500	10.70	3.05
142	Kota Cilegon	Cibeber	-	-	-	-	4.25	13.00	0.00	2.70	4.91	63.00	18.80	3388.829787	63710	9.93	4.86
143	Kota Serang	Curug	-	-	-	-	16.00	38.95	0.00	49.58	6.28	41.00	38.96	1542.890144	60111	8.08	1.01
144	Kota Serang	Walantaka	-	-	-	-	6.90	27.75	0.00	26.70	18.43	69.00	36.56	3036.706783	111022	9.33	1.23
145	Kota Serang	Cipocok Jaya	-	-	-	-	6.41	22.53	0.00	26.05	8.06	86.00	34.10	3047.565982	103922	9.51	0.42
146	Kota Serang	Serang	-	-	-	-	4.12	18.26	0.00	9.35	15.05	175.00	26.55	8653.06968	229739	9.53	3.09
147	Kota Serang	Taktakan	-	-	-	-	11.86	31.04	0.00	42.92	10.96	72.00	61.16	1747.449313	106874	8.73	1.20
148	Kota Serang	Kasemen	-	-	-	-	10.40	31.12	0.00	8.08	30.03	75	68.85	1628.554829	112126	7.03	2.99
149	Kota Tangerang Selatan	Setu	-	-	-	-	3.66	1.70	0.00	10.97	0.69	104	16.76	5460.202864	91513	10.37	0.91
150	Kota Tangerang Selatan	Serpong	-	-	-	-	3.54	2.84	0.00	18.84	4.69	198	28.27	5781.782809	163451	10.66	0.84
151	Kota Tangerang Selatan	Pamulang	-	-	-	-	4.09	2.92	0.00	24.49	5.86	249	28.74	11275.53932	324059	11.58	0.63
152	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	-	-	-	-	5.32	2.94	0.00	25.36	6.63	157	21.11	10525.15396	222186	10.85	0.42
153	Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	-	-	-	-	3.43	3.66	0.00	15.13	4.02	163	17.81	9520.213363	169555	10.71	0.92
154	Kota Tangerang Selatan	Pondok Aren	-	-	-	-	3.06	4.47	0.00	15.96	2.26	204	29.80	9926.577181	295812	11.87	0.83
155	Kota Tangerang Selatan	Serpong Utara	-	-	-	-	0.86	0.44	0.00	10.47	3.05	108	22.36	6181.08229	138209	12.58	0.33





**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



**DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI
BANTEN**